

**MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN
DAERAH DI KOTA BONTANG DAN
SEKITARNYA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

Oleh :

Mujiyani
Deny Hidayati
Suko bandiyono
Sri Sunarti P.



**PUSLITBANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(PPT-LIPI)
2000**

KATA PENGANTAR

Laporan tentang "MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BONTANG DAN SEKITARNYA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR" ini merupakan salah satu Bagian Proyek Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (Litbang Kependudukan).

Mobilitas penduduk mempunyai kaitan erat dengan pembangunan terutama di daerah tujuan. Fenomena mobilitas penduduk terjadi sebagai respon atas perbedaan karakteristik antar daerah. Pada umumnya, mereka melakukan mobilitas didasarkan atas pertimbangan ekonomi dalam upaya untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik dibandingkan kesempatan-kesempatan yang ada di daerah asal.

Sifat yang melekat dari proses mobilitas penduduk yaitu adanya dampak lebih positif maupun negatif dalam konteks pembangunan. Tulisan hasil penelitian ini telah dapat mengungkapkan berbagai isu keterkaitan antara mobilitas penduduk, penentuan kebijaksanaan pembangunan daerah, khususnya Kota Bontang.

Penelitian ini merupakan salah satu hasil kegiatan dari program penelitian mobilitas penduduk di Kalimantan Timur yaitu sebagai realisasi kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Bappeda Kalimantan Timur yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada banyak lembaga yang telah memberi data dan informasi, khususnya Desa Loktuan. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada staf peneliti dan teknisi yang telah menyelesaikan tulisan ini.

Jakarta, Desember 2000
Kapuslitbang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.

Dr. Aswatini Raharto
NIP: 320003450



DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	iii	
DAFTAR ISI	v	
DAFTAR TABEL	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Tujuan Penelitian	1
1.3	Methodologi	2
1.3.1	Alur berfikir	2
1.3.2	Pemilihan Lokasi	4
1.3.3	Pendekatan	4
1.3.4	Analisa Data	5
BAB II	TINJAUAN MENGENAI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN MOBILITAS PENDUDUK PROPINSI KAIMANTAN TIMUR	7
2.1	Kebijakan transmigrasi, Pembangunan di KTI dan penanaman modal asing	7
2.1.1	Program Transmigrasi	7
2.1.2	Kebijakan Pembangunan di KTI	9
2.1.3	Kebijakan Penanaman Modal Asing	10
2.2	Implementasi Penanaman Modal Asing di Kalimantan Timur	13
2.3	Kebijakan Sektor dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia	14
2.4	Kebijaksanaan Kerjasama Regional BIMP-EAGA	15
2.5	Kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)	16
BAB III	SETTING DAERAH	21
3.1	Aspek Geografis	21
3.2	Sarana dan Prasarana	23
3.3	Sosial Ekonomi	25
3.4	Aspek Kependudukan	27

Bab IV	MOBILITAS PENDUDUK : POLA DAN SEJARAH	29
4.1	Pola Migrasi	29
4.2	Keterkaitan antara Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah dalam Aspek Sejarah	30
4.2.1	“Ada Buah ada Burung”	31
4.2.2	Meningkatnya migran spontan di Kota Bontang: Kasus Lok tuan Bontang	33
4.2.3	Mobilitas penduduk dalam konteks program transmigrasi: Prangat Baru Kutai	35
BAB V	MOBILITAS PENDUDUK DAN INTERAKSI SOSIAL	39
5.1	Konsep Penduduk Asli, Lokal dan Pendetang	39
5.1.1	Penduduk asli: orang Kutai atau orang Bontang Kuala?	40
5.1.2	Siapa Penduduk Lokal?	41
5.1.3	Konsep Pendetang: Siapa Mereka?	42
5.2	Kemajemukan Masyarakat di kota Bontang	45
5.2.1	Tidak adanya Dominasi Kelompok Etnik	46
5.2.2	Bahasa sebagai Ekspresi Toleransi antar Etnik	51
5.2.3	Organisasi Sosial yang Berorientasi Etnik	53
5.3	Tingginya Toleransi Etnik dalam Komunitas yang Beragam	54
5.4	Potensi Munculnya Konflik Sosial	56
BAB VI	POLA PEKERJAAN DAN HUBUNGAN KERJA	59
6.1	Pola Pekerjaan	59
6.2	Hubungan Kerja	61
6.2.1	Hubungan Kerja Formal	61
6.2.2	Hubungan Kerja tidak Formal;	68
6.2.3	Penataan Hubungan Kerja di Sektor industri dalam Menanggulangi Kecemburuan	76
BAB VII	MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN DAERAH	79
7.1	Pengembangan kota Bontang: Potret pemukiman migran di desa Loktuan dan Pemukiman 'elit' PKT	79

7.1.1	Pemukiman Padat dan Kumuh	80
7.1.2	Pemukiman 'Elit' di Kawasan PKT	86
7.1.3	Ketimpangan antara Permukiman Padat di Loktuan dan PKT	87
7.2	Transmigrasi dan Pembangunan Pertanian	89
7.2.1	Transmigrasi PIR : Kasus Desa Prangat Baru	91
7.2.2	Transmigrasi Umum Rantau Pulung	92
7.3	Dampak Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah	93
7.3.1	Permasalahan Tanah	93
7.3.2	Terdesaknya Penduduk Asli	95
7.3.3	Degradasi Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan	96
7.4	Mobilitas Penduduk dan Pembangunan: Tantangan Pelaksanaan Otonomi	99
BAB VIII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN		103
DAFTAR BACAAN		111

DAFTAR TABEL

4.1	Jumlah dan persentase migrasi masuk seumur hidup kalimantan timur Tahun 1971, 1980 1990 dan 1995	30
4.2	Realisasi Penempatan Transmigrasi di kalimantan timur dari pra Peliata sampai tahun 2000	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain merupakan fenomena yang alami yang terjadi seumur manusia. Migrasi penduduk ke Kalimantan Timur telah terjadi sejak zaman kolonial. Keadaan ini terjadi karena Kalimantan Timur merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam baik sumber daya hutan maupun tambang seperti minyak, batubara dan lainnya. Selain itu Kalimantan Timur juga merupakan daerah yang jumlah penduduknya relatif sedikit. Kebijakan pemerintah orde baru untuk mengexploiasi kekayaan di Kalimantan Timur sangat berpengaruh terhadap migrasi penduduk (Aswatini dkk 2000)

Sejalan dengan strategi pembangunan yang berorientasi ekspor, pada medio enam puluhan sampai akhir dasawarsa tujuh puluhan pemerintah pusat mengeluarkan kebijaksanaan yang merangsang ekspor kayu gelondong yang oleh orang Kalimantan Timur lebih dikenal dengan "banjir kap" atau "timber boom". Ekspor kayu gelondongan tersebut sebagai respon tingginya permintaan kayu tropis oleh negara Jepang, Korea dan Taiwan. Karena ekspor kayu oleh 82 HPH di Kalimantan Timur tidak memberi dampak nilai tambah, telah muncul SK 3 menteri yang melarang ekspor kayu gelondongan dan diikuti dengan industri perkayuan kayu lapis. Menjelang tahun 1980, ketika harga minyak bumi mencapai kenaikan pesat maka kegiatan pertambangan dan pengilangan minyak dan gas bumi mengalami peningkatan pesat yang lebih dikenal dengan "oil boom". Pada saat itu adalah awal terbentuknya kota Bontang dimana telah muncul industri raksasa yaitu LNG-Badak dan Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Pada awal dasawarsa sembilan puluhan mulai terjadi eksplorasi batu bara di Kutai Timur sehingga menumbuhkan kota Sangatta dan merangsang perkembangan Bontang Selatan yaitu sebagai pintu ekspor. Mulai saat itu arus migrasi masuk Kalimantan Timur, khususnya ke Bontang mengalami peningkatan pesat sejalan dengan peluang kesempatan kerja yang terbuka luas. Pertambahan penduduk di Bontang dan Sangatta tidak dapat dihentikan baik karena pertambahan alami maupun migrasi positif yang berlangsung terus.

Meningkatnya mobilitas penduduk di daerah pertumbuhan ekonomi terutama mobilitas pekerjaan perlu diantisipasi adanya potensi konflik. Proses mobilitas penduduk yang berlangsung terus di daerah tersebut telah menimbulkan berbagai implikasi positif yaitu menunjang pembangunan dan sebaliknya mempunyai implikasi negatif, antara lain eksplotasi lingkungan yang tidak terkontrol dan menimbulkan potensi konflik dengan industri. Pertanyaan yang dapat diangkat, bagaimana kita menyikapi atas implikasi adanya fenomena mobilitas penduduk terhadap pembangunan daerah. Analisis tentang situasi dalam konteks mobilitas penduduk di daerah khususnya Bontang dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman. Implikasi kebijaksanaan dalam penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran untuk dapat mengantisipasi munculnya permasalahan akibat mobilitas penduduk.

1. 2. Tujuan penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mobilitas penduduk dalam konteks pembangunan daerah. Secara khusus bertujuan

- Mengkaji kebijaksanaan pembangunan yang berpengaruh pada mobilitas penduduk.
- Mendeskripsikan situasi daerah dan dinamika mobilitas penduduk
- Mendiskusikan isu-isu sosial dan lingkungan dalam konteks mobilitas penduduk.

1.3 . Methodologi Penelitian

1.3.1. Alur berpikir

Hubungan antara mobilitas dan pembangunan daerah merupakan hubungan timbal balik yang sangat kompleks. Mobilitas penduduk dapat mempengaruhi percepatan pembangunan daerah, sebaliknya mobilitas penduduk juga terjadi karena pengaruh dari proses pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk datang dan mencari kehidupan yang lebih baik di wilayah pertumbuhan tersebut. Di sisi lain, mobilitas penduduk sebagai faktor pendorong perkembangan daerah antara lain direfleksikan dari indikasi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penerima.

Adanya kebijakan penetapan kawasan pertumbuhan atau kawasan andalan (seperti halnya di lokasi penelitian-Bontang) diharapkan dapat menjadi pemicu perkembangan daerah sekitarnya. Kebijakan ini pada intinya bertujuan untuk memberikan prioritas pembangunan di suatu wilayah tertentu yang terpilih, yaitu di daerah-daerah yang mempunyai sektor unggulan yang dapat cepat dikembangkan. Dengan demikian, kawasan andalan pada umumnya memiliki potensi ekonomi yang besar, sehingga wilayah ini menjadi konsentrasi penanaman modal. Salah satu konsekuensi dari kebijakan pengembangan kawasan andalan adalah terbukanya kesempatan kerja. Daerah dengan ciri seperti ini menjadi harapan bagi pendatang untuk mencari peluang kerja dan dapat meningkatkan kondisi sosial-ekonomi.

Pendatang yang masuk di kawasan andalan lebih selektif sifatnya. Dari sisi demografi, kedatangan migran mempengaruhi pola pemukiman dan persebaran penduduk, struktur demografis dan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Pelaku mobilitas melibatkan penduduk dari berbagai daerah dan pada umumnya berada pada usia kerja utama (*prime working age*), sehingga berimplikasi bukan hanya pada jumlah dan komposisi penduduk (umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan dan pekerjaan), tetapi juga terhadap pola permukiman penduduk (menurut daerah asal/etnis).

Dari aspek sosial, mobilitas penduduk seringkali memarginalkan penduduk setempat/lokal, antara lain terlihat dari ketertinggalan mereka dalam persaingan. Mobilitas penduduk juga mempertemukan berbagai kelompok daerah asal/etnis yang tentunya berbeda latar belakang sosial-ekonomi, kebiasaan dan agama. Variasi latar belakang sosial-ekonomi, baik diantara pendatang maupun penduduk lokal/non migran memberikan warna dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dalam melakukan hubungan kerja dan hubungan sosial. Keadaan ini, selanjutnya dapat mempengaruhi percepatan pembangunan daerah. Daerah dengan masyarakat yang 'harmonis' dan 'tertib' akan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang penuh diwarnai dengan konflik.

Mengacu pada alur berpikir tersebut, maka masalah-masalah sosial-kependudukan akibat mobilitas penduduk perlu mendapat prioritas untuk ditangani secara dini agar tidak menjadi 'bom waktu' yang akan berdampak negatif terhadap pembangunan kawasan andalan. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah pada tahun 2001 hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, untuk dapat mengembangkan kebijakan pembangunan yang dapat

mengakomodasi kebutuhan masyarakat luas yaitu pendatang dan penduduk asli, bahkan kelompok masyarakat industri.

1.3.2 Pemilihan lokasi

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di kota Bontang dan sekitarnya. Desa Loktuan yang terletak di kecamatan Bontang Utara telah diambil sebagai daerah lokasi survei Selain itu lokasi transmigrasi umum Rantau Pulung dan PIR-SUS Prangat Baru diambil sebagai daerah penelitian. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive dengan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Bontang merupakan salah satu kota di Kalimantan Timur yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dimana berdiri berbagai industri besar yang berpengaruh pada mobilitas penduduk. Hasil SUPAS 1995 menunjukkan bahwa migrasi masuk ke kabupaten Kutai terbesar setelah Balikpapan dan Samarinda. Adapun pemilihan desa Loktuan sebagai lokasi survei karena desa ini merupakan daerah padat penduduk yang sebagian besar penduduknya adalah pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu desa ini merupakan salah satu desa yang letaknya terdekat dengan kawasan Industri PKT yang mudah dijangkau. Sedangkan lokasi transmigrasi umum Rantau pulung dan transmigrasi PIR-SUS Prangat baru dipilih dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan daerah dengan pengembangan sektor pertanian baik tanaman pangan maupun perkebunan.

1.3.3 Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran umum daerah penelitian sedang pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang isu-isu yang terjadi di daerah setempat yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui berbagai cara antara lain observasi wawancara mendalam (in-depth interview) dan kajian bersama. Observasi dilakukan untuk melihat keadaan fisik maupun sosial masyarakat yang dapat dilihat dan dirasakan oleh peneliti. Keadaan fisik umumnya yang menyangkut lingkungan seperti keadaan perumahan, sanitasi dan kerusakan lingkungan hutan. Keadaan sosial masyarakat antara lain meliputi interaksi antara satu suku dengan suku lainnya, bahasa yang digunakan, spesialisasi

pekerjaan dan hubungan kerja serta hubungan antara strata sosial dalam masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci yaitu orang yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti antara lain kepala desa, tokoh masyarakat dari berbagai etnis antara lain Jawa, Bugis dan Banjar. Wawancara yang berkaitan dengan kebijaksanaan dilakukan kepada ketua Bappeda baik daerah tingkat satu Kalimantan Timur maupun daerah Tingkat II kota Bontang dan Sangatta. Kanwil Depnaker, Kanwil pertanian dan juga kepada humas PKT. Wawancara mendalam juga dilakukan kepada masyarakat lain seperti calon anggota DPRD, tokoh pendidikan, LKMD, Karang Taruna, Pedagang, pengusaha, nelayan dan petani. Kajian bersama yang melibatkan stake holder juga dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menggali isu-isu yang belum tercakup dalam penelitian. Sedangkan pada lokasi transmigrasi baik Umum maupun PIR-SUS hanya dilakukan kajian secara cepat. Diskusi dengan masyarakat maupun aparat pemerintah desa dilakukan di desa transmigrasi PIR-SUS sedangkan in-depth interview dengan beberapa transmigran dan penyuluh pertanian dilakukan di lokasi transmigrasi umum.

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui Survei kepada 250 kepala keluarga di desa Loktuan untuk memperoleh gambaran umum penduduk setempat. Adapun pertanyaan dalam kuesioner survei hanya merupakan pertanyaan dasar seperti pekerjaan, pendidikan, mobilitas dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Selain itu data kuantitatif yang diperoleh dari survei, data kuantitatif lain dikumpulkan seperti dari BPS dan dari data penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

1.3.4 Analisa data

Untuk mengases tentang kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan mobilitas penduduk dan pembangunan daerah dilakukan dengan studi kepustakaan (desk review). Sedangkan analisa data survei dilakukan dengan program SPSS dengan tabel frekuensi maupun silang. Data kualitatif diolah dan digunakan untuk menerangkan fenomena yang terjadi di daerah penelitian.

BAB II

TINJAUAN MENGENAI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN MOBILITAS PENDUDUK DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Kebijakan transmigrasi, Pembangunan di KTI dan Penanaman Modal Asing

Di Indonesia, berbagai kebijakan telah lama dibuat oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi mobilitas penduduk. Adanya kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik telah menimbulkan kecenderungan terjadinya mobilitas penduduk pada daerah-daerah tertentu. Terjadinya mobilitas penduduk tersebut terutama disebabkan karena berbagai pusat kegiatan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu saja, sehingga merupakan faktor penarik bagi penduduk daerah lain untuk menuju ke daerah tersebut. Demikian pula dengan adanya kebijakan *urban bias* juga telah mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Salah satu dampak dari kebijakan tersebut adalah terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran.

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi mobilitas penduduk ke Kalimantan timur antara lain adalah kebijakan transmigrasi, pembangunan di KTI maupun kebijakan penanaman modal asing. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai masing-masing kebijakan tersebut yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap mobilitas penduduk.

2.1.1. Program Transmigrasi

Secara umum penyelenggaraan transmigrasi pada dasarnya berbeda-beda visi dan misinya dari waktu ke waktu. Pada saat pertama kali program transmigrasi dilakukan pada 1905 tujuannya adalah mengurangi kepadatan dan kelebihan penduduk di Pulau Jawa. Pada saat itu program tersebut dikenal dengan program *Kolonisasi* di mana pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijakan untuk memindahkan sekitar 155 KK penduduk pulau Jawa ke Gedong Tataan di Lampung. Tidak lama kemudian, pemerintah Belanda juga

memindahkan sebagian penduduk pulau Jawa ke daerah Barabai, Kalimantan Selatan (Sjamsu, 1966).

Setelah Indonesia merdeka program kolonisasi yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda tetap dilanjutkan hanya saja terminologinya diganti dengan *Transmigrasi*. Sejalan dengan perubahan nama program tersebut visi dan misinya juga mengalami perubahan. Penyelenggaraan transmigrasi lebih berorientasi kepada pengerahan tenaga kerja bagi pengembangan perkebunan. Daerah sasaran transmigrasi diperluas sampai ke pulau Bali, Lombok dan pulau-pulau lainnya yang sumberdaya alamnya sangat terbatas dan rawan gempa bumi, seperti Flores dan Timor.

Setelah Indonesia merdeka ternyata banyak mengalami perubahan orientasi, terutama dalam tujuannya. Dalam masa pra pelita terlihat bahwa tujuan transmigrasi telah berubah dari sebelumnya yaitu untuk membangun perekonomian secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mengingat di luar pulau Jawa dan Bali tidak memiliki jumlah penduduk yang memadai sebagai sarana pembangunan. Jadi, selama tahun 1950-an hingga 60-an aspek demografis dan pembangunan ekonomi merupakan sasaran utama dari program transmigrasi.

Setelah dimulainya tahap Pelita pada tahun 1969 kembali program transmigrasi mengalami reorientasi tujuannya. Program transmigrasi yang akan dijalankan harus dikaitkan dengan segala aspek pembangunan daerah. Pada saat itu terlihat tujuan transmigrasi sudah mengalami pergeseran dari orientasi demografis sentris ke orientasi pembangunan, walaupun pola pikir demografis sentris ternyata belum bisa dihilangkan. Hal ini mengingat sistem target dalam pengiriman transmigran masih dijalankan pemerintah.

Seperti telah diterangkan bahwa program kolonisasi (transmigrasi) pada mulanya diarahkan ke Kawasan Indonesia Barat (KBI), seperti pulau Sumatera. Sesuai dengan perkembangannya program transmigrasi telah mencapai hampir seluruh pelosok tanah air, termasuk Propinsi Kalimantan Timur yang telah menerima transmigran dari pulau Jawa dan Bali.

Pada mulanya mereka berpindah ke Propinsi Kalimantan Timur mengikuti program kolonisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda, namun setelah sukses di daerah tujuan kemudian mereka membawa seluruh sanak keluarga yang masih tertinggal di daerah asal. Di samping itu, banyak pula penduduk yang pindah ke Kalimantan Timur secara spontan (swakarsa). Sementara

untuk daerah Kalimantan Barat, transmigrasi swakarsa lebih dominan sejak sekitar 80 tahun yang lalu (Alqadrie, 2000: 8).

Studi yang dilakukan PPT-LIPI (1987) menunjukkan bahwa banyak penduduk pulau Jawa dipindahkan ke daerah Kalimantan Selatan, untuk dipekerjakan di perkebunan karet. Bahkan ada pula diantara mereka yang sengaja diculik oleh agen-agen pemerintah Belanda untuk diberangkatkan sebagai transmigran. Keturunan mereka sampai saat ini masih dijumpai pada salah satu daerah Muara Uya Kabupaten Tabalong.

Program transmigrasi yang telah dijalankan oleh pemerintah dalam beberapa dasawarsa belakangan ini ternyata telah menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Transmigrasi yang berasal dari pulau Jawa dan Bali dianggap oleh sebagian penduduk daerah tujuan sebagai pionir pembangunan. Namun demikian penelitian yang dilakukan oleh Hidayati di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (1995) menunjukkan bahwa transmigran yang sebenarnya diharapkan untuk dapat langsung maupun tidak langsung memberikan contoh cara bercocok tanam yang baik melalui persawahannya, ternyata di daerah tujuan mereka justru beradaptasi dengan cara bercocok tanam penduduk lokal. Hal ini cenderung dilakukan karena kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam secara bersawah. Ada pula sementara transmigran yang mengikuti cara bercocok tanam dengan ladang berpindah (*shifting cultivation*) namun mereka tidak mengikuti apa yang biasanya dilakukan oleh penduduk lokal, yakni menanam kembali sebelum mereka berpindah lokasi.

Kisah sukses dari para transmigran sering sekali diiringi berbagai dampak negatif terutama yang berkaitan dengan proses asimilasi dan adaptasi yang kadang-kadang berjalan secara tidak alami. Adanya berbagai proteksi dan kemudahan yang diterima oleh para transmigran telah menimbulkan kecemburuan dari penduduk setempat. Kecemburuan tersebut kadang-kadang telah menimbulkan konflik sosial antara transmigran dan penduduk setempat yang cenderung bernuansa SARA. Konflik tersebut kiranya akan berdampak negatif terhadap program pembangunan itu sendiri.

2.1.2. Kebijakan Pembangunan di KTI

Pengembangan KTI masih mengacu kepada pendekatan nasional yang pada dasarnya menekankan pada tiga hal, yaitu, pendekatan *sektor*, *top-down*, dan *economic growth*. Dengan

demikian semua kebijakan yang dikeluarkan mengadopsi kebijakan pembangunan nasional yang diimplementasikan di KTI, seperti kebijakan sektoral, kebijakan KAPET dan BIMP-EAGA. Kebijakan sektoral sangat tergantung pada prioritas dan interest sektor yang bersangkutan, misalnya sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, industri, transmigrasi, transportasi dan lainnya. Selama masa Orde Baru, kebijakan-kebijakan sektor yang akan datang dari pusat dan diadopsi di KTI. Pemerintah daerah, terutama melalui sektor masing-masing, biasanya membuat kebijakan-kebijakan daerah untuk mengimplementasikan kebijakan dari tingkat nasional tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengembangan sektor dapat menggunakan dana pemerintah dan/atau modal asing, terutama yang berasal dari luar negeri.

Mengingat potensi Sumber Daya Alam (SDA) KTI yang sangat besar, maka kebijakan pembangunan berkonsentrasi pada pembangunan yang didasarkan pada pengelolaan SDA. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dikelompokkan kedalam 4 group, yaitu kebijakan pembangunan sektor, kebijakan penanaman modal asing (PMA), kebijakan pengembangan KAPET dan kebijakan kerjasama regional seperti BIMP-EAGA dan AIDA.

2.1.3 . Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA)

Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) di KTI bertujuan untuk mendorong PMA untuk masuk dan melakukan kegiatan di KTI agar dapat mempercepat laju pembangunan di kawasan ini, dengan demikian diharapkan tercapai pemerataan pembangunan dengan KBI. Kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.20 tahun 1995 yang mengatur investasi dan deregulasi PMA, khususnya di KTI. Dalam PP ini PMA dikategorikan sebagai investasi swasta, bukan dari investasi pemerintah dan layanan masyarakat.

Undang-undang PMA pertama kali ditetapkan pada akhir tahun 1960-an (1967) ketika pemerintah Indonesia mulai mengizinkan modal asing dan swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan berbagai regulasi yang mengatur penanaman modal asing, khususnya dibidang fiskal, misalnya dengan memberikan insentif dan kemudahan-kemudahan berupa bebas pajak selama 6 tahun bagi PMA yang baru menginvestasikan modalnya di Indonesia, pembebasan bea masuk atas peralatan dan bahan baku yang diimpor. Sejak dikeluarkannya kebijakan PMA ini, banyak sekali modal asing yang masuk Indonesia. Sampai dengan tahun 1995

tercatat 3.881 proyek dengan total investasi sebesar US\$ 139.883,6 juta. Kebanyakan modal asing tersebut berasal dari kawasan Asia (54,6%), diikuti oleh Eropa (28,3%), Amerika Serikat (12,3%) dan sisanya dari negara-negara lain (Tyas dkk, 1998:2).

Untuk mendukung pelaksanaan UU PMA, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan lain yang memicu peningkatan modal asing di Indonesia. Pada tahun 1986, pemerintah menetapkan paket deregulasi yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan iklim usaha bagi PMA dan meningkatkan daya saing ekspor, terutama ekspor hasil industri. Paket deregulasi juga dikeluarkan pada tahun 1994 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.20/1994 tentang pemberian kelonggaran persyaratan pemilikan modal 100 persen bagi PMA dan masa pengalihan saham dari investor asing kepada pengusaha nasional. Artinya, para investor asing dapat memiliki perusahaan di Indonesia dalam periode tertentu.

Disamping peraturan-peraturan yang mendukung peningkatan PMA, pemerintah juga membuat kerjasama-kerjasama regional, misalnya Sijori pada tahun 1990 dan IMT-GT tahun 1994. Pada tahun 1995 adapula kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan negara lain, seperti Brunei Darussalam, Malaysia dan Philipina yang disebut dengan program pembangunan di Kawasan Pertumbuhan BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia dan Philipina-East Asean Growth Areas). Kerjasama-kerjasama tersebut merupakan strategi pemerintah dalam melakukan pendekatan untuk mendorong perusahaan asing menanamkan modalnya di Indonesia. Di KTI, misalnya, pemerintah menjalin kerja sama Manado/Bitung dengan Davao (kawasan Philipina selatan) dan kerjasama antara Pontianak dan daerah sekitar perbatasan Serawak dan Kuching, Malaysia (Tyas, 1998:2-3).

Menurut Salamm (1998:65) ada lima faktor yang memacu peningkatan investasi swasta, yaitu (1) globalisasi dan keterbukaan ekonomi, (2) kerjasama antar kawasan terutama yang berdekatan dengan negara tetangga, (3) kebijakan tata ruang nasional yang mulai mengarahkan pembangunan ke KTI karena terbatasnya lahan di Pulau Jawa, (4) proses restrukturisasi industri negara-negara maju yang menyebabkan adanya relokasi industri dan (5) pemberian berbagai kemudahan seperti insentif perpajakan untuk investasi di kawasan terbelakang. Untuk memacu dan mengejar ketertinggalan pembangunan di KTI, pemerintah mengupayakan iklim yang kondusif dengan memberikan berbagai rangsangan pada swasta untuk menginvestasikan modal mereka di kawasan ini.

Kebijakan PMA di KTI ini telah mendapat respon dari pemerintah daerah, tetapi kebijakan tersebut belum dirumuskan secara utuh, menyeluruh dalam periode jangka panjang. Kebijakan PMA baru diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menarik sektor swasta dalam pengembangan daerah. Akibatnya, kebijakan PMA diterjemahkan sebagai keputusan gubernur yang berkaitan dengan investasi dimana keputusan-keputusan tersebut merupakan turunan dari keputusan tingkat pusat.

Walaupun usaha untuk meningkatkan PMA sudah dilakukan, tetapi penyebarannya belum merata, masih terkonsentrasi di KBI. Akibatnya, kebijakan modal asing di KTI proporsinya masih sangat kecil, hanya 7,6 persen dari keseluruhan modal asing di Indonesia. Pulau Jawa merupakan pusat yang sangat menarik bagi pemodal asing untuk berinvestasi, terutama dikarenakan adanya berbagai kemudahan seperti ketersediaan tenaga kerja dengan upah yang rendah, terjaminnya keamanan di pulau tersebut, kemudahan transportasi dan komunikasi. Sementara, kemudahan-kemudahan ini kurang tersedia di KTI.

Dalam implementasinya kebijakan-kebijakan daerah mengacu pada kebijakan pusat, sedangkan daerah lebih berkonsentrasi pada kebijakan yang bersifat administratif, alokatif dan koordinatif. Keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat tanpa melibatkan daerah dalam proses penentuannya, walaupun daerah mempunyai data empiris dari potensi dan keadaan wilayahnya. Daerah bertanggung jawab pada registrasi pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui oleh pusat. Kebijakan daerah lebih terfokus pada koordinasi kebijakan sektoral yang menekankan pada pemanfaatan kekayaan SDA, seperti hutan (untuk kegiatan *logging* dan industri perikanan), perkebunan, pertanian, pertambangan dan transmigrasi. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan pemerintah daerah, khususnya gubernur, sering dibatasi oleh kewenangan sektor dari pusat.

Kebijakan investasi di daerah seharusnya dapat memberikan arah perkembangan pembangunan daerah, karena kebijakan investasi seirama dengan kegiatan ekonomi. Secara umum kebijakan PMA di KTI, kecuali Kalimantan Timur, menekankan pada sektor agro-industry karena itu program-program pembangunan daerah dapat dikaitkan dengan pengembangan investasi.

Di propinsi Kalimantan Timur kepentingan pusat cenderung sangat dominan, sehingga sering tidak memperhatikan kepentingan

daerah dan menyamaratakan program nasional dengan kegiatan daerah. Kebijakan investasi di Kalimantan Timur menekankan pada sektor pertambangan seperti minyak bumi, batu bara dan sektor kehutanan terutama industri kayu. Kebijakan-kebijakan ini sangat berpengaruh dalam perencanaan pembangunan Kalimantan Timur. Akibatnya, kebijakan daerah yang menekankan pada perluasan perkebunan mendapat prioritas kedua, karena lebih mengindahkan kebijakan-kebijakan yang datang dari pusat tersebut.

2.2. Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Asing di Kalimantan Timur

Pemerintah daerah propinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai respon kebijakan PMA dari tingkat pusat. Pemerintah Tingkat I Kalimantan Timur menetapkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 9 persen, untuk itu pemerintah daerah memerlukan investasi sebesar Rp 25,94 trilyun dengan kontribusi terbesar dari investasi Swasta (PMA) sebanyak Rp 21,05 trilyun (81,15 persen) dan sisanya Rp 4,89 trilyun (18,85 persen) dari investasi pemerintah (Tyas dan Afadlal, 1998:40).

Tyas dan Afadlal (1998;36) mengidentifikasi 7 kebijakan daerah Kalimantan Timur yang berkaitan dengan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah yang sifatnya desentralisasi dan dekonsentrasi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya kemampuan aparatur pemerintah daerah
2. Mengembangkan sektor unggulan seperti sektor industri, pertanian, kehutanan, pariwisata, pertambangan dan energi
3. Mengembangkan dunia usaha dengan melakukan pembinaan kepada koperasi, BUMN dan swasta
4. Mengembangkan sumber daya manusia
5. Mengurangi tingkat kesenjangan dengan pemeratakan kegiatan ekonomi, pembangunan ke berbagai daerah
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur
7. Mengembangkan kawasan andalan yang diprioritaskan bagi propinsi ini

Sejak diberlakukannya UU No.1, 1967, investasi di propinsi Kalimantan Timur berkembang cukup pesat dan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan daerah di propinsi ini. Sampai tahun 1996 terdapat 51 perusahaan dengan nilai investasi sebesar USD 5.939,1 juta dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 72.061 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 751 orang. Perusahaan PMA (swasta) terutama berusaha di sektor kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri (makanan, kayu, kertas, kimia seperti amoniak cair dan oksigen cair/gas, bahan logam), konstruksi, perumahan, pengangkutan dan jasa.

2.3. Kebijakan Sektor Dalam Pengembangan Sumber Daya Alam

Investasi asing berkonsentrasi di sektor pertambangan, terutama minyak bumi, petro kimia, batu bara, metanol dan gas alam. Pengusaha-pengusaha asing mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya di propinsi Kalimantan Timur, seperti kemudahan transportasi, pembangunan jalan poros selatan dari Samarinda ke Long Bawan melalui Bontang-Sangatta-Muara Wahau-Tanjung Redeb-Tanjung Selor dan Malinau.

PMA juga sangat berperan dalam pengembangan sektor kehutanan terutama logging dan industri pengolahan kayu juga mendapat prioritas penting di Kalimantan Timur. Dalam dasawarsa 1970an, eksploitasi hutan secara besar-besaran untuk kegiatan *logging*, yang menimbulkan banjir 'kap'. Pada pertengahan tahun 1980an, peran PMA mulai diambil alih oleh PMDN, dikarenakan adanya perubahan kebijakan sebagai respon dari berbagai kritik tajam dampak negatif eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan terhadap kelestarian sumber daya tersebut. Pada tahun 1984/85 pemerintah melarang ekspor kayu glondongan dan mulai mengalihkan kebijakan pada kayu olahan terutama kayu lapis yang pelaksanaannya lebih ditekankan pada PMDN.

Di sektor perikanan, PMA umumnya mengusahakan ekspor udang beku. Kegiatan ini terutama dilakukan oleh perusahaan Jepang dengan cara mengumpulkan hasil budidaya udang masyarakat dan mengekspornya dalam keadaan beku ke Jepang. Petani udang mensuplai produksi udang mereka dengan standar yang telah ditentukan, seperti ukuran berat, kualitas udang dan patokan harga tertentu. Sementara itu, pengusaha-pengusaha pribumi Kalimantan Timur cenderung memilih kegiatan usaha di bidang konstruksi,

mungkin dikarenakan belum terlatihnya mereka dalam mencari peluang.

Untuk menarik investor, pemerintah daerah mengupayakan berbagai kerjasama, termasuk kerjasama internasional, seperti kerjasama bilateral dan pengembangan investasi asing. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Penandatanganan persetujuan pembangunan ekonomi dan koperasi antara pemerintah daerah Kalimantan Timur dengan Northern Territory Australia
2. Kerjasama pemerintah daerah Kalimantan Timur dengan Singapore Trade Development Board dan Singapore Manufacturing Association
3. Kerjasama melalui BIMP-EAGA (Brunai Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines-East ASEAN Growth Area). Untuk itu telah ditetapkan bahwa Balikpapan sebagai pelabuhan internasional.

2.4. Kebijakan Kerjasama Regional BIMP-EAGA

BIMP-EAGA pada dasarnya adalah konsep pengembangan ekonomi lintas negara dalam sub-regional Asia Tenggara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kerjasama tersebut diharapkan dapat merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah yang berbatasan langsung dengan ketiga negara tetangga yang tergabung dalam kerjasama BIMP-EAGA. Untuk mencapai tujuan tersebut kiranya perlu dipikirkan untuk mengkaitkan keunggulan komparatif dengan menggabungkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi.

Bagi Indonesia pengembangan 13 propinsi di Kawasan Timur Indonesia dalam BIMP-EAGA dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan regional, terutama pendapatan regional, terutama dengan Kawasan Barat Indonesia. Diharapkan pertumbuhan propinsi-propinsi di BIMP-EAGA tersebut dapat meratakan atau paling tidak menyeimbangkan pembangunan ekonomi. Untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi telah diambil kebijakan dengan mengembangkan pusat-pusat industri yang berorientasi ekspor sejalan dengan era globalisasi.

Peningkatan produk ekspor diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan. Untuk mencapai tujuan tersebut propinsi-propinsi dalam BIMP-EAGA telah mengambil kebijakan untuk

menarik investor dari luar negeri untuk mengembangkan industri di kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Untuk mempercepat proses pertumbuhan di daerah tersebut, pemerintah telah mengambil kebijakan dengan memberikan berbagai kemudahan yang berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja dan proses masuknya investasi.

Sebagai tindak lanjut kebijakan kerjasama BIMP-EAGA, pemerintah daerah membentuk Tim Koordinasi Tingkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur dengan tiga tugas utama, yaitu menyiapkan rumusan kebijakan pengembangan kerjasama BIMP-EAGA, memberikan saran terhadap tim koordinasi wilayah dan melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada tim koordinasi wilayah. Tim ini belum bekerja secara optimal, mungkin berkaitan dengan kurang jelasnya wewenang tim daerah yang diberikan oleh tingkat pusat.

Dalam kerjasama BIMP-EAGA, Kalimantan Timur masih mengandalkan pengelolaan kekayaan alam propinsi tersebut dan kedekatannya dengan negara tetangga Malaysia sebagai modal utama. Kedekatan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah (Malaysia), terutama di 9 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memberikan keuntungan, khususnya berupa peluang investasi, antara lain:

- Peningkatan kerjasama tenaga kerja yang sudah berjalan, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja ilegal
- Pemanfaatan modal pengusaha-pengusaha Serawak dan Sabah untuk menanamkan modal mereka di sektor perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kayu
- Kerjasama di sektor pariwisata, termasuk program promosi dan paket wisata bersama-sama dengan pengusaha-pengusaha wisata dari Malaysia.

2.5. Kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Saat ini terdapat 13 Kawasan andalan yang terletak di 13 propinsi Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai penggerak utama pembangunan di KTI yang disebut dengan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET). Dari ketiga belas KAPET tersebut sampai saat ini baru 6 buah KAPET yang telah dibuat Keppresnya yaitu Kapet Sanggau-Kalimantan Barat, Kapet Sasamba-Kalimantan Timur, Kapet

Batulicin-Kalsel, Kapet Mbay-NTT, Kapet Manado-Bitung-Sulawesi Utara dan kapet Biak, Irian Jaya. Adapun program yang sedang dijalankan di 6 daerah KAPET tersebut adalah program pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) terutama dimaksudkan untuk mempersiapkan SDM di daerah Kapet, agar dapat secara aktif berperan dalam setiap aktivitas pembangunan. Kapet tersebut diharapkan dapat memacu pembangunan di wilayah sekitarnya pada tiap-tiap propinsi, namun sampai saat ini program pembangunan yang direncanakan di wilayah Kapet ternyata belum semuanya terealisasi. Kalimantan Timur merupakan salah satu dari ketigabelas wilayah Kapet yang sudah diresmikan pengelolaannya dengan keluarnya Kepres No. 89, tahun 1996 (Salamm, 1998).

Secara umum visi pengembangan masing-masing Kapet adalah menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Seperti diketahui daerah Kapet di propinsi Kalimantan Timur diberi nama Kapet Sasamba yang meliputi daerah Kotamadya Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Loa Janan, Samboja dan Kotamadya Balikpapan. Adapun visi pembangunan dan pengembangan Kapet Sasamba adalah menjadikan Kapet Sasamba sebagai andalan penggerak pengembangan ekonomi wilayah sekitarnya dan wilayah bagian timur Kalimantan serta Selat Makasar dalam menghadapi pasar bebas ASEAN.

Pembangunan yang dilakukan pada tiap-tiap wilayah Kapet tentunya mempunyai misi yang merupakan perwujudan dari visi yang telah ditetapkan. Adapun misi pengembangan Kapet Sasamba adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pusat industri dan perdagangan seperti kawasan industri Kariangan.
2. Mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan kelapa sawit.
3. Mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah batu bara sebagai bahan baku industri kimia.
4. Mengembangkan wisata alam.
5. Memperkuat keterkaitan ekonomi ke depan dan kebelakang.
6. Mengembangkan hutan tanaman industri yang bersinergi dengan program transmigrasi dan memperdayakan masyarakat sekitar hutan.

7. Meningkatkan pengembangan komoditas minyak dan gas bumi.

Kebijakan dan strategi pembangunan di kawasan Kapet Sasamba bertujuan untuk memperkuat keterkaitan dan dukungan antar sektor. Dengan demikian koordinasi antar sektor dalam menjalankan program pembangunan dapat ditingkatkan dan diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, setiap sektor juga perlu didorong agar dapat meningkatkan produktivitas masing-masing, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sektor-sektor yang dikembangkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan program Kapet Sasamba adalah industri, pertanian, pengairan, perdagangan, transportasi, pertambangan, kehutanan, pariwisata, telekomunikasi, transmigrasi dan energi.

Untuk mencapai kebijakan yang telah digariskan, maka strategi kebijakan Kapet Sasamba dibagi dalam tiga bagian yaitu, kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang. Kebijakan jangka pendek yaitu meliputi upaya peningkatan kualitas SDM, baik melalui pendekatan formal maupun informal. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengubah pola pikir dari statis tradisional menjadi lebih dinamis dan terbuka agar siap menerima segala bentuk perubahan. Selain itu, upaya pengembangan SDM disesuaikan dengan potensi dan rencana pengembangan sumberdaya alam setempat.

Kebijakan jangka menengah dilakukan dengan membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan secara kuantitas maupun kualitas yang langsung dapat mendukung pengembangan komoditas unggulan di Kapet Sasamba. Mendorong SDM setempat agar menjadi pengusaha-pengusaha mandiri, baik skill maupun pengetahuannya. Mendorong investor, baik di dalam maupun luar negeri dengan memberikan informasi seluas-luasnya, terutama yang berkaitan dengan peluang-peluang usaha yang terdapat di Kapet Sasamba.

Adapun kebijakan jangka panjang dari Kapet Sasamba adalah membina dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk memungkinkan SDM setempat berpartisipasi aktif dalam pengembangan komoditas unggulan di daerah yang bersangkutan. Menumbuhkembangkan adat dan budaya setempat yang secara positif dapat mendukung peningkatan etos kerja serta menekan berkembangnya adat-istiadat dan budaya yang menghambat produktivitas kerja.

Dalam kaitan untuk menarik investasi ada berbagai kebijakan Kapet Sasamba dibidang kelembagaan, sehingga mempermudah para

investor menanamkan modalnya di daerah tersebut. Kebijakan dibidang kelembagaan tersebut antara lain :

1. Menciptakan iklim investasi yang menarik
2. Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung.
3. Pengembangan sistem data dan informasi yang terpadu.
4. Pembukaan pangsa pasar dan promosi.

Ada beberapa program pembangunan yang diarahkan ke Kawasan Timur Indonesia, seperti program transmigrasi, program pembangunan KTI, program KAPET dan program kerja lintas negara BIMP-EAGA. Dari berbagai program pembangunan tersebut ternyata hanya program transmigrasi saja yang baru berjalan dan menunjukkan dampaknya secara nyata, baik pada pembangunan maupun mobilitas penduduk. Program transmigrasi telah lama dilaksanakan di propinsi Kalimantan Timur dan nampaknya harus melalui proses yang panjang untuk memperlihatkan hasilnya. Hal ini mengingat bahwa program transmigrasi berkaitan dengan dimensi pembangunan manusia yang kadang-kadang sifatnya abstrak sekali, apalagi jika dikaitkan dengan pembangunan wilayah.

Sebaliknya program-program pembangunan lainnya yang ada di Kawasan Timur Indonesia, seperti program Kapet dan BIMP-EAGA sampai saat ini belum berjalan seperti yang diharapkan meskipun pengelolaannya sudah diresmikan melalui Keppres no 89 tahun 1996. Salah satu daerah Kapet yang sudah ada Keppresnya adaah Kapet Sasamba, di propinsi Kalimantan Timur. Program pembangunan yang baru dapat direalisasikan di daerah Kapet tersebut adalah penyediaan tata ruang (lahan). Walaupun di daerah Kapet tersebut telah dibangun berbagai pusat-pusat industri, namun hal itu tidak ada kaitannya dengan program Kapet. Pusat-pusat industri tersebut telah dibangun sebelum adanya program Kapet, seperti pabrik kayu lapis yang ada di Kotamadya Samarinda dan industri pengolahan minyak di Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur telah dibangun jauh sebelum program Kapet dicanangkan. Pusat-pusat industri tersebut nampaknya telah mampu mempengaruhi mobilitas penduduk terbukti dari banyaknya tenaga kerja migran di daerah tersebut yang berasal dari Jawa maupun Sulawesi terutama Sulawesi Selatan.

Demikian pula dengan program kerjasama lintas negara BIMP-EAGA yang ada di propinsi Kalimantan Timur ternyata juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya dengan adanya program kerjasama tersebut paling tidak dapat meningkatkan

perdagangan antar negara yang tergabung dalam BIMP-EAGA. Fenomena yang terjadi saat ini bahwa segala bentuk kegiatan perdagangan tersebut telah berlangsung bukan karena kehadiran BIMP-EAGA. Program BIMP-EAGA tersebut dikatakan akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja antara negara ternyata sebelum ada program tersebut telah berjalan secara alami. Hal ini terlihat dari mobilitas penduduk yang berasal dari pulau Sebat, Nunukan dan Bunyu, Kalimantan Timur telah melakukan mobilitas lintas negara secara alami menuju Tawau, negara bagian Sabah Malaysia.

BAB III

SETING DAERAH

Tujuan dari penulisan tentang seting daerah adalah untuk memberi gambaran yang melatarbelakangi mobilitas penduduk dan pembangunan daerah di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Pembangunan Terpadu (Bontang, Sangatta, Muara Badak). Dengan adanya gambaran luas tentang mobilitas penduduk dan pembangunan daerah maka kajian yang menyangkut hubungan sosial dan hubungan kerja dapat diletakkan dalam suatu konteks yang lebih menyatu.

Mengingat luasnya aspek latarbelakang daerah maka uraian pada bagian ini dibatasi tentang aspek-aspek geografis, sarana dan prasarana, potensi daerah dan pemanfaatannya, sosial-demografis dan sosial ekonomis. Tiap aspek yang akan dibahas akan dilihat kaitannya dengan persoalan mobilitas penduduk dan pembangunan daerah.

3.1 Aspek Geografis

Propinsi Kalimantan Timur mempunyai letak yang sangat strategis yaitu berada pada posisi tengah dalam jajaran propinsi-propinsi di Indonesia, berbatasan langsung dengan Malaysia Timur (Serawak dan Sabah) dan berada pada jalur laut Sulawesi. Propinsi ini terluas dibandingkan dengan tiga propinsi lain di Kalimantan dan terluas kedua propinsi di Indonesia, setelah Irian Jaya.

Sungai-sungai di Kalimantan Timur semuanya bermuara ke laut Sulawesi. Karena perkembangan permukiman sangat dipengaruhi oleh transportasi air maka tidak mengherankan manakala kota-kota di Kalimantan Timur tumbuh pesat pada jalur pantai dan sungai. Sejalan dengan proses pertumbuhan permukiman tersebut maka mobilitas penduduk yang tinggi juga terjadi pada jalur pantai dan sungai. Oleh karena kota-kota pantai seperti Bontang dan Sangatta akan menjadi pusat pertumbuhan (growth poles).

Topografi daerah jalur pantai di daerah Bontang, Sangatta dan Muara Badak sebagian besar berbukit-bukit dan sebagian kecil adalah dataran pantai (alluvial plain) yaitu hasil pengendapan, misalnya daerah kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Sangatta. Sungai

Santan yang mengalir di Bontang Selatan dan Sungai Sangatta telah membawa lumpur dari daerah perbukitan dan terjadi proses pengendapan sehingga terbentuk dataran pantai yang relatif masih sempit. Daerah tersebut saat ini telah berkembang pesat permukiman penduduk. Daerah Bontang Selatan tepatnya di wilayah Sekaming direncanakan menjadi daerah perluasan kota Bontang. Perluasan Bontang Utara telah mengalami kendala ketersediaan lahan, antara lain: berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kutai dan Hutan Lindung Bontang. Daerah penelitian di Loktuan (Bontang Utara) lokasinya terjepit dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur sehingga terjadi proses pemadatan penduduk yang mengarah permukiman kumuh. Adapun untuk Kecamatan Sangatta perluasan kota akan mengarah ke Pelabuhan Maloy. Daerah tersebut akan dipersiapkan sebagai kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan sekaligus permukiman berbasis "community development".

Sumber daya alam wilayah pembangunan terpadu tersebut di atas sangat potensial. Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui terutama minyak, gas bumi dan batubara. Dengan adanya sumberdaya alam tersebut di daerah tersebut telah berkembang industri pertambangan minyak oleh Pertamina, gas alam oleh PT. Badak, Batubara Oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT. Indo Minco. Dengan adanya sumberdaya gas alam tersebut telah diikuti tumbuhnya industri pupuk urea dan amoniak milik PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Dalam tahun 1999 produksi urea dan amoniak masing-masing mencapai 1.907.551 ton dan 1.407.773 ton. Kegiatan industri gas alam, pupuk, amoniak dan pengapalan batubara dari Indo Minco berada di kota Bontang. Kota Bontang dapat terjadi karena adanya industri tersebut.

Demikian pula kota Kecamatan Sangatta dapat tumbuh pesat karena keberadaan perusahaan batubara KPC. Kota tersebut sejak Oktober 1999 telah menjadi Ibukota Kabupaten Kutai Timur. Dengan direncanakannya Kabupaten Kutai Timur menjadi pusat agrobisnis dan agro industri sebagai lokomotif penggerak pembangunan maka dapat diantisipasi bahwa kota Sangatta akan tumbuh lebih pesat lagi.

Potensi sumberdaya alam yang dapat diperbarui berupa flora dan fauna untuk daerah kabupaten Sangatta, Kecamatan Rawa Badak dan Kota Bontang terutama adalah hutan dan biota laut. Hutan di daerah tersebut baik kuantitas maupun kualitasnya makin merosot sebagai akibat penebangan oleh banyak perusahaan HPH dan perambahan hutan oleh penduduk lokal yang makin meningkat. Pada saat ini di Kabupaten Kutai Timur tercatat ada 13 HPH yang

menguasai 1.164.000 hektar. Keberadaan HPH sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian daerah, namun telah mengancam kehidupan penduduk pedalaman yang kehidupan sehari-hari tergantung dari hasil hutan. Masyarakat juga dilarang mengolah sumberdaya hutan di lahan yang dikuasai HPH. Hal ini berarti bahwa HPH telah memotong habitat masyarakat pedalaman. Taman Nasional Kutai yang letaknya diantara kota Bontang dengan kota Sangatta dengan luas 198,6 ribu hektar, pada saat ini tinggal 61 ribu hektar hutan alam yang masih baik (Kompas, 1 September 2000). Kerusakan hutan di Taman Nasional Kutai tersebut sungguh sangat memprihatinkan. Penduduk lokal dengan sengaja telah bermukim di wilayah areal hutan, terutama disepanjang jalan Bontang – Sangatta tepatnya di Telukpandan, Temputuk, Telukkoba, Kandolo, Sangkimah, Masabang. Bahkan sebagian wilayah di Kecamatan Bontang Utara adalah di areal hutan alami Taman Nasional Kutai, misalnya desa Guntung. Setiap hari puluhan kubik kayu telah dicuri dari hutan tersebut baik diangkut dengan truk melalui jalan raya maupun diangkut dengan kapal dari pelabuhan Teluk Lombok. Masyarakat tersebut bahkan telah berani menentang upaya penertipan dengan melakukan tindakan pengrusakan.

Kerusakan Hutan Lindung Bontang juga terus berlangsung. Hutan Lindung tersebut telah digarap oleh penduduk lokal, terutama migran dari Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya dijadikan perkebunan pisang, kebun sayur dan permukiman. Hal ini terjadi dipinggiran kota Bontang ke arah Bukit Menangis. Di daerah pantai juga terjadi kerusakan hutan mangrove, yang telah digunakan untuk areal tambak udang dan perluasan fisik bangunan, antara lain oleh penduduk desa Bontang Kuala.

Akibat kerusakan hutan di daerah pegunungan maka telah menimbulkan degradasi ekosistem hutan dengan segala akibatnya misalnya penurunan populasi orang hutan, payau (rusa) dan burung beo.

3.2 Sarana dan Prasarana

Uraian tentang sarana dan prasarana dimaksudkan untuk mengetahui aksesibilitas yang dimiliki guna mendukung proses mobilitas penduduk dan pembangunan daerah terutama untuk kota Bontang dan kota Sangatta. Pada saat ini prasarana transportasi baik udara maupun laut di kota Bontang dan di kota Sangatta sudah ada namun pemanfaatannya belum dapat menjangkau masyarakat luas.

Pemanfaatan prasarana laut dan udara yang ada masih terbatas untuk keperluan perusahaan yang memilikinya.

Pelabuhan laut di Bontang:

- PKT, untuk keperluan ekspor pupuk dan amoniak
- Badak, untuk keperluan ekspor gas alam cair
- Sekambang untuk ekspor batu bara.

Adapun wilayah Sangatta terdapat dua pelabuhan yaitu pelabuhan terletak di Tg. Bara. Pelabuhan ini adalah milik PT. Kaltim Prima Coal yang digunakan untuk keperluan export batubara sedangkan pelabuhan yang berada di Tg. Santan adalah milik Pertamina yang digunakan untuk ekspor minyak.

Karena masyarakat umum tidak bisa memanfaatkan pelabuhan tersebut, Pemda Bontang saat ini sedang merencanakan pembuatan pelabuhan yang dapat disinggahi oleh kapal Pelni. Menurut rencana pelabuhan akan dibuat di wilayah desa Loktuan yang sekaligus sebagai lokasi pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Selain itu Kabupaten Kutai Timur juga merencanakan mendirikan pelabuhan laut di Maloy. Pelabuhan yang akan dibuat tidak hanya untuk ekspor komoditi pertanian tetapi juga untuk transportasi penumpang antar propinsi.

Secara alamiah masyarakat telah membuat pelabuhan untuk kapal-kapal tradisional yang dibuat dari kayu. Lokasi pelabuhan yang ada antara lain di Loktuan dan Tg. Laut untuk kota Bontang, di Teluk Lombok dan Maloy untuk Sangatta. Pelabuhan tradisional tersebut dapat melayani perdagangan antar daerah dan tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan. Pelabuhan tradisional tersebut juga telah berperan dalam proses awal masuknya migran dari daerah lain, terutama dari Sulawesi Selatan.

Sarana pelabuhan udara juga tersedia baik di Bontang dan di Sangatta. Lapangan terbang di Bontang dikuasai oleh PT. Badak. Adapun di Sangatta lapangan terbang yang ada masing-masing dikuasai oleh Pertamina (di Sangkimah) dan oleh perusahaan Kaltim Prima Coal (di Tg. Bara). Meskipun daerah tersebut mempunyai 3 lapangan terbang namun penggunaannya lebih banyak untuk menunjang perusahaannya masing-masing. Masyarakat luas sedikit punya akses terhadap penerbangan. Di masa mendatang lapangan terbang Sangkimah akan ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas.

Oleh karena masyarakat luas tidak mempunyai akses transportasi udara dan di daerah tersebut belum ada pelabuhan laut untuk angkutan antar pulau, maka daerah Bontang, Sangatta dan Muara Badak terasa sebagai daerah yang terisolir. Sarana penghubung yang digunakan masyarakat luas adalah tersedianya jalan trans Kalimantan jalur timur yang menghubungkan lokasi tersebut dengan kota Samarinda. Kondisi fisik jalan umumnya cukup baik, meskipun pada daerah perbukitan mempunyai resiko kerusakan akibat tanah longsor. Kendaraan umum yang beroperasi secara reguler adalah bus jurusan Bontang dan jurusan Sangatta. Adapun transportasi barang banyak digunakan truk. Sebagai contoh komoditi pisang dari Bontang secara teratur telah dijual ke Jawa Timur dengan memanfaatkan transportasi darat, menuju Banjarmasin, dan selanjutnya berangkat dengan feri menuju Surabaya.

Gerak perubahan Bontang dan Kabupaten Kutai Timur yang secara formal baru berumur satu tahun, terkesan cepat. Pada saat ini prasarana komunikasi, perbankan, air bersih, listrik dan asuransi telah tersedia. Pada tahun 2001, khusus Sangatta akan dibangun kantor-kantor instansi pemerintah daerah. Perkembangan kota Bontang dan kota Sangatta saat ini dan akan meningkat pesat pada masa mendatang telah ikut menekan eksistensi Taman Nasional Kutai guna merelakan sebagian wilayahnya menopang perluasan kota tersebut.

3.3 Sosial Ekonomi

Propinsi Kalimantan Timur mulai menjadi propinsi sendiri sejak 1956. Atas dasar UU. No. 25 Kalimantan Timur terpisah dengan Kalimantan Selatan. Selanjutnya berdasarkan UU no. 27 tahun 1959, propinsi tersebut mempunyai 6 daerah tingkat II yaitu empat kabupaten (Bulungan, Berau, Kutai dan Pasir) dan dua kotamadya (Balikpapan dan Samarinda). Pada tahun 1999, telah terjadi perubahan daerah kabupaten, Kabupaten Bulungan dipecah menjadi Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan. Adapun Kabupaten Kutai dipecah menjadi Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai dan Kabupaten Kutai Barat.

Sebagian besar penduduk Propinsi Kalimantan Timur beragama Islam yaitu mencapai 85%. Mereka yang memeluk agama Islam sebagian besar bermukim disepanjang pantai. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh para pendatang, terutama orang-orang Bugis, Banjar dan Jawa.

Pemda Kalimantan Timur terus mendorong kehidupan beragama antara lain pemberian bantuan kepada lembaga dan kegiatan keagamaan. Sarana ibadah telah meningkat dari 4832 pada tahun 1998 menjadi 5135 pada tahun 1999. Kondisi ini telah menciptakan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama. Lebih dari dua pertiga penduduk umur 5 tahun ke atas masih menggunakan bahasa daerah untuk komunikasi di antara mereka. Penggunaan bahasa Indonesia untuk komunikasi sehari-hari tidak lebih dari sepertiganya. Bahasa daerah yang dominan sejalan dengan suku bangsa penduduk yaitu Jawa, Banjar dan Bugis. Disamping itu juga digunakan bahasa daerah yang lain seperti Sunda, Batak, Minang, Bali, Dayak, walaupun persentasenya masing-masing kecil. Hal ini telah menunjukkan bahwa penduduk Kalimantan Timur terdiri atas berbagai sukubangsa dengan variasi bahasanya. Keadaan ini juga terlihat jelas di daerah penelitian di Desa Loktuan.

Di Desa Loktuan di Bontang Utara, komposisi suku bangsa juga bervariasi yang menggambarkan semua propinsi di Indonesia. Dari banyak suku bangsa yang ada di desa tersebut, terdapat dua suku bangsa yang dominan yaitu Bugis (56%) dan Jawa (18%). Karena mereka hidup di daerah perkotaan dan harus berkomunikasi dan suku bangsa lain maka penggunaan bahasa Indonesia sangat menonjol yaitu 69%. Meskipun demikian masih ada di antara mereka yang belum bisa bahasa Indonesia dan telah menggunakan bahasa daerah sebagai alat berkomunikasi.

Penggunaan bahasa Indonesia cenderung meningkat sejalan dengan proses perkawinan antar suku bangsa di daerah tersebut yang makin meningkat pula. Perkawinan antar suku umumnya tidak dipersoalkan oleh keluarga walaupun masih diprioritaskan mereka yang seiman.

Kondisi kehidupan sosial yang kondusif yaitu terciptanya suasana yang damai tentunya sangat menunjang pembangunan ekonomi. Perekonomian Kalimantan Timur sangat ditentukan oleh keberadaan sumberdaya alam yang cukup besar. Secara makro perekonomian Kalimantan Timur tercermin dari nilai PDRB yang pada tahun 1999 telah mencapai Rp. 55.383 trilyun. Angka ini telah menempatkan Kalimantan Timur menduduki peringkat 3,5% dibandingkan tahun 1998. Ini merupakan prestasi yang menggembirakan karena lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh 0,23% pada periode yang sama.

Sejalan dengan pulihnya perekonomian akibat krisis, angka pengangguran juga mengalami penurunan dari 8,3% angkatan kerja pada tahun 1998 menjadi 7,8% angkatan kerja pada tahun 1999. Penyerapan tenaga kerja yang dominan adalah pada sektor pertanian, perdagangan, perkebunan dan industri. Di desa penelitian yaitu Loktuan, gambaran tentang penduduk angkatan kerja yang mengganggu sedikit lebih rendah yaitu 6,3%. Penyerapan tenaga kerja yang menonjol selain bekerja sebagai pegawai swasta (48%) dan sebagai pedagang (34%). Penduduk Loktuan banyak yang bekerja dilingkungan PKT, terutama pada perusahaan-perusahaan sub-kontraktor. Keadaan ini telah merangsang tumbuhnya kegiatan perdagangan, terutama sektor informal.

Dampak lain dari keberhasilan ekonomi di Kalimantan Timur dan program jaring pengaman sosial adalah pengurangan jumlah penduduk miskin. Pada saat krisis persentase penduduk miskin mencapai 21,7% namun pada tahun 1999 telah turun menjadi 15,9%.

3.4 Aspek Kependudukan

Aspek kependudukan merupakan elemen penting dalam setiap strategi pembangunan, karena sangat menentukan. Oleh karena itu aspek ini yang sering disebut sebagai sumberdaya manusia telah memperoleh prioritas utama dalam proses pembangunan di Kalimantan Timur. Untuk menggambarkan kondisi kependudukan Kabupaten Kutai masih mendasarkan pada data survei antara sensus tahun 1995. Meskipun di Indonesia telah diadakan sensus penduduk tahun 2000, namun hasilnya belum dapat diolah, sehingga belum dapat disajikan dalam tulisan ini. Pada saat survei penduduk antar sensus tahun 1995 diadakan, Kotif Bontang dan Kabupaten Kutai Timur masih termasuk dalam Kabupaten Kutai.

Jumlah penduduk di Kabupaten Kutai terus mengalami perubahan baik karena perubahan alami, migrasi maupun reklasifikasi daerah. Pada tahun 1980 jumlah penduduk Kabupaten Kutai sebanyak 399 ribu jiwa. Limabelas tahun kemudian yaitu tahun 1995 jumlah penduduk tersebut telah bertambah menjadi 765 ribu jiwa.

Dalam kurun waktu lima belas tahun, tingkat pertumbuhan Kabupaten Kutai sangat tinggi yaitu 4,5 persen pada kurun waktu 1980-1990 dan sedikit turun menjadi 4,3 persen pada kurun waktu 1990-1995. Kontribusi komponen migrasi cukup bermakna dalam penambahan penduduk di Kabupaten Kutai. Hasil SUPAS 95 menunjukkan migrasi masuk seumur hidup sebesar 29,3%. Angka

migrasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan migrasi masuk untuk Propinsi Kalimantan Timur sebesar 32 persen pada tahun yang sama.

Angka migrasi masuk yang tinggi pada dasawarsa delapanpuluhan tidak lepas dengan adanya kesempatan kerja pada industri perkayuan, industri pertambangan dan perkebunan. Industri besar yang berkembang di Kabupaten Kutai telah memunculkan daerah perkotaan seperti Bontang dan Sangatta. Pada tahun 1995 penduduk yang tinggal di daerah perkotaan di Kabupaten Kutai sebesar 31,7 persen. Lima belas tahun sebelumnya angka urbanisasi di Kabupaten tersebut hanya 4,3 persen.

Migrasi yang masuk di Kabupaten Kutai tersebut lebih dari duapertiganya belum kawin dan umumnya berumur antara 20-39 tahun (55%). Dibandingkan dengan nonmigran, pendidikan yang ditamatkan oleh para migran lebih tinggi daripada pendidikan nonmigran. Hasil Supas 95 menunjukkan pendidikan yang ditamatkan migran dan nonmigran untuk SLTP ke atas masing-masing 38 persen dan 18,7 persen. Perbedaan yang sangat mencolok bahkan terjadi di daerah penelitian desa Loktuan. Pendidikan tertinggi migran dan nonmigran yang tamat SLTA ke atas masing-masing 87 persen dan 13 persen.

BAB IV

MOBILITAS PENDUDUK: POLA DAN SEJARAH

4.1 Pola migrasi

Pola mobilitas penduduk ke dari dari Klaimantan Timur tidak terlepas dari sejarah perkembangan Kalimantan Timur itu sendiri. Mobilitas penduduk ke Kalimantan Timur telah terasa sejak zaman kolonial yang dilakukan oleh nelayan Bugis yang menempati daerah daerah pinggiran pantai. Namun demikian arus migrasi ke Kalimantan Timur semakin meningkat sejalan dengan pembangunan yang terjadi di Kalimantan Timur. Data sensus penduduk 1971 menunjukkan bahwa migrasi seumur hidup ke Kalimantan Timur hanya 5,6 % sedangkan migrasi keluar menunjukkan 3,3%. Namun demikian migrasi masuk ke kalimantan Timur mengalami peningkatan yang tajam pada dekade berikutnya. Data sensus penduduk 1980 menunjukkan bahwa migrasi masuk ke Kalimantan Timur telah mencapai 24,4 dari keseluruhan penduduk Kalimantan Timur. Sedangkan peningkatan migrasi keluar tidak mengalami peningkatan yang berarti. Secara keseluruhan migrasi keluar hanya meliputi 3,6%. Peningkatan ini antara lain disebabkan karena adanya eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur seperti hutan dan hasil tambang seperti yang diterangkan dalam bagian berikutnya. Pada tahun 1990 peningkatan migrasi masuk Ke kalimantan Timur masih tinggi yang ditunjukkan dengan data bahwa 32,2 % penduduk Kalimantan Timur tidak lahir di Kalimantan Timur. Namun demikian pada tahun 1995 peningkatan migrasi telah mengalami penurunan yang kemungkinan dikarenakan surutnya daya tarik Kalimantan Timur yang ditandai dengan surutnya industri perkayuan yang merupakan salah satu daya tarik migran tenaga kerja. Adapun migrasi keluar dari Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang kemungkinan disebabkan karena melanjutkan sekolah diluar propinsi dan migrasi kembali.

Tabel 4.1. Jumlah dan Persentase Migrasi Masuk Seumur Hidup Tahun 1971, 1980, 1990 dan 1995

Migrasi	1971	1980	1990	1995
Masuk	40 856 (5,6)	296 963 (24,4)	604 549 (32,2)	293 589 (33,0)
Keluar	23 723 (3,3)	34 059 (3,6)	63 533 (4,8)	46 206 (5,5)

Sumber: Diolah dari data BPS, Sensus Penduduk ,1971; Sensus Penduduk ,1980; SUPAS, 1995

Arus migrasi masuk yang tinggi tersebut tidak tersebar merata ke seluruh daerah tetapi pada umumnya mengalir menuju ke daerah daerah pertumbuhan ekonomi seperti Balikpapan, Samarinda, Pasir dan Kutai (dimana kota Bontang merupakan pecahan dari kabupaten Kutai). merupakan daerah penerima migran terbesar. Keempat daerah tersebut merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

Seperti pada penelitian lain tentang mobilitas penduduk, pada umumnya migran adalah selektif (Aswatini dkk 2000) Demikian pula kharakteristik migran ke Kalimantan Timur ditandai oleh mereka yang berusia produktif, berpendidikan relatif tinggi bila dibandingkan dengan penduduk non-migran dan pada umumnya mempunyai kegiatan bekerja di daerah tujuan. Pekerjaan mereka pada umumnya di sektor jasa dan manufaktur (Aswatini dkk, 2000). Hal tersebut tidak mengherankan karena daerah tersebut merupakan daerah industri sehingga banyak tenaga kerja yang terserap di sektor manufaktur. Selanjutnya sebagai dampak adanya industri adalah munculnya usaha-usaha jasa.

4.2. Keterkaitan Antara Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Sejarah

Meningkatnya mobilitas penduduk di Kalimantan Timur (Kaltim) sejalan dengan kegiatan pembangunan di propinsi ini yang dimulai sejak akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, yaitu ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembangunan

dibidang kehutanan, khususnya kegiatan logging. Kebijakan pemerintah yang mendukung masuknya modal asing untuk menginvestasikan modalnya di sektor kehutanan direspon sangat positif oleh pemilik modal (baik asing maupun domestik) untuk melakukan kegiatan logging dan industri perikanan setelah pemerintah mulai melarang penjualan kayu gondongan. Kalimantan Timur sebagai propinsi yang sangat kaya akan sumber daya hutannya, kedua terbesar di seluruh Indonesia setelah Papua, merupakan daerah tujuan yang sangat potensial untuk menginvestasikan modalnya pada kegiatan tersebut. Kemudian, peningkatan mobilitas penduduk juga dipacu oleh kegiatan di bidang pertambangan dan industri seperti minyak dan gas alam, batu bara dan Pupuk Kaltim (PKT). Akhir-akhir ini mobilitas penduduk semakin intensif karena akses transportasi dari dan ke daerah-daerah lain seperti Sulawesi dan Jawa semakin lancar dengan biaya yang relatif 'terjangkau' oleh para pendatang dan penduduk Kaltim.

4.2. "Ada Buah Ada Burung"

Pepatah 'ada buah ada burung' sangat relevan untuk mengungkapkan mobilitas penduduk dan pembangunan di propinsi Kalimantan Timur. Kekayaan alam di propinsi ini merupakan sumber 'buah' bagi pengusaha, karena itu menjadi daerah 'sasaran' oleh pemerintah pusat untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan kegiatan pembangunan.

Meningkatnya kegiatan di sektor kehutanan mempunyai implikasi yang sangat besar bagi peningkatan laju mobilitas penduduk di propinsi Kaltim. Intensifnya kegiatan logging di Kaltim menghasilkan 'bom kayu', yang dikenal dengan istilah 'banjir kap' pada dekade 1970-an dan pengembangan industri kayu pada periode 1980-an (Potter, 1989:3). Eksploitasi kayu dimulai tahun 1967 bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang memberikan izin pada investor asing dan meningkatnya permintaan terhadap kayu tropis, terutama dari Jepang, Taiwan dan Korea (Wood, 1985:72). Peningkatan permintaan ini direspon cepat oleh pengusaha sehingga jumlah Hak Pengusaha Hutan (HPH) meningkat dengan pesat. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya areal HPH yang menyebar di seluruh wilayah propinsi Kaltim. Akibatnya, sebagian besar hutan dibagian barat Kaltim sudah termasuk kedalam wilayah HPH, terutama sepanjang sungai.

Banjir kap telah memberikan dampak besar terhadap keadaan sosial ekonomi di propinsi Kaltim. Permintaan akan tenaga kerja meningkat sangat tajam, menarik penduduk dari luar daerah untuk datang dan bekerja di perusahaan logging atau Hak Pengusaha Hutan (HPH) dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, perumahan dan fasilitas lainnya. Meningkatnya kegiatan eksploitasi hutan dan pembangunan infrastruktur ini telah memberikan kesempatan kerja yang sangat tinggi di sektor kehutanan (Peluso, 1983:169; Vargas, 1985:141).

Setelah kebijakan sektor kehutanan, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan, seperti pengembangan tambang dan industri minyak dan gas alam, perkebunan (karet dan kelapa sawit) dan pembangunan pertanian, khususnya pengembangan tanaman pangan. Pesatnya kegiatan 'pembangunan' di propinsi Kaltim telah menarik minat pendatang ke propinsi ini.

Kegiatan eksplorasi minyak mempunyai kontribusi yang besar pada mobilitas penduduk ke propinsi Kaltim, terutama pada daerah-daerah pusat kegiatan pertambangan yang terkonsentrasi di dua lokasi sumber minyak yaitu Kutai di bagian selatan dan Tarakan di bagian utara Kaltim. Potensi minyak di Kutai sangat besar terutama di sekitar Balikpapan, Samarinda dan Bontang dengan Balikpapan sebagai pusat kilang minyak Kaltim. Sedangkan di bagian utara kebanyakan sumber minyak terletak di sekitar Tarakan seperti Sembakung dan Bunyu dan bagian selatan Tarakan (Hidayati, 1990).

Beroperasinya penambangan dan industri minyak menimbulkan berbagai kegiatan lain untuk mendukung penambangan dan industri tersebut, seperti kegiatan untuk persiapan ladang-ladang minyak, pabrik dan kilang-kilang minyak, jalan, jembatan, pelabuhan dan lapangan udara. Semua kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi pendatang untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia.

Pembangunan pertanian juga mempunyai pengaruh cukup besar bagi peningkatan mobilitas penduduk di propinsi Kaltim. Berkurangnya areal pertanian pada akhir tahun 1960-an sangat erat kaitannya dengan mobilitas penduduk meninggalkan desa untuk bekerja, di pusat-pusat kegiatan logging. Tetapi pada dekade berikutnya tahun 1970-an dan 1980-an areal pertanian berkembang cukup luas, dengan perluasan rata-rata 5 persen pertahun (Hidayati, 1990:61-62). Pada tahun 1990-an, perluasan lahan pertanian ini erat

kaitannya dengan program ekstensifikasi pertanian, terutama perkebunan dan pengembangan program PIR-SUS dan PIR-BUN melalui program transmigrasi.

Kebijakan pemerintah yang langsung berkaitan dengan mobilitas penduduk di Kaltim adalah transmigrasi. Propinsi ini merupakan daerah tujuan yang penting dalam program transmigrasi, dikarenakan jumlah penduduknya masih 'sedikit' dengan wilayah yang sangat luas. Mulanya program transmigrasi bertujuan untuk mendistribusikan penduduk dari daerah padat (khususnya Jawa dan Bali) ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya, termasuk di propinsi Kalimantan Timur. Tujuan program ini kemudian berkembang, pada tahun 1960-an program transmigrasi menekankan pada pengembangan lahan pertanian, sebagai respon dari terbatasnya produksi pangan. Pada zaman orde baru program ini dikaitkan dengan pembangunan daerah yang menekankan pada pembangunan pertanian, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian (Hardjono, 1977:3 dan Kebschull, 1986:35-37). Sedangkan pada tahun 1990-an program transmigrasi lebih dikaitkan dengan program ekstensifikasi perkebunan, khususnya melalui program PIR-SUS dan PIR-BUN (Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Kalimantan Timur, 2000).

4.2.2 Meningkatnya Migran Spontan di Kota Bontang: Kasus Lok Tuan, Bontang

Meningkatnya jumlah migran spontan di kota Bontang sangat erat kaitannya dengan peningkatan kegiatan 'pembangunan' di kota ini, diindikasikan dengan banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang logging dan industri minyak dan gas alam serta Pupuk Kaltim (PKT). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana keterkaitan antara migrasi (khususnya migrasi spontan) dan pembangunan daerah, bagian ini akan memberikan ilustrasi dari studi kasus di desa Lok Tuan yang didominasi pendatang dan merupakan desa terpadat di Kota Bontang.

Perkembangan desa Lok Tuan tidak lepas dari sejarah pengembangan kota Bontang. Desa Lok Tuan berbatasan langsung dengan PKT, karenanya pengembangan desa juga sejalan dengan perkembangan industri pupuk tersebut, walaupun desa ini pertama kali di buka bersamaan dengan beroperasinya perusahaan kayu Jepang pada tahun 1970. Beberapa penduduk mulai menetap di Lok Tuan, mereka bertani dan berdagang, terutama untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari pekerja di perusahaan kayu tersebut. Jumlah penduduk semakin bertambah dengan datangnya migran dari berbagai daerah, seperti Jawa, Sulawesi dan Bontang Kuala, bekerja di perusahaan kayu.

Pada tahun 1973 satu helikopter mendarat dipinggir pantai dan penumpangnya terdiri dari orang Jepang, Malaysia, Amerika dan Indonesia. Dari penumpang helikopter tersebut diperoleh berita bahwa di lokasi ini akan dibangun pabrik pupuk terapung. Sejak itu proses persiapan pembangunan pabrik pupuk dimulai dengan berbagai kegiatan seperti pengerukan pantai yang dilakukan oleh perusahaan Jepang, perataan tanah untuk areal pabrik dikerjakan oleh perusahaan Malaysia dan pembangunan landasan pesawat untuk keperluan pabrik oleh perusahaan Indonesia (Kaliraya Sari). Perusahaan-perusahaan kontraktor mempekerjakan banyak pekerja, tenaga buruh yang umumnya dilakukan oleh pendatang.

Lok Tuan berkembang sangat cepat setelah beroperasinya Pupuk Kaltim pada awal tahun 1980-an. Pada waktu memulai operasinya, PKT memerlukan banyak tenaga kerja terutama buruh kasar. Pada waktu itu ditawarkan pada buruh-buruh yang semula bekerja di kontraktor-kontraktor yang menyiapkan keperluan PKT, tetapi hanya sedikit pekerja yang bersedia menjadi karyawan PKT, terutama dikarenakan gaji PKT sangat rendah jika dibandingkan dengan upah mereka di anak-anak perusahaan PKT dan perusahaan-perusahaan kayu disekitarnya, dan fasilitas yang diberikan PKT untuk karyawan masih sangat minim. Karena kebutuhan tenaga kerja dari sekitar PKT tidak mencukupi, maka pihak PKT menerima karyawan dari luar daerah Kaltim, seperti Jawa, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Lok Tuan menjadi 'pangkalan' para pencari kerja atau pekerja kontrakan di anak-anak perusahaan PKT. Akibatnya, jumlah penduduk meningkat sangat cepat dan pada saat penelitian tahun 2000 jumlah penduduk sebanyak 12 936 orang dari 3249 kepala keluarga.

Dari sejarah Lok Tuan dapat dikatakan bahwa desa ini didominasi migran yang datang secara spontan dari berbagai daerah di seluruh pelosok nusantara dari Sumatera sampai Papua. Daerah asal penduduk yang dominan adalah Sulawesi Selatan (50 persen), Jawa (20 persen), Kalimantan Selatan (10 persen) dan sisanya 20 persen berasal dari berbagai daerah lainnya. Tujuan kedatangan migran di desa Lok Tuan adalah untuk bekerja terutama di PKT dan anak-anak perusahaannya dan sebagian kecil bekerja di sektor

perdagangan, seperti makanan dan minuman, pakaian dan perabotan serta elektronik, dan disektor jasa seperti transportasi (terutama ojek).

4.2.3 Mobilitas Penduduk Dalam Konteks Program Transmigrasi: Prangat Baru, Kutai

Program transmigrasi di Kaltim dimulai pada Pra Pelita yaitu tahun 1954 dimana 760 kepala keluarga (KK) atau 2.989 jiwa yang berasal dari Jabar dan Jatim di transmigrasikan di Palaran, Kodya Samarinda. Sejak itu, jumlah transmigran meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun anggaran 1999/2000 jumlahnya telah mencapai 72.487 KK atau 292.248 jiwa (lihat Tabel 3.1.). Jumlah transmigran mencapai puncak pada Pelita IV dimana 17.263 KK atau 71.519 jiwa transmigran di tempatkan terutama di kabupaten Pasir. Peningkatan jumlah transmigran ini berkaitan erat dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan program PIR-Trans dan upaya mempromosikan transmigrasi spontan, terutama di lokasi PIR-Trans. Tetapi setelah itu terdapat penurunan jumlah transmigran, mungkin berkaitan dengan semakin gencarnya kritik terhadap program transmigrasi dan berkurangnya dana pemerintah untuk melaksanakan program tersebut.

Pemukiman transmigrasi menyebar di propinsi Kalimantan Timur dengan kabupaten Kutai sebagai kabupaten penerima transmigran terbanyak, diikuti oleh kabupaten Pasir dan kabupaten Berau. Pada mulanya, pemukiman transmigrasi terkonsentrasi di pusat-pusat kegiatan ekonomi di propinsi ini, yaitu Kodya Samarinda dan Kodya Balikpapan, tetapi sejak Pelita III pusat pemukiman beralih ke kabupaten Kutai dan kabupaten Pasir, terutama dikarenakan kondisi yang potensial dari kabupaten-kabupaten tersebut. Kutai merupakan kabupaten terluas (waktu itu sebelum pemekaran) dan mempunyai potensi pertanian yang terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten/kodya lainnya. Sedangkan kabupaten Pasir juga mempunyai wilayah yang luas dan mempunyai potensi untuk pengembangan pertanian tanaman keras (perkebunan) (Hidayati, 1990). Akhir-akhir ini kabupaten Bulungan dan Berau juga mulai menjadi daerah penting untuk penempatan transmigran.

Transmigran berasal dari berbagai daerah dari luar maupun dalam propinsi Kaltim. Proporsi terbesar berasal dari Jawa Timur, diikuti oleh Jateng dan Jabar. Transmigran juga berasal dari daerah lain seperti NTT, NTB dan Bali, tetapi proporsinya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan transmigran asal Jawa. Sedangkan

transmigran yang berasal dari propinsi Kaltim sendiri jumlahnya cukup besar dan sampai dengan tahun 2000 terdapat 13.913 KK atau 19 persen dari total transmigran di propinsi Kaltim, mereka termasuk dalam program APPDT dan TPS (Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Kalimantan Timur, 2000).

Tabel 4.2. Realisasi Penempatan Transmigran di Kalimantan Timur dari Pra Pelita sampai tahun 2000

Program Penempatan	Kabupaten/kota	Jumlah Realisasi		Keterangan
		Kepala Keluarga (KK)	Jiwa	
Pra Pelita 1954 - 1967	Kab Kutai	2.092	8.534	Swakarsa, umum Umum, SOB Umum Umum
	Kodya Samarinda	1.043	3.915	
	Kodya Balikpapan	1.245	5.352	
	Kab Pasir	353	1.516	
	Jumlah	4.733	19.317	
Pelita I 1969 - 1973	Kab Kutai	1.223	5.651	Spontan, bencana Spontan, umum Spontan
	Kodya Samarinda	1.289	5.584	
	Kodya Balikpapan	154	591	
	Kab Pasir	51	249	
	Kab Bulungan	95	425	
Jumlah	2.812	12.500		
Pelita II 1974 - 1978	Kab Kutai	100	398	Banpres Bencana alam Umum Umum, Banpres Bencana alam
	Kodya Samarinda	300	1.373	
	Kodya Balikpapan	2.500	11.131	
	Kab Pasir	1.000	4.220	
	Kab Bulungan	100	481	
Jumlah	4.000	17.603		
Pelita III 1979 - 1984	Kab Kutai	9.050	37.325	Umum Umum Umum Umum Umum Umum
	Kodya Samarinda	300	1.258	
	Kodya Balikpapan	625	2.486	
	Kab Pasir	1.500	6.435	
	Kab Bulungan	597	2.446	
	Kab Berau	600	2.548	
Jumlah	12.672	52.498		
Pelita IV 1985 - 1989	Kab Kutai	6.894	27.496	Umum, Pirsus Swakarsa PIR-BUN Umum Umum
	Kodya Samarinda	-	-	
	Kodya Balikpapan	200	828	
	Kab Pasir	8.365	35.353	
	Kab Bulungan	1.353	5.400	
	Kab Berau	351	1.307	
Jumlah	17.263	71.519		

Lanjutan Tabel 2.

Program Penempatan	Kabupaten/kota	Jumlah Realisasi		Keterangan
		Kepala Keluarga (KK)	Jiwa	
Pelita V 1990 - 1994	Kab Kutai	6.811	26.720	Umum, PIRBUN Bangdep Umum, Bangdep Umum, PIRBUN Banpres, Bangdep Umum, Bangdep
	Kodya Samarinda	250	920	
	Kodya Balikpapan	100	393	
	Kab Pasir	4.053	16.386	
	Kab Bulungan	1.863	7.069	
	Kab Berau	2.161	8.299	
	Jumlah	15.238	59.787	
Pelita VI 1995 1999/2000	Kab Kutai	6.560	24.195	HTI, Umum
	Kodya Samarinda	-	-	
	Kodya Balikpapan	-	-	HTI, Bangdep
	Kab Pasir	2.885	11.037	
	Kab Bulungan	-	-	Umum, Bangdep
	Kab Berau	4.354	16.623	
Jumlah	15.769	59.024		
	Total	72.487	292.248	

Sumber : Kanwil Transmigrasi dan Kependudukan, Kalimantan Timur

Desa Prangat Baru merupakan salah satu eks-lokasi transmigrasi Tanjung Santan IV yang terletak di Kabupaten Kutai. Transmigran pertama kali datang pada bulan Maret 1989 sebanyak 146 KK yang terdiri dari 68 KK transmigran asal Jatim dan 41 KK berasal dari Yogyakarta dan sisanya 39 KK adalah transmigran lokal dengan program APPDT yang terdiri dari suku Bugis, Banjar dan Kutai. Pada tahun 1992 lokasi transmigrasi ini dikukuhkan sebagai desa dengan nama desa Prangat Baru. Mulanya banyak transmigran yang kembali ke Jawa, tetapi sebagian transmigran kembali lagi ke lokasi. Banyak pendatang yang membeli lahan transmigran dan/atau merintis lahan pertanian disekitar lokasi. Penduduk desa berfluktuasi dan pada tahun 2000 penduduk desa berjumlah 291 KK (1.314 jiwa), sebagian besar penduduk adalah migran spontan, terutama dari suku Bugis, Banjar, Kutai dan Jawa.

Desa eks-lokasi transmigrasi ini letaknya sangat strategis di kiri-kanan jalan raya antara Samarinda dan Bontang, khususnya pada kilometer 59 dari Samarinda atau kilometer 61 dari Kota Bontang.

Pada waktu transmigran datang, jalan raya belum dibangun, mereka menggunakan jalan HPH Supermas, baru 6 bulan kemudian jalan dibangun melalui lokasi transmigrasi ini, padahal jalan tersebut menurut rencana awalnya tidak melalui lokasi transmigrasi. Pembangunan jalan ini memberikan berbagai akses bagi transmigran, termasuk kemudahan transportasi dan pemasaran hasil pertanian.

BAB V

MOBILITAS PENDUDUK DAN INTERAKSI SOSIAL

Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 1998 sebanyak 2.516.100 jiwa (BPS, 1999). Dilihat dari unsur etnis penduduknya cukup beragam seperti etnis Banjar, Kutai, Jawa dan Bugis. Selebihnya berasal dari etnis-etnis lain yang berasal dari wilayah-wilayah lain Nusantara. Dengan demikian Kalimantan Timur terutama di Kabupaten Kutai Timur, didiami oleh masyarakat yang majemuk baik dari segi golongan, agama, terutama bila ditinjau dari segi etnisnya. Etnis Dayak yang dikategorikan sebagai penduduk asli ternyata bila dilihat dari segi jumlah penduduk termasuk minoritas.

Keragaman etnis yang ada di Kalimantan Timur nampaknya memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya pada masyarakat setempat. Dampak positif yang dapat diamati adalah dengan adanya kerjasama di dalam berbagai segi sehingga mewarnai dinamika kehidupan masyarakatnya. Sementara bila dilihat dari segi negatif adanya keanekaragaman dari suatu masyarakat adalah potensi timbulnya pemanfaatan kemajemukan oleh kelompok/individu tertentu dengan mengembangkan prasangka dan stereotipe dalam suatu masyarakat yang dapat memicu kasus (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) sehingga berpengaruh ke berbagai bentuk konflik sosial, kejahatan sosial maupun ekonomi. Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh (Andriati, 2000: 1) bahwa kemajemukan memungkinkan masyarakat untuk munculnya sifat individual, mementingkan diri sendiri, kurang kerjasama kelompok, degradasi moral dan mudah terkena isu. Namun demikian sampai saat ini nampaknya kekawatiran akan terjadinya dampak negatif seperti itu sebagai akibat dari hubungan sosial antar berbagai ragam etnis belum menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan.

Menurut Alqadrie (2000: 4) dalam setiap hubungan antar kelompok adanya suatu kerjasama maupun konflik merupakan suatu kemungkinan yang tidak dapat dihindari. Kelompok-kelompok etnis memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang sama dengan atau berbeda dari kelompok lainnya dan memiliki jaringan kerja sama dengan sesama kelompok maupun dengan kelompok etnik lain yang mempunyai kepentingan yang sama (Alqadrie, 2000: 1). Lebih jauh

Alqadrie menjelaskan bahwa suatu kelompok etnis atau yang diidentikkan dengan suku bangsa memiliki ciri dan kebersamaan secara inheren dan perbedaan secara eksteren dengan kelompok lain tidak saja karena ia memiliki nilai-nilai budaya tetapi juga bahasa yang khas yang menjadi identitas kelompoknya.

Bagian ini menggambarkan kondisi hubungan sosial di Kalimantan Timur dilihat dari beberapa aspek yaitu konsep penduduk asli, penduduk lokal serta pendatang dan interaksi sosial yang menguraikan mengenai kemajemukan sukubangsa, toleransi antar etnis dan potensi konflik sebagai akibat dari adanya hubungan sosial di komunitas yang beragam. Uraian yang lebih rinci difokuskan pada desa Lok Tuan yang merupakan desa penelitian.

5.1 Konsep Penduduk Asli, Lokal dan Pendatang

5.1.1 Penduduk Asli: Orang Kutai atau Orang Bontang Kuala?

Dari hasil penelitian ini konsep penduduk asli atau pribumi mengacu kepada mereka yang nenek moyangnya adalah orang Kutai. Mereka ini adalah keturunan langsung orang Dayak Kutai yang merupakan cikal bakal dari penduduk setempat. Menurut informasi yang diperoleh orang Kutai yang masih tinggal di Bontang secara demografis jumlahnya sangat terbatas dan kebanyakan sudah terpinggirkan mendekati hutan. Keadaan ini karena sesuai dengan pekerjaan mereka yang pada umumnya berladang maupun berburu yang lebih banyak makan waktu untuk tinggal di daerah hutan, bebas serta tidak terikat kepada aturan-aturan formal. Konsep penduduk asli juga memasukkan mereka yang berasal dari Bontang Kuala. Padahal menurut keterangan dari beberapa informan kunci, penduduk Bontang Kuala dahulunya adalah migran campuran dari beberapa etnis meskipun sebagian besar orang Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Oleh karena pekerjaan utama mereka sebagian besar adalah nelayan, pada umumnya mereka hidup di daerah pantai di sekitar Bontang Kuala. Namun demikian seiring dengan perkembangan Kota Bontang maka orang Bontang Kuala ini sebagian pindah ke Kota Bontang. Mereka tinggal di Kota Bontang bertahun-tahun dan beranak pinak serta tinggal secara turun temurun di daerah ini. Pada akhirnya mereka mengidentifikasi dirinya sebagai penduduk asli Bontang.

Sesuai dengan konsep mengenai penduduk asli, melekat pula didalamnya adalah stereotipe sebagai penduduk asli. Salah satu di antaranya adalah adanya anggapan bahwa penduduk asli lebih

menyukai pekerjaan yang menyatu dengan alam misalnya berburu, berladang atau nelayan yang mencari ikan. Mereka lebih senang tinggal di daerah yang berdekatan dengan sumber penghidupannya serta dalam bekerja tidak menyukai hal-hal atau aturan yang bersifat formal karena dalam bekerja mereka lebih memilih pada aturan yang lebih fleksibel (tergantung pada mereka sendiri).

5.1.2 Siapa penduduk lokal?

Di Kota Bontang, selain penduduk yang diidentikkan sebagai penduduk asli, ada pula yang disebut sebagai kelompok penduduk lokal. Konsep tentang penduduk lokal yang dikemukakan oleh beberapa informan bervariasi. Konsep penduduk lokal ini muncul tahun tahun terakhir ini yang lebih didorong karena perebutan sumber penghidupan. Menurut informasi yang diperoleh dari beberapa tokoh kunci selama di lapangan, diperoleh penjelasan bahwa mereka yang dikategorikan sebagai penduduk lokal pada dasarnya adalah mereka yang merupakan pendatang di Kota Bontang yang sudah bertempat tinggal lama. Menurut mereka tinggal lama tersebut diartikan bila sudah menetap lebih dari 10 tahun di Bontang. Selain itu meskipun belum bertempat tinggal selama lebih dari 10 tahun namun bila mereka lahir di tempat ini juga dikategorikan sebagai penduduk lokal Kota Bontang. Pada dasarnya para penduduk lokal ini adalah pendatang yang merupakan orang Banjar, Bugis, Buton, Makassar, Jawa, Batak, Minahasa, Toraja dan Gorontalo. Pada umumnya mereka datang ke Kota Bontang sekitar awal tahun 1970an pada saat proses berdirinya perusahaan Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Mereka datang ke Bontang untuk bekerja karena pada saat persiapan awal berdirinya perusahaan tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja.

Pada mulanya mereka pindah dan bekerja di Kota Bontang tidak dengan keluarganya. Lama kelamaan para pendatang ini memboyong keluarganya atau kawin dengan orang setempat sehingga mempunyai keturunan di daerah itu pula. Setelah tinggal lebih dari sepuluh tahun sebagian dari mereka menganggap dirinya sebagai penduduk lokal. Para migran yang mengidentikkan dirinya sebagai penduduk lokal ini biasanya tinggal di daerah dekat perusahaan terutama di sekitar kawasan perusahaan PKT. Mereka tinggal bertahun-tahun di daerah tersebut dan beranak pinak sehingga mereka membentuk suatu komunitas besar.

Berkaitan dengan konsep penduduk lokal ini, meskipun sebagian informan mengidentifikasi penduduk lokal adalah penduduk

yang tinggal di Kota Bontang maupun Lok Tuan lebih dari sepuluh tahun, namun pada kenyataannya mereka ini tidak memasukkan penduduk yang tinggal di kawasan PKT dalam kategori penduduk lokal. Mereka mengkategorikan karyawan tetap dan tinggal di kawasan PKT sebagai pendatang meskipun pada kenyataannya penduduk ini sudah menempati kawasan tersebut sejak berdirinya PKT atau lebih dari sepuluh tahun bahkan anak-anak mereka pada umumnya telah lahir di Bontang. Hasil wawancara dengan beberapa tokoh kunci di daerah ini menyebutkan bahwa alasan mereka mengkategorikan penduduk yang tinggal di kawasan PKT atau yang biasa dikenal sebagai orang BTN (karena dibangun dengan fasilitas kredit dari Bank Tabungan Negara/BTN) atau orang Kompleks karena adanya anggapan bahwa Orang kompleks tidak mau berbaur dengan orang Loktuan. Meskipun pada kenyataannya mereka tinggal di lokasi yang berdekatan. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan yang menyebabkan para karyawan tetap PKT tinggal di kompleks yang terkesan 'eksklusif'.

Lengkapya fasilitas yang dipunyai oleh orang kompleks dan padatnya jam kerja kemungkinan yang menyebabkan mereka tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat di luar kompleks. Kurangnya intensitas dalam berhubungan sosial dengan masyarakat luar inilah yang menyebabkan mereka dianggap 'asing' oleh masyarakat Loktuan terutama mereka yang mengidentifikasi diri sebagai penduduk lokal. Interaksi orang kompleks dengan orang luar terjadi melalui kegiatan ekonomi. Dari hasil pengamatan selama penelitian terlihat bahwa sebagian orang kompleks belanja pada pertokoan milik orang Lok Tuan.

5.1.3 Konsep Pendatang: siapa mereka?

Penduduk yang dikategorikan sebagai pendatang adalah mereka yang baru datang ke Kota Bontang atau menetap di daerah tersebut kurang dari sepuluh tahun. Seperti halnya para penduduk lokal yang notabene memang pendatang, mereka ini adalah penduduk luar Kota Bontang yang datang untuk bekerja di daerah ini. Kelompok pendatang ini merupakan campuran dari berbagai suku bangsa seperti Bugis, Buton, Makassar, Banjar maupun Jawa. Para pendatang ini pada umumnya tinggal di tempat kerabat atau kenalannya untuk sementara sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Proporsi pendatang ini semakin lama semakin banyak sejalan dengan berkembangnya industri dan adanya peluang kerja di Kota Botang.

Dalam kenyataannya sulit untuk membedakan antara siapa penduduk lokal dan siapa pendatang pendatang baru dan pendatang yang sudah menjadi penduduk lokal baik dilihat dari kegiatannya maupun identitas penduduk yang dipunyai. Hal tersebut dikarenakan pendatang yang telah lama tinggal, cukup banyak yang masih tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sedangkan pendatang relatif baru yang cepat mendapatkan pekerjaan juga banyak terutama mereka yang sudah punya jaringan sebelumnya. Beberapa pemilik toko yang nampaknya sudah mapan berusaha di Loktuan, mereka menetap di daerah tersebut kurang dari sepuluh tahun. Ketika mereka ini ditanyakan apakah mereka ini termasuk pendatang atau penduduk lokal, jawaban yang diterima adalah 'pendatang namun bermaksud untuk menetap dan menjadi warga Bontang'.

Berkaitan dengan konsep pendatang ini muncul permasalahan terutama yang menyangkut mengenai identitas diri penduduk atau Kartu Tanda pengenal Penduduk (KTP). Ada kecenderungan di mana pendatang dengan mudah mendapatkan KTP padahal mereka baru beberapa hari tinggal di Bontang. Permasalahan ini muncul sehubungan dengan adanya komitmen yang muncul berkaitan dengan kesempatan kerja di lingkungan PKT yang akan mempertimbangkan penduduk setempat. Padahal bukti seseorang merupakan penduduk lokal atau pendatang yang membedakan adalah batasan sepuluh tahun tersebut dimana tidak tercantum dalam KTP.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, jika konsep pendatang dikaitkan dengan batasan tinggal yang kurang dari sepuluh tahun sebetulnya penduduk yang tinggal di kompleks PKT tidak lagi sebagai 'pendatang' namun sudah dapat dikategorikan sebagai penduduk lokal. Barangkali karena mereka adalah karyawan suatu perusahaan yang akan mempunyai masa pensiun dan kemungkinan kembali ke daerah asalnya maka mereka (karyawan tetap PKT) masih digolongkan sebagai pendatang.

Sebetulnya, permasalahan antara penduduk lokal ataupun pendatang hanya timbul bagi mereka yang belum memperoleh suatu pekerjaan dan akan melamar menjadi karyawan perusahaan seperti PKT atau di kantor-kantor pemerintah. Bagi mereka yang bekerja di sektor informal barangkali tidak terlalu menjadi masalah apakah mereka pendatang atau penduduk lokal. Hasil wawancara dengan dua orang pengungsi Timor Timur menunjukkan bahwa mereka sudah dapat bekerja (berjualan) di Lok Tuan meskipun mereka datang ke tempat tersebut belum ada seminggu. Nampaknya masyarakat setempat tidak mepedulikan apakah orang tersebut baru datang

atau sudah lama tinggal di daerah Lok Tuan sepanjang mereka mematuhi aturan setempat. Pengungsi Timor Timur (aslinya dari Ujung Pandang namun telah bermukim di Timor Timur sekitar 6 tahun) tersebut berjualan baju pada malam hari dan memperoleh lokasi jualan di depan toko milik orang Banjar. Mereka menggunakan tempat seluas 2 kali 2 meter untuk berjualan dan karena berjualan pada malam hari mereka harus memakai lampu penerangan (listrik) yang diambil dari sebuah toko milik orang Banjar dan untuk itu mereka membayar Rp. 25,000 sebulan.

Berbicara mengenai konsep penduduk lokal maupun pendatang dalam kaitannya dengan mobilitas penduduk sebetulnya selain memakai batasan waktu tinggal sebelumnya dapat dikaitkan dengan keinginan para pendatang ini dengan keinginan untuk menetap serta alasan untuk menetap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di antara para responden saat ditanyakan apakah mereka mempunyai keinginan untuk menetap di kota Bontang, maka sebagian besar responden (91.4 persen) mengatakan ingin menetap, hanya sekitar 8.6 persen yang menyatakan tidak mau menetap. Adapun ketika kepada mereka ditanyakan alasan ingin menetap di daerah tersebut maka jawabannya cukup bervariasi meskipun hampir separoh dari responden menyatakan bahwa alasan mereka ingin menetap adalah karena ingin mencari nafkah di daerah tersebut (49 persen). Mengikuti suami atau adanya saudara atau kenalan yang ada di Kota Bontang juga merupakan salah satu alasan mengapa mereka mau menetap (masing-masing 22.5 persen). Hal ini menunjukkan bahwa kuatnya ikatan kekerabatan juga mempengaruhi keinginan seseorang untuk menetap di suatu daerah.

Sementara itu, alasan yang dikemukakan oleh mereka yang menyatakan tidak mau menetap di daerah tersebut (22 orang) adalah karena alasan tidak punya rumah (6 orang), keluarga ada di daerah asal (6 orang), karena bekerja tidak tetap (4 orang) sisanya adalah karena mereka hanya ditugaskan oleh kantor dan karena situasi yang belum menentu. Menyimak dari alasan yang dikemukakan oleh responden bahwa mereka ingin menetap di daerah ini dengan alasan karena ingin mencari nafkah semakin memperkuat anggapan bahwa Kalimantan Timur, Kota Bontang pada khususnya dianggap mampu menciptakan lapangan kerja. Sebetulnya di samping batasan sepuluh tahun sebagai ukuran untuk mengkategorikan seseorang sebagai penduduk lokal, keinginan tinggal menetap di suatu lokasi juga dapat dipakai sebagai kriteria tambahan sebagai penduduk lokal. Hal ini karena adanya kemungkinan bahwa seseorang meskipun sudah

tinggal di daerah tersebut lebih dari sepuluh tahun namun tidak berkeinginan untuk menetap barangkali juga tidak dapat dimasukkan sebagai kelompok penduduk lokal.

Konsep penduduk asli , pendatang dan lokal lebih banyak digunakan masyarakat dalam menjelaskan hubungan kerja di industri. Sedangkan dalam hubungan sosial sehari-hari lebih menekankan hubungan antar etnis. Karena itu analisa selanjutnya dalam bab ini akan difokuskan pada hubungan sosial antar etnis.

5.2 Kemajemukan masyarakat di Kota Bontang

Kelompok etnis (Naral, 1964 dalam Alqadrie, 2000: 4) pada umumnya dimengerti sebagai sejumlah orang atau penduduk yang mempunyai ciri-ciri seperti:

- secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan
- mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya
- membentuk jaringan komunikasi dan interkasi sendiri
- menentukan ciri kelompoknya yang diterima oleh dan dapat dibedakan dari kelompok lain

Lebih lanjut Alqadrie menjelaskan bahwa suatu kelompok etnis atau yang diidentikkan dengan suku bangsa memiliki ciri dan kebersamaan secara inheren dan perbedaan secara eksteren dengan kelompok lain tidak saja karena ia memiliki nilai-nilai budaya tetapi juga bahasa yang khas yang menjadi identitas kelompoknya.

Seperti dijelaskan dimuka bahwa penduduk Kalimantan Timur datang dari berbagai daerah di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam etnis. Menurut penuturan informan kunci bahwa tidak ada suku yang dominan di Kalimantan Timur secara keseluruhan (Aswatini, 2000) Namun demikian data makro yang menunjukkan berapa jumlah penduduk masing-masing etnis tidak tersedia. Gambaran makro tersebut tidak bisa digeneralisir pada masing-masing daerah seperti yang ditemukan di daerah penelitian, dari hasil survai di daerah penelitian ditemukan bahwa sebagian besar penduduk adalah orang Bugis disusul dengan Jawa Timur dan suku-suku lain seperti Banjar, Tator dan penduduk asli Kutai dan Bontang.

5.2.1 Tidak adanya dominasi kelompok etnik

Sementara itu, di kecamatan Bontang Utara, khususnya desa Lok Tuan yang merupakan lokasi dari penelitian ini didiami oleh masyarakat yang majemuk dari berbagai suku bangsa, dengan sebagian besar merupakan suku Bugis (66%). Sementara dari hasil penelitian ini terhimpun data yang menunjukkan bahwa dari 250 orang yang merupakan sampel dalam penelitian ini, hanya sekitar satu persen yang merupakan suku bangsa Kutai yang juga dikategorikan sebagai penduduk asli. Orang Bugis di Bontang merupakan suku bangsa yang mayoritas namun dalam kehidupan sehari-harinya tidak nampak adanya dominasi dalam sosial ekonomi dan tidak merupakan acuan budaya dari sukubangsa yang lain. Menurut Supardi Suparlan (2000: 2) salah satu ciri utama ada tidaknya kebudayaan dominan dalam suatu masyarakat adalah adanya aturan-aturan main atau konvensi sosial dalam berhubungan yang diakui keberadaannya oleh para pelaku dari berbagai kelompok sukubangsa yang hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Bila dalam masyarakat ada kebudayaan dominan maka para pelaku dari kelompok-kelompok suku bangsa yang tidak dominan menyesuaikan diri dengan dan tunduk pada aturan-aturan main yang ditetapkan oleh masyarakat setempat yang dominan.

Pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari di desa Loktuan tidak mengenal adanya kebudayaan dominan, aturan-aturan main yang terwujud merupakan hasil dari interaksi bersama yang berlangsung dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi. Masing-masing suku bangsa mempertahankan kebudayaan dan kesukubangsaaanya, meskipun ada satu suku bangsa yang hidup mengelompok di antara sesama suku bangsanya namun sebagian besar dari mereka hidup berbaur dengan suku bangsa yang lain. Dalam berhubungan sosial mereka mengacu kepada aturan yang telah ada yang berlaku di daerah itu. Mereka bersama-sama aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di tempat mereka tinggal sehingga terdapat kesan bahwa mereka berusaha untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat yang berasal dari suku lain.

Data dari hasil survai menunjukkan keaneka ragaman suku bangsa yang ada di desa Loktuan. Meskipun masing-masing suku bangsa atau etnis mempunyai ciri-ciri kelompok, nilai-nilai budaya maupun identitas yang dapat dibedakan dengan etnis lain, namun dalam hubungan sosial kesehariannya nampaknya dapat

mencerminkan adanya kerjasama antar kelompok. Hal ini barangkali dikarenakan adanya sistem nilai budaya dan orientasi nilai budaya yang menjelma secara konkrit dalam bentuk mentalitas dan perilaku yang cenderung mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dari kelompok yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1985 dalam Alqadri, 2000: 2). Keanekaragaman etnis yang ada cenderung ditunjukkan sebagai potensi sumberdaya manusia yang beragam.

Sikap, mentalitas maupun perilaku yang ditampilkan oleh anggota masyarakat dari kelompok etnis tertentu nampaknya dapat diterima oleh anggota kelompok yang lain sehingga mereka dapat mengadakan hubungan sosial dan mengeliminir munculnya perbedaan-perbedaan. Masing-masing anggota masyarakat cenderung untuk menghormati maupun menerima anggota kelompok atau masyarakat dengan dari etnis lain untuk menciptakan hubungan antar etnis yang serasi. Dalam kehidupan sehari-hari nampak adanya nilai kerjasama dan harmoni yang dapat mewujudkan keserasian sosial sehingga mereka nampaknya dapat hidup dengan aman dan nyaman.

Dari hasil pengamatan maupun wawancara mendalam dengan beberapa tokoh kunci di desa penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat suatu kelompok etnis tertentu yang tinggal mengelompok di suatu permukiman, namun mereka dapat hidup berdampingan dengan anggota masyarakat yang beragam. Misalnya, meskipun ada masyarakat Bugis yang tinggal mengelompok dalam suatu wilayah sebetulnya hal itu bukan berarti bahwa mereka merasa kelompok orang Bugis yang perlu memisahkan diri dari anggota masyarakat dari kelompok etnis yang lain namun lebih dikarenakan latar belakang pekerjaan mereka sebagai nelayan. Adapun yang mendorong mereka untuk tinggal di tempat yang mengelompok atau memisahkan diri dengan kebanyakan masyarakat lain bukan karena mereka ingin membuat kelompok tersendiri. Mereka ini pada umumnya adalah para nelayan yang hidup bersama mengelompok dengan nelayan yang lain karena memang berhubungan dengan pekerjaannya sebagai nelayan yang mengharuskan mereka tinggal terpisah dan secara kebetulan pekerjaan ini didominasi oleh orang Bugis. Pada umumnya mereka tinggal di tepi pantai dengan rumah-rumah panggung. Seiring dengan berjalannya waktu makin banyak rumah panggung baru yang didirikan dipermukiman yang banyak didominasi oleh kelompok orang Bugis tersebut. Dominasi ini muncul karena ada keterikatan hubungan kekerabatan antar keluarga. Mereka biasanya akan menampung saudara-saudara yang akan bekerja di

Kota Bontang untuk sementara sebelum mereka mampu untuk berdiri sendiri. Tingginya rasa kekeluargaan ini terlihat dari adanya saling membantu dalam mendirikan rumah.

Rumah-rumah nelayan ini pada umumnya terbuat dari kayu yang didirikan di atas air di pinggir pantai. Bila ada pendatang baru yang bekerja sebagai nelayan dapat mendirikan rumah di wilayah tersebut asal mendapat izin dari kepala desa. Pada saat membangun rumah ini para warga akan bahu membahu untuk memberikan bantuan.

Ada juga satu komunitas lagi yang hidup mengelompok dalam satu Rukun Tetangga (RT) yaitu masyarakat Toraja atau yang lebih dikenal dengan sebutan orang Tator. Menurut informasi yang ada pengelompokan mereka ini barangkali disebabkan agama mereka yang berbeda dengan mayoritas masyarakat Lok Tuan. Di samping itu mereka ini banyak juga yang memelihara anjing sehingga dengan hidup mengelompok dalam satu RT mereka tidak mengganggu kelompok masyarakat yang lain. Meskipun tinggal mengelompok dalam satu RT tersendiri namun dalam kegiatan sosial mereka tetap melakukan bersama-sama dengan anggota kelompok masyarakat dari suku bangsa yang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari ada kecenderungan di antara anggota masyarakat setempat untuk memahami karakter maupun kebiasaan anggota atau masyarakat kelompok etnis lainnya. Mereka cenderung untuk dapat menerima perbedaan-perbedaan apa adanya serta menekankan pentingnya persatuan berdasarakan kesetiakawanan sebagai sesama anggota masyarakat yang hidup bersama dalam satu permukiman. Hal ini terlihat dari rasa toleransi yang besar apabila ada suatu pergesekan yang akan menimbulkan suatu pertikaian dapat teredam oleh adanya masukan dari anggota masyarakat yang lain bahwa 'memang begitulah watak orang dari etnis itu'. Dengan mengetahui watak masing-masing etnis suatu keresahan ataupun ketidakpuasan yang muncul dapat diatasi.

Meskipun secara persentase etnis Bugis mendominasi desa penelitian ini, namun tidak nampak adanya dominasi baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Mereka juga bukan merupakan acuan bagi masyarakat lainnya. Dengan demikian masing-masing etnis dapat mengembangkan pola-pola hubungan yang berpatokan pada budaya masing-masing. Barangkali karena tidak adanya kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok antar etnis di daerah penelitian yang mendorong keserasian hubungan etnis antara mereka.

Demikian halnya dalam memperebutkan kesempatan kerja yang ada, meskipun ada isu dominasi Jawa tetapi hal ini tidak sampai menimbulkan kurang serasinya hubungan etnis antara mereka. Dalam berhubungan sosial antar etnis, nampaknya lebih membuahkan kerjasama daripada pertikaian yang diakibatkan oleh budaya yang berbeda.

Kesempatan kerja yang banyak diperoleh suku Jawa maupun suku Bugis yang kebanyakan pendatang, nampaknya tidak menjadikan suku Kutai atau Banjar merasa tersingkirkan. Nampaknya ada anggapan bahwa perolehan kesempatan kerja tersebut merupakan suatu yang wajar apalagi bila jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh orang misalnya Jawa atau Bugis. Orang Dayak Kutai yang merupakan penduduk asli cenderung untuk lebih memilih dunianya. Mereka dianggap lebih senang untuk hidup bebas, menyatu dengan alam dan cenderung untuk tidak terikat pada aturan-aturan formal. Dominasi sumber daya ekonomi yang melibatkan etnis tertentu nampaknya tidak menimbulkan adanya prasangka yang berlebihan. Hal ini barangkali disebabkan oleh tidak adanya budaya yang menonjol serta tidak adanya batas-batas etnis yang menonjol sehingga kemajemukan etnis tetap lestari dalam hubungan sosial yang baik melalui arena interaksi yang dapat mengakomodasi sikap-sikap yang bersahabat melalui kegiatan sosial (Suparlan, dkk 1989, dalam Andriati, 2000: 7). Di samping itu, adanya suatu nilai yang dipegang oleh penduduk asli bahwa 'sida bawa berkah' yang artinya pendatang merupakan sumber berkah bagi mereka atau dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka barangkali merupakan salah satu faktor yang mendukung adanya kerukunan antara penduduk asli dengan pendatang pada umumnya.

Nampaknya, keserasian sosial yang ada di desa Lok Tuan yang dihuni oleh berbagai macam suku bangsa tersebut antara lain karena adanya pemahaman nilai budaya harmoni untuk kerjasama dalam kelompok sosial dan antar kelompok sosial. Para pendatang hidup dengan cara-cara yang sesuai dengan adat yang berlaku setempat. Belum nampak adanya pengambil alihan berbagai pekerjaan melalui hubungan-hubungan kerabat, kesukubangsaan dan keagamaan. Pemanfaatan kesempatan kerja yang ada mengikuti mekanisme pasar, di mana setiap orang bebas untuk bersaing dan pasar sendiri yang akan menentukan siapa yang berhak mendapatkannya.

Meskipun dalam kehidupan sehari-hari tidak ada permasalahan atau ketidakserasian karena adanya perbedaan etnis,

namun identitas etnis masih nampak. Hal ini tercermin dari sebutan yang diberikan kepada individu anggota masyarakat kelompok etnis tertentu. Misalnya, bila kita bertanya mengenai seseorang maka yang ditanya akan berbalik kepada penanya dengan menanyakan 'orang apa' (maksudnya menunjuk nama suatu etnis). Sebagai contoh, Pak A orang Bugis atau Pak B yang isterinya orang Jawa. Sebutan ini menunjukkan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat banyak penduduk yang berasal dari berbagai ragam etnis.

Demikian halnya dalam menanggapi adanya isu pertikaian di mana anggota masyarakat kelompok Bugis cenderung membawa parang, maka anggota masyarakat dari suku yang lain akan mengatakan 'biasa orang Bugis yang maju parang duluan'. Ekspresi semacam ini meskipun menunjukkan adanya ciri-ciri suatu etnis namun tidak sampai mencuat menjadi kondisi ketidaksenangan yang berlebihan. Meskipun mereka cenderung untuk menahan diri agar tidak terjadi pertikaian dalam kompetisi memperebutkan sumberdaya yang terbatas. Ada kecenderungan untuk memahami nilai budaya harmoni guna menuju ke bentuk keserasian sosial. Nilai budaya yang cenderung untuk memahami adanya kemajemukan dalam komunitas nampaknya sudah ditanamkan kepada anggota keluarga sejak mereka masih-kanak-kanak. Misalnya, bahwa perangai anggota masyarakat tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan nilai budaya etnis yang lain dapat dipahami. Sejak dini mereka dikenalkan pada bagaimana nilai kebersamaan dan harmoni yang ada pada masing-masing masyarakat tersebut. Hal ini lebih nampak pada keluarga di mana terjadi kawin campur antar etnis. Nilai saling menghargai dalam interaksi sosial nampaknya cukup berkembang dalam proses adaptasi sosial. Hal ini tercermin dalam rendahnya pertikaian antar etnis meskipun mereka tinggal bersama dalam suatu komunitas. Pertikaian yang terjadi nampaknya lebih dipahami sebagai dinamika kehidupan orang muda karena adanya perbedaan etnis. Adanya sosialisasi mengenai keanekaragaman suku bangsa yang dapat membentuk orientasi nilai budaya bersama dan harmoni yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak maupun tokoh masyarakat terhadap masyarakatnya nampaknya dapat mewujudkan keserasian sosial yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Hal ini dikarenakan orientasi nilai budaya dan perilaku dengan tetap menghargai adanya perbedaan, kemajemukan dan relativisme kebudayaan akan meminimalkan konflik sosial serta membentuk keserasian sosial (Andriati, 2000: 13).

Di samping adanya beragam suku bangsa yang mendiami desa Loktuan, masyarakat Loktuan juga terbagi dalam dua komunitas

berdasarkan agama yaitu Islam dan agama Kristen. Apabila dilihat dari segi agama sebagian besar responden merupakan pemeluk agama Islam (89.6 persen), sementara sisanya adalah pemeluk agama Kristen Protestan (10 persen) dan hanya seorang yang beragama Katolik. Dalam kehidupan sehari-hari tidak terdapat kesan adanya jarak sosial yang tegas antara masyarakat yang beragama Islam dengan mereka yang beragama Kristen. Meskipun mereka yang beragama Kristen cenderung mengelompok dalam satu Rumah Tangga (RT), namun hal ini nampaknya tidak mengganggu kehidupan warga yang lain. Menurut wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat setempat, diperoleh keterangan bahwa kerukunan beragama di antara mereka cukup tinggi dan salah satu wujud dari kerukunan tersebut antara lain terlihat dari adanya saling berkunjung di antara mereka pada hari-hari besar keagamaan terutama hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal.

Nampaknya, mengelompoknya masyarakat pemeluk agama minoritas seperti orang Tator yang beragama Kristen, pada dasarnya mereka bukan mengelompok bukan karena tersingkirkan oleh mayoritas anggota masyarakat pemeluk agama Islam namun lebih didasarkan pada alasan bahwa mereka tidak mau mengganggu kelompok agama lain. Maksudnya, kebanyakan orang Tator memelihara anjing padahal anjing merupakan binatang yang tidak diperbolehkan dipelihara oleh orang Islam, oleh karena itu orang Tator cenderung memilih untuk mengelompok di antara mereka sendiri agar tidak mengganggu anggota masyarakat pemeluk agama lain terutama pemeluk agama Islam.

5.2.2 Bahasa Sebagai Ekspresi Toleransi Antar Etnik

Pada umumnya, bahasa merupakan suatu ekspresi identitas diri. Misalnya, orang Bugis kebanyakan akan berbahasa Bugis atau etnis Jawa akan berbahasa Jawa sehingga orang lain akan dapat dengan mudah untuk menebak dari suku bangsa apa orang yang bersangkutan. Namun demikian, di daerah penelitian kemajemukan masyarakatnya mengakibatkan bercampurnya aneka bahasa dan bahasa yang digunakan sehari-hari pada umumnya bukan bahasa mereka sendiri tetapi lebih kepada bahasa nasional. Hal ini terbukti dalam bahasa yang digunakan sehari-hari bila berhubungan satu sama lain adalah bahasa Indonesia terutama antara anak-anak dengan orang tua. Menurut keterangan beberapa responden hal ini dikarenakan untuk menyiapkan anak-anak mereka dalam bersosialisasi dengan anggota masyarakat yang lain. Anak-anak

mereka dilepaskan untuk bergaul dengan bebas dengan teman-teman di lingkungan sekolah dan tetangga di kampung serta cenderung berbahasa nasional sehingga mereka dapat berbaur dengan sesama.

Para migran yang berasal dari berbagai suku bangsa hidup dalam lingkungan komuniti yang berbaur. Mereka hidup berdampingan dalam suatu hubungan simbiotik yang saling menguntungkan. Keserasian hubungan sosial antar etnis juga diwujudkan dengan adanya kawin antar etnis (amalgamasi). Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa tokoh kunci maupun pengamatan selama penelitian, tidak nampak adanya keawatiran akan kehilangan identitas etnis masing-masing meskipun mereka kawin campur dengan etnis lain. Meskipun dalam upacara maupun pesta pernikahan kebanyakan dengan menggunakan adat masing-masing calon pengantin, hal ini lebih ditekankan pada pempratekkan budaya etnis masing-masing serta menunjukkan keragaman budaya antar etnis agar mereka saling mengenal, bergaul maupun pemenuhan berbagai persyaratan adat.

Hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan beberapa responden yang kawin antar suku diperoleh keterangan bahwa anak-anak tersebut cenderung mengidentifikasi diri mereka sebagai Orang Loktuan. Kalau kepada mereka ditanyakan apakah orang tua mereka orang Bontang, baru mereka menjawab bahwa mereka mempunyai bapak yang asalnya dari suatu suku tertentu dan juga ibunya dari suku yang lain.

Sebagai perwujudan toleransi antar etnis dalam kawin campur antara lain adalah pesta pernikahan yang diadakan biasanya mengikuti adat kedua belah pihak. Di samping itu, terjadinya percampuran budaya juga terefleksi dari bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Salah satu contoh adalah kasus keluarga Pak N

Kasus Pak N misalnya, keluarganya yang multietnis (Pak N orang Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan sementara isterinya orang Jawa Timur) dalam kehidupan sehari-hari tidak mengharuskan ketiga anaknya untuk berbahasa salah satu dari bahasa orang tuanya. Dalam sehari-harinya anak-anak mereka berbahasa Indonesia baik kepada orang tua maupun dengan anggota masyarakat yang lain. Tidak demikian halnya dengan Pak N dan isterinya. Pak N selalu berusaha untuk berbahasa Jawa dengan isterinya sementara isterinya berusaha untuk

berbahasa Bugis dengan Pak N. Ketika kepada masing-masing ditanyakan alasannya diperoleh informasi bahwa Pak N akan lebih mudah berkomunikasi dengan sesama teman kerjanya yang kebetulan mayoritas orang Jawa. Sementara kalau Bu N yang orang Jawa berusaha praktek berbahasa Bugis dengan suaminya agar lebih mudah berkomunikasi dengan para langganan warungnya yang mayoritas orang Bugis (Bu N mempunyai warung kelontong di rumahnya). Satu hal yang menarik dari anak-anak keluarga ini menurut penuturan dari Bu N adalah bila di luar (dalam pergaulan) anaknya mengaku sebagai orang Jawa karena ada semacam anggapan bahwa orang Jawa itu lebih halus dalam bertutur kata dan pergaulan. Namun demikian apabila dalam situasi yang kira-kira dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya (pertengkaran) maka si anak tersebut mengaku dirinya orang Bugis karena sebagai Orang Bugis dikenal sebagai orang yang pemberani.

Di samping pemakaian bahasa nasional, dalam komunikasi sehari-hari di dalam masyarakat nampak pula adanya pertukaran bahasa. Maksudnya, seseorang mencoba untuk memakai bahasa lawan bicaranya. Hal ini terutama nampak pada pedagang terutama pedagang yang tinggal di permukiman. Dalam berkomunikasi dengan pembeli, si penjual cenderung akan menggunakan bahasa daerah si pembeli. Misalnya, pedagang akan berusaha memakai bahasa yang digunakan oleh pembelinya. Demikian halnya bila ketemu dengan orang yang diketahuinya berasal dari suku tertentu maka orang tersebut akan berusaha untuk memakai bahasa yang digunakan oleh orang lain itu. Sebagai contoh, kepala desa setempat ketika mengetahui peneliti berasal dari Jawa maka dalam berkomunikasi beliau mencoba menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jawa.

5.2.3. Organisasi Sosial yang berorientasi etnik

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan kunci diperoleh keterangan bahwa masing-masing etnis memiliki organisasi sosial yang berhubungan dengan kesamaan identitas etnisnya. Misalnya, etnis Jawa membentuk organisasi paguyuban warga Jawa di Bontang dan etnis Makasar juga mempunyai organisasi. Salah satu fungsi dari organisasi sosial ini adalah untuk lebih mengenal sesama

prantau yang berasal dari suku bangsa yang sama. Di samping itu, dengan adanya organisasi sosial ini lebih mempermudah para pendatang baru untuk memperoleh pertolongan apabila mereka dalam kesulitan pada saat pertama kali mereka tiba di daerah perantauan tersebut. Ikatan-ikatan warga etnis perantau ini mencerminkan adanya kecintaan mereka terhadap ragam budaya yang mereka miliki.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi sosial yang mereka bentuk kebanyakan adalah kegiatan sosial di mana lebih ditekankan pertunjukan seni pada acara-acara tertentu, arisan, pengajian maupun membantu sesama anggota organisasi yang sedang memerlukan bantuan. Menurut salah seorang pengurus organisasi sosial dari suku Jawa diperoleh informasi bahwa organisasinya atau yang lebih dikenal dengan paguyubannya lebih menekankan pada acara silaturahmi untuk saling mengenal satu sama lain. Meskipun lahirnya ikatan-ikatan etnis tersebut adalah untuk menunjukkan adanya kebanggaan karena mereka berasal dari satu etnis namun tidak nampak adanya eksklusivitas di antara mereka sehingga tidak ada perilaku yang mengganggu keharmonisan pergaulan dengan etnis lain. Tidak nampak adanya sentimen etnis yang berlebihan yang dapat menghambat tumbuhnya kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Berhubung dengan kesibukan masing-masing anggota, kegiatan yang ada tidak seintensif seperti pada saat awal dibentuknya organisasi atau paguyuban tersebut.

5.3 Tingginya toleransi antar etnik dalam suatu komunitas yang beragam

Para pendatang yang tinggal di daerah penelitian meskipun berasal dari beragam etnis tetapi mereka mempunyai rasa toleransi yang besar terhadap anggota masyarakat yang berasal dari etnis lain. Di dalam kehidupan sosial bermasyarakat tidak terlihat adanya gejala nilai-nilai suku bangsa tertentu yang menjadi acuan dalam kehidupan mereka berusaha untuk saling menghormati dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Munculnya rasa toleransi ini barangkali didasari adanya rasa bahwa kedatangan mereka ke daerah tersebut adalah karena sama-sama ingin mencari makan. Kalaupun kepada mereka ditanyakan apakah ada suku tertentu yang mendominasi atau berhasil menguasai pasar kerja, mereka menjawab bahwa itu sudah menjadi 'porsi' mereka masing-masing dan mereka layak mendapatkannya. Meskipun ada kecenderungan bahwa etnis Jawa mendominasi pekerjaan di perusahaan Pupuk Kalimantan Timur (PKT) misalnya, namun hal ini tidak menimbulkan adanya

kecemburuan yang berlebihan. Mereka menganggap bahwa Orang Jawa layak bekerja di perusahaan itu karena mereka memang punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan'. Ada anggapan dari mereka bahwa masing-masing individu dari masing-masing etnis sudah mempunyai jatah masing-masing. Misalnya, Orang Jawa memegang pekerjaan yang menuntut skill tinggi seperti di perusahaan, Orang Bugis mendominasi pekerjaan kasar sementara Orang Asli (Kutai dan Bontang Kuala) banyak yang mengontrakkan rumah.

Kehidupan sosial mereka ditandai oleh saling adanya usaha untuk adaptasi terhadap lingkungan sosial. Mereka mengikuti aturan main yang disetujui bersama dan diikuti sebagaimana seharusnya. Sebagai desa yang memiliki kekayaan suku bangsa, nampak adanya keharmonisan hubungan yang mendukung adanya integrasi sosial. Keragaman etnis yang dimiliki merupakan kekayaan yang lebih mencerminkan pada suatu kesatuan sosial dan budaya. Berbagai corak dan ragam budaya yang ada menunjukkan adanya keharmonisan hubungan yang bersifat mutualis.

Memudarnya keterikatan etnik dalam kegiatan ekonomi

Di antara para anggota kelompok etnis terdapat adanya keterikatan-keterikatan sosial terhadap sesama anggota kelompok etnisnya. Hal ini terlihat tidak hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan melalui organisasi sosial yang berorientasi etnis tetapi juga dalam hal kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti bila ada informasi mengenai peluang kerja mereka cenderung untuk memberikannya kepada kerabat atau teman sesama etnis. Demikian halnya dalam hal perekrutan tenaga kerja mereka cenderung mengajak teman sesama etnis untuk bekerja padanya. Alasan yang dikemukakan kebanyakan karena adanya rasa percaya dan mereka merasa sudah mengetahui 'watak' atau 'etos kerja' dari sesama etnis. Di samping itu mereka menganggap bahwa hal ini berarti menolong sesama suku yang belum mendapatkan pekerjaan di perantauan. Namun demikian, saat ini nampaknya keterikatan-keterikatan tersebut terasa tidak sekuat dahulu. Dalam mencari tenaga kerja mereka tidak lagi mementingkan dari suku mana orang tersebut berasal namun lebih didasarkan kepada alasan kejujuran dan kemauan untuk bekerja keras dari yang yang bersangkutan.

Contoh dari mudahnya keterikatan etnik dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari kasus Pak S di bawah ini:

Pak S yang Orang Jawa datang ke Bontang pada tahun 1983. Ketika pertama kali datang ke tempat itu Pak S mempunyai usaha membuat tahu tempe dengan mempekerjakan 8 orang yang semuanya berasal dari Jawa. Alasannya adalah mereka sudah mengenal 'watak' dan 'cara kerja' orang yang dari daerah yang seasal. Dalam berusaha menurut Pak S tidak mau mengambil resiko dengan mempekerjakan orang dari daerah lain yang belum dikenal cara kerjanya. Sejalan dengan berkembangnya usaha Pak S di mana sekarang usaha tahu dan tempenya menjadi besar, Pak S juga mempunyai usaha pertokoan serta usaha supply barang dari Jawa Pak AS tidak lagi mempekerjakan hanya orang-orang dari Jawa saja tetapi berbagai ragam. Menurutnya, setelah lama bergaul dengan sesama anggota masyarakat meskipun berlainan suku bangsa mereka dapat bekerjasama. Dalam merekrut tenaga kerja tidak lagi didasarkan pada suku bangsa yang bersangkutan tetapi lebih kepada kemauan kerja dan kejujuran orang tersebut.

5.4 Potensi munculnya konflik sosial

Walaupun konflik juga terjadi di antara mereka yang berasal dari suku bangsa yang berlainan namun mereka lebih menonjolkan jati diri sebagai perorangan daripada suku bangsanya. Misalnya, di daerah tersebut pernah terjadi suatu konflik antar pemuda dari kelompok suku bangsa tertentu namun masyarakat setempat lebih melihatnya sebagai persoalan anak muda yang kebetulan berasal dari suatu suku bangsa tertentu dari pada memandangnya sebagai perseteruan antar suku bangsa. Walaupun ada stereotipe yang mengacu kepada suatu etnis tertentu di mana individunya cenderung untuk berperangai 'keras' maka ketika hal ini ditanyakan kepada mereka ada kecenderungan untuk dijawab bahwa 'tidak ada yang bisa mengatur pada suku mana kita dilahirkan karena hal ini merupakan pemberian Allah'.

Mekipun diatas telah diuraikan mengenai berbagai bentuk kerjasama maupun akomodasi sebagai konsekuensi hubungan antar kelompok, namun demikian potensi munculnya suatu konflik merupakan kemungkinan yang tidak terhindarkan dalam setiap hubungan antar kelompok tersebut. Adanya kompetisi dalam memperebutkan kesempatan kerja yang ada ataupun dominasi kelompok etnik pendatang terhadap penduduk setempat atas sumber-sumber ekonomi cenderung bertanggung jawab bagi lahirnya ketidakpuasan yang akhirnya menimbulkan konflik etnis (Alqadrie, 2000: 3). Rasa kecemburuan masyarakat terhadap 'kenikmatan' yang diperoleh kelompok pendatang (orang Jawa) yang bekerja sebagai karyawan tetap di PKT bila tidak diantisipasi dapat merupakan salah faktor yang dapat memicu timbulnya konflik. Adanya demonstrasi yang minta kebijakan perusahaan PKT untuk menerima karyawan dari penduduk lokal merupakan salah satu bentuk adanya kecemburuan tersebut.

Rasa tenggang rasa yang untuk mentolerir perilaku yang cenderung dilakukan oleh sekelompok etnis tertentu tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu ketidaksenangan atau ketidakpuasan yang pada akhirnya dapat menyulut timbulnya suatu konflik sosial. Misalnya, kebiasaan Orang Bugis yang tidak mau membersihkan tempat Mandi Cuci Kakus (MCK) milik bersama seperti yang dikemukakan oleh seorang Ibu di RT 8 desa Loktuan barangkali merupakan suatu contoh yang merupakan indikasi adanya rasa ketidak senangan pada perilaku kelompok etnis tertentu. Dari wawancara dengan beberapa informan di RT ini diperoleh keterangan bahwa ada sebuah fasilitas MCK yang dipergunakan bersama anggota suatu RT. Namun demikian, orang dengan mudah akan mengidentifikasi siapa pemakai sebelumnya karena ada kebiasaan bahwa warga suku tertentu sehabis memakai fasilitas tersebut tidak mau membersihkan sebagaimana yang diharapkan. Demikian halnya toleransi atau akomodasi terhadap perilaku orang Bugis yang mempunyai kebiasaan 'maju parangnya duluan', tentunya dalam batas-batas tertentu dapat ditolerir tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa toleransi tersebut akan melemah. Demikian juga halnya dengan kasus perambahan hutan ataupun pemindahan patok yang dilakukan orang sekelompok orang Bugis tentunya bila dibiarkan berlarut-larut atau jika keadaan ini berakumulasi dengan kasus-kasus atau persoalan yang lain, meletupnya suatu konflik tinggal menunggu waktu.

BAB VI

POLA PEKERJAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pola pekerjaan dan hubungan kerja yang tumbuh di daerah penelitian erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah dan pola migrasi yang terjadi di Bontang. Kebijakan pemerintah dengan membangun wilayah Bontang menjadi daerah industri, dengan didirikannya berbagai industri besar seperti PT Pupuk Kaltim dan PT Badak telah membuka peluang kerja dan menjadikan Bontang menjadi salah satu tujuan calon tenaga kerja untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Kedatangan tenaga kerja migran ditandai dengan masuknya migrasi penduduk usia produktif. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15-34 tahun) lebih tinggi dari penduduk umur 15-34 Kalimantan Timur secara keseluruhan berturut-turut 43,6 dan 39,3. Pada umumnya tenaga migran tersebut tertarik bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang.

Pembangunan industri di wilayah ini selain berpengaruh pada tingginya penduduk pada usia kerja juga berpengaruh terhadap keanekaragaman etnis penduduknya. Pembangunan industri telah menarik pendatang dari berbagai daerah di wilayah Indonesia. Menurut ketua Bappeda Bontang hampir semua suku yang ada di Indonesia dapat ditemukan di wilayah ini. Hal tersebut juga ditunjang oleh data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 15 suku yang tinggal di Loktuan. Adapun Bugis, Jawa dan Banjar merupakan suku yang paling banyak di desa ini. Keanekaragaman suku dimana masing-masing suku mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda akan menambah wawasan antar suku yang berhubungan dengan pekerjaan. Namun demikian gesekan-gesekan karena perbedaan nilai, tingkah laku kemungkinan juga dapat terjadi. Kemungkinan negatif ini perlu diantisipasi untuk tidak mengganggu kelangsungan kerja maupun hubungan kerja yang dilakukan.

6.1 Pola pekerjaan

Pola pekerjaan yang akan didiskusikan di sini menyangkut lapangan usaha, status pekerjaan baik Kalimantan Timur secara keseluruhan maupun potret daerah penelitian. Secara keseluruhan sebagian besar penduduk Kalimantan Timur bekerja sektor jasa

meliputi 40,6 persen dan disusul oleh sektor pertanian meliputi 37,5 %. Adapun penduduk yang bekerja di sektor industri menempati posisi yang paling rendah yaitu hanya 21,9 persen. Keadaan ini berbeda dengan potret daerah penelitian. Pembangunan Bontang menjadi pusat industri telah menumbuhkan berbagai lapangan usaha. Sektor industri merupakan sektor yang paling tinggi dalam menyerap tenaga kerja. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penduduk umur 15 tahun keatas yang bekerja sebagai karyawan perusahaan meliputi 48 %. Keadaan ini sejalan dengan peluang kerja yang ada di Bontang dan aspirasi para migran yang datang di daerah ini untuk mendapatkan pekerjaan di sektor industri. Lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja cukup banyak adalah sektor jasa seperti perdagangan meliputi 36 %, transportasi seperti ojek dan sopir 7 % sedangkan pegawai negeri hanya 4 orang saja atau 1%. Perkembangan penduduk yang cukup tinggi di Bontang yang mencapai 6,2% pada tahun 1999 telah mendorong tumbuhnya sektor informal antara lain warung makan dan penjual pakaian.

Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling rendah. Penduduk yang bekerja pada sektor ini hanya meliputi sekitar 5% saja. Sebagian besar adalah bekerja sebagai petani yang meliputi lebih dari 4% dan yang bekerja sebagai nelayan hanya 4 orang saja. Rendahnya penduduk yang bekerja sebagai petani tidak mengherankan mengingat daerah penelitian merupakan daerah industri. Selain itu wilayah kota Bontang sangat terbatas untuk di kembangkan sebagai tanah pertanian. Sedangkan sedikitnya penduduk yang bekerja sebagai nelayan karena daerah penelitian merupakan desa dekat pusat industri sedangkan para nelayan pada umumnya tinggal di daerah pantai.

Status pekerjaan responden pada umumnya bekerja sebagai buruh atau karyawan meliputi 50 %. Tingginya prosentase responden yang mempunyai status ini karena pada umumnya mereka merupakan pekerja di perusahaan ataupun pabrik maupun usaha jasa seperti hotel. Sedangkan responden yang mempunyai status pekerjaan bekerja sendiri meliputi 29% dan responden yang bekerja dengan status dibantu anggota keluarga adalah 17 %, sedangkan mereka yang berstatus sebagai pekerja keluarga sebanyak 5 %. Pada umumnya yang mempunyai status pekerjaan ini adalah mereka yang membantu usaha perdagangan maupun jasa keluarga.

6.2 Hubungan kerja

Pada penulisan ini hubungan kerja diartikan sebagai hubungan antara individu dengan individu maupun individu dengan institusi dalam menghasilkan barang dan jasa maupun memperoleh keuntungan. Hubungan kerja ini dapat bersifat formal dan informal. Hubungan kerja dengan institusi seperti perusahaan dan jasa berskala besar pada umumnya bersifat formal. Sedangkan hubungan kerja yang bersifat informal pada umumnya dilakukan oleh industri berskala kecil ataupun jasa baik perdagangan ataupun layanan. Mengingat sebagian besar penduduk di Loktuan bekerja pada perusahaan yang pada umumnya bersifat formal dan perdagangan, industri kecil maupun jasa yang bersifat non formal maka hubungan kerja yang akan dilihat akan difokuskan pada kedua sistem hubungan tersebut.

6.2.1 Hubungan kerja formal

Diskusi hubungan kerja bersifat formal difokuskan pada hubungan kerja di perusahaan dan jasa skala besar terutama PKT dan salah satu hotel berbintang. Adapun isu yang akan dibahas yang berkaitan dengan hubungan kerja di sektor ini adalah isu kolusi dan dominasi etnis. Isu kedua adalah ketidaksinambungan hubungan kerja karena sistem hubungan kerja dilakukan secara kontrak.

Seperti telah dikemukakan di muka bahwa hubungan kerja pada sektor industri pada umumnya sangat formal, mulai dari sistem rekrutmen tenaga kerja sampai dengan sistem pengupahan. Persyaratan untuk menjadi tenaga kerja pada sektor ini telah tertentu dan pada umumnya di tentukan oleh pemerintah pusat dan berlaku secara nasional namun terkadang implementasinya tidak sama antara daerah satu dan lainnya. Namun demikian sistem hubungan kerja termasuk diantaranya perekrutan tenaga kerja di sektor industri ini telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan yang terjadi di Bontang maupun perubahan tatanan pemerintahan.

Dominasi etnik dan kolusi di perusahaan besar ?

Hubungan kerja yang sifatnya formal di perusahaan besar yang ada di Bontang terutama di perusahaan Pupuk Kaltim (PKT) telah memunculkan isu bahwa telah terjadi dominasi etnis tertentu dan kolusi dalam penerimaan pegawai. Isu kolusi dan isu dominasi etnis tertentu tidak saja terjadi di daerah Bontang tetapi isu ini telah menjadi

isu yang hangat di berbagai daerah di Indonesia terutama pada era reformasi. Isu dominasi etnis Jawa dan kolusi dalam penerimaan pegawai di Bontang ini dimunculkan oleh sementara warga pendatang pada dua tahun terakhir ini seiring dengan era reformasi.

Menurut hasil penelitian (Pemkot dan P3 W, 1999) dan keterangan humas PKT jumlah karyawan PKT yang berasal dari Jawa adalah sekitar 50 persen. Banyaknya etnis Jawa di PKT tidak terjadi secara mendadak tetapi mempunyai sejarah yang panjang. Keadaan ini tidak terlepas dari perkembangan kota Bontang itu sendiri. Pada saat industri ini didirikan, kota Bontang masih belum berkembang, penduduk masih sangat sedikit yang terdiri dari penduduk Bontang Kuala, Suku Kutai dan pendatang dari berbagai daerah lainya yang jumlahnya masih relatif sedikit. Seperti yang telah diterangkan diatas penduduk Bontang Kuala dan Suku Kutai merupakan penduduk asli Bontang. Sedangkan penduduk pendatang yang telah bermukim disitu merupakan asal mula yang dianggap sebagai orang lokal¹⁾. Rata-rata pendidikan penduduk pada waktu itu masih rendah. Orang Bontang Kuala mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan bertempat tinggal di tepi pantai dengan rumah-rumah panggungnya. Orang Kutai, pada umumnya tinggal di pedalaman dan bekerja sebagai petani ladang berpindah. Pada waktu itu penduduk lokal pada umumnya bekerja pada perusahaan penebangan kayu (HPH) yang dikelola oleh Jepang. Namun demikian setelah 5 tahun HPH ini berhenti karena hutan telah habis.

Pada tahun 1973-1974 Pembangunan pabrik dimulai dengan bongkar muat alat-alat berat untuk pembangunan pabrik. Pada saat PKT melakukan kegiatan kontruksi gedung maupun pabrik perekrutan pegawai tidak dilakukan secara formal, tidak menggunakan lamaran resmi hanya berdasar saling kenal dan kualifikasi juga tidak ketat. Hal ini mengingat ketersediaan tenaga kerja sangat terbatas. Menurut informasi Bapak FR tokoh masyarakat yang telah lama tinggal di daerah ini menuturkan bahwa pada waktu itu mencari tenaga kerja sangat sulit, siapa yang saya kenal dan ingin bekerja langsung bisa masuk. Penduduk lokal banyak yang terlibat pada masa kontruksi pabrik ini. Mereka bekerja dengan sistem kontrak dan dengan upah yang relatif tinggi. Menurut penuturan salah seorang informan penghasilan yang diperoleh pada saat itu dalam satu bulan mencapai

¹⁾ Untuk selanjutnya demi untuk memudahkan akan dipakai istilah penduduk lokal. Adapun mereka para pendatang yang bekerja di PKT meskipun telah bermukim di Bontang dalam waktu yang lama akan disebut sebagai pendatang dalam tanda petik ('pendatang').

Rp 600.000 s/d Rp 1 000.000. Namun demikian penduduk asli tidak banyak yang terlibat dalam masa konstruksi ini.. Penduduk asli merasa tidak cocok dengan pekerjaan ini, karena latar belakang sosial budaya yang berbeda. Stereotipe pekerjaan penduduk asli yang menyatu dengan alam, tidak di batasi oleh jam kerja tertentu dan tidak dapat diperintah oleh orang lain merupakan sebab mengapa mereka tidak mau terlibat. Selain itu sumber daya alam masih melimpah pada saat itu, hidup sebagai nelayan maupun petani traditional sudah cukup untuk penghidupan mereka.

Pada perkembangan selanjutnya setelah pekerjaan konstruksi PKT selesai dan proses industri mulai beroperasi perekrutan pegawai dilakukan secara formal dengan kualifikasi tertentu seperti adanya persyaratan pendidikan maupun ketrampilan untuk mengisi spesialisasi pekerjaan tertentu. Adapun besarnya upah mengikuti struktur gaji pegawai yang ditentukan oleh pemerintah. Perekrutan pegawai tetap untuk tingkat manajer dan sarjana telah ditunjuk dari pusat. Pada tahun 1979 jumlah pegawai di PKT sebanyak 91 orang.

Mengingat persediaan tenaga kerja terdidik dan trampil di kota Bontang pada waktu itu masih terbatas perekrutan operator dilakukan di Jawa dan Kalimantan Timur seperti Samarinda, Tarakan dan Balikpapan. Perekrutan pegawai dari Kalimantan Timur kurang mendapatkan respon yang bagus dilihat dari jumlah pendaftar yang sangat sedikit Calon pegawai yang terdaftar di Samarinda hanya 5 orang, Tarakan 8 orang dan Balikpapan meliputi 15 orang. Secara keseluruhan jumlah pendaftar 309 orang yang sebagian besar dari Jawa. Setelah menjalani testing ternyata calon pegawai yang lulus adalah 109 orang. Adapun dari 109 orang calon pegawai yang diterima tersebut, ternyata yang mau ditempatkan di Bontang hanya 5 orang saja yang semuanya orang Jawa. Alasan utama pengunduran diri tersebut karena lokasi kota Bontang yang jauh, sepi dan infrastruktur disekitar komplek pabrik belum tersedia dan gaji yang tidak memadai. Keadaan ini merupakan awal penyebab mengapa banyak pendatang dari pulau Jawa yang seakan mendominasi bekerja pada pupuk Kaltim.

Penduduk lokal dan penduduk asli tidak banyak terlibat dalam masa operasinya PKT karena gaji yang ditawarkan terlalu murah. Menurut keterangan humas PKT pada waktu itu gaji pada tingkat menejer hanya mencapai Rp 67.000 sedangkan tingkat upah bekerja di perusahaan kayu maupun penebangan kayu jauh lebih tinggi dapat mencapai Rp 800.000-1000 000 setiap bulannya. Sehingga banyak penduduk lokal yang lebih memilih bekerja pada perusahaan kayu

yang tersebar diluar kota Bontang dan tidak menerima tawaran untuk menjadi pegawai pada perusahaan PKT ini. Keadaan ini dibenarkan oleh beberapa orang warga Loktuan yang dahulu pernah mendapat tawaran untuk menjadi pegawai pada pupuk Kaltim, seperti yang dituturkan oleh Bapak NZ pendaang dari suku Bugis beristri orang Jawa yang mengatakan :

'ketika pekerjaan kontrusi telah selesai, saya mendapat tawaran untuk terus bekerja di perusahaan ini, namun saya menolak karena gaji yang rendah. Pada waktu itu kesempatan kerja di sekitar kota Bontang masih banyak dengan gaji jauh lebih tinggi dari bekerja pada pupuk Kaltim. Saya memilih bekerja diluar kota Bontang. Demikian pula beberapa teman yang lain juga seperti saya.

Namun keadaan sekarang telah berubah dengan surutnya industri kayu di Bontang dan sekitarnya banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan lapangan kerja menjadi terbatas. Dilain pihak perusahaan PKT telah berkembang dengan memberikan gaji yang cukup tinggi dan fasilitas yang cukup memadai kepada para pegawainya antara lain fasilitas tempat tinggal di komplek perumahan yang eksklusif. Beberapa informan yang tidak menerima tawaran untuk bekerja di perusahaan pada umumnya kecewa setelah melihat perkembangan pupuk Kaltim terutama melihat kesejahteraan pegawainya.

Isu kolusi berkembang berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan terutama PKT. Selama bertahun-tahun perekrutan tenaga kerja dilakukan sendiri oleh perusahaan baik perekrutan yang dilakukan diluar daerah seperti di universitas di Jawa maupun perekrutan di daerah Bontang tanpa melibatkan Kantor Depnaker. Beberapa informan menuturkan bahwa pengumuman lowongan pekerjaan hanya ditempelkan di kawasan industri. Sehingga informasi penerimaan tenaga kerja hanya di dengar atau diketahui terlebih dahulu oleh penduduk yang tinggal di daerah kawasan industri atau bekerja pada industri tersebut. Pada umumnya mereka yang mengetahui informasi tersebut kemudian menyebarkan kepada teman atau saudaranya baik yang sudah berada di Bontang maupun yang masih ada di daerah asal. Seperti yang dituturkan oleh Bpk Fr orang Bugis yang bekerja di salah satu perusahaan menyatakan bahwa 'kalau ada informasi penerimaan pegawai di perusahaan, saya segera memberitahukan kepada kenalan maupun saudara saya yang mempunyai pendidikan maupun

ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk melamar'. Begitu pula yang dilakukan oleh pegawai lainnya baik yang berasal dari Jawa maupun daerah lainnya. Sehingga kelihatan pekerja yang diterima pada perusahaan tersebut hanya dari kalangan orang dalam saja baik dari suku Jawa maupun dari suku Bugis atau dari suku yang lain. Namun berhubung pada mulanya kebanyakan karyawan perusahaan terutama PKT berasal dari Jawa, sehingga karyawan yang diterima kebanyakan orang Jawa juga. Hal inilah yang menimbulkan isu tentang kolusi bahkan penduduk lokal mempunyai kata-kata sindiran 'kursi sudah dipersiapkan sebelum calon tenaga kerja datang'

Permasalahan tentang kolusi itu sendiri masih di perdebatkan oleh berbagai pihak didalam seminar maupun di beberapa tulisan di surat kabar. Sebagian berpendapat bahwa kolusi tidak menjadi masalah kalau untuk tujuan kebaikan. Mengajak teman atau saudara yang mempunyai spesialisasi ketrampilan tertentu dan profesional untuk bekerja sama tidak merupakan hal yang salah. Karena biasanya bekerja sama dengan teman yang telah diketahui lebih mudah dalam menyesuaikan diri dan mempercepat pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun demikian kolusi juga bisa berarti negatif jika bertujuan untuk menarik keuntungan pribadi.

Kecemburuan penduduk sebagai akibat dari perekrutan pegawai PKT yang tidak terbuka sehingga hanya para pendatang saja yang mendapat akses juga telah terjadi. Perekrutan yang tidak terbuka yang lebih memberikan akses kepada teman maupun saudara sesama daerah asal ini kemungkinan sudah tidak cocok lagi dengan situasi kota Bontang saat ini, dimana keadaan sosial ekonomi penduduk telah berubah. Jumlah penduduk kota Bontang telah meningkat dengan pesat dan pendidikan penduduk telah mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk pesat ini menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan terutama di PKT semakin tinggi. Hal ini mengingatkan bahwa bekerja di perusahaan terutama PKT merupakan dambaan bagi banyak warga di kota Bontang. Selain itu peningkatan pendidikan penduduk lokal yang telah terjadi di Bontang salah satunya juga didorong oleh berdirinya industri di Bontang. Sebagian besar penduduk telah menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat SLTA bahkan mereka yang mampu telah mengirim anaknya untuk melanjutkan sekolah ke luar daerah baik di Jawa maupun ke Ujung pandang dengan harapan bahwa anaknya akan dapat diterima bekerja sebagai pekerja tetap di perusahaan-perusahaan di Bontang. Namun demikian harapan untuk bekerja di perusahaan bagi sebagian

besar penduduk lokal ini belum tercapai. Ketidak terlibatan sebagian penduduk lokal yang telah berpendidikan tidak disebabkan karena permainan perekrutan tenaga kerja melainkan lebih disebabkan karena kesempatan kerja yang terbatas terutama di lingkungan PKT. Pertumbuhan kesempatan kerja di PKT sendiri sangat rendah pada tahun 1985 pekerja di PKT sebanyak 2400 sedangkan pada tahun 2000 ini pegawai di PKT hanya 2517. Berarti selama 15 tahun pertambahan kesempatan kerja kurang lebih hanya 117. Sebagian pekerja PKT saat ini masih merupakan pekerja lama yang direkrut sebelum kota Bontang mengalami perkembangan pesat.

Kecemburuan penduduk lokal juga disebabkan karena ada anggapan bahwa penduduk pendatang pada umumnya dapat menjadi tenaga permanen di lingkungan PKT sedang penduduk lokal hanya terlibat pada pekerjaan sifatnya kontrak sehingga tingkat upah yang tinggi dan fasilitas kesejahteraan hanya dinikmati oleh para pendatang. Keadaan ini telah menjadikan perbedaan sosial ekonomi yang cukup mencolok antara penduduk lokal dengan penduduk yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar tersebut. (Pemkot dan P3W, 1999). Menurut humas PKT seperti yang telah dikemukakan dimuka bahwa definisi penduduk lokal dan pendatang tidak jelas. Definisi penduduk lokal tidak memasukkan warga tinggal di komplek atau BTN. Padahal sebagian besar penduduk yang tinggal di komplek telah tinggal bertahun-tahun sejak berdirinya industri ini. Dengan demikian dominasi penduduk pendatang bekerja secara tetap di PKT sebetulnya tidak tepat.

Isu kecemburuan dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini juga dipicu oleh adanya sebagian perusahaan kontraktor bahkan membawa pegawai-pegawainya dari luar daerah, sehingga penduduk lokal tidak dapat peluang untuk bekerja dan menuntut untuk memulangkan pegawai-pegawai tersebut dan menerima penduduk lokal. Namun demikian sebagian informan mempunyai pendapat lain. Perekrutan pegawai oleh perusahaan kontraktor tidak bisa dipersalahkan karena pekerjaan mereka harus selesai tepat pada waktunya. Sehingga mereka menggunakan pegawainya sendiri yang mempunyai ketrampilan sesuai dengan bidangnya dan sudah cocok dengan cara kerjanya

Hubungan kerja secara formal selain ditemukan pada industri besar juga dilakukan di hotel Sintuk yang berlokasi di dalam kawasan Industri Pupuk Kaltim. Menurut seorang informan perekrutan pegawai dilakukan dengan resmi menggunakan surat lamaran. Namun demikian sistem kekerabatan juga masih kental dalam penerimaan

pegawai terutama pada posisi bawah seperti satpam, tukang sapu, pembersih kamar hotel (roomboy). Seorang informan mengatakan bahwa isterinya yang telah bekerja di hotel selalu menginformasikan kepada saudara atau tetangga yang berasal dari daerah yang sama untuk melamar pekerjaan di tempat tersebut. Pekerjaan ini pada umumnya dilakukan orang-orang tator terutama para wanitanya. Meskipun penghasilan bekerja di hotel relatif tinggi namun tidak menimbulkan kecemburuan penduduk yang lain. Hal ini kemungkinan disebabkan jumlah pekerja di hotel tidak begitu banyak dan tidak kelihatan menyolok perbedaan sosial ekonominya. Selain itu minat untuk bekerja di hotel terutama di posisi posisi tersebut kurang diminati oleh penduduk lainnya.

Hubungan kerja yang bersifat formal dimana perekrutan tenaga kerja dilakukan dengan kualifikasi yang telah ditentukan dan perekrutan pekerja dilakukan tidak terbuka untuk umum cenderung membentuk sistem yang 'eksklusif' dimana mereka yang mendapat akses informasi hanya akan menyebarkan informasi di kalangan mereka sendiri. Sehingga hubungan kerja yang terjalin hanya antara pendatang dan pendatang saja. Penduduk lokal kurang mendapat kesempatan jika tidak mempunyai hubungan yang erat dengan penduduk pendatang.

Ketidaksinambungan pekerjaan

Isu ketidaksinambungan pekerjaan terkait dengan hubungan kerja yang sifatnya kontrak. Hubungan kerja ini umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kontraktor dimana pekerja direkrut berdasarkan kontrak yang pada umumnya hanya sekitar 3 sampai 4 bulan. Jika pekerjaan habis selesailah kontrak kerja tersebut dan menjadi penganggur. Keadaan ini berpengaruh pada peningkatan pengangguran yang telah tinggi di kota Bontang.

Tingginya pengangguran dikota Bontang dipengaruhi oleh beberapa sebab antara lain karena tumbuhnya angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Kedua kedatangan tenaga kerja migran baru yang datang untuk mencari pekerjaan dan pencari kerja dari tenaga kerja yang sudah berpengalaman karena kontrak kerja telah habis. Tingginya tingkat pengangguran karena putusnya hubungan kerja telah mempunyai implikasi terhadap integrasi sosial. Karena pada umumnya para pekerja ini tetap berusaha untuk mencari pekerjaan disini. Mereka hidup dari uang hasil kerja sebelumnya. Menurut penuturan beberapa

informan upah bekerja disini relatif tinggi untuk tukang bangunan mereka bisa mendapatkan Rp 47,5 ribu rupiah belum termasuk uang lembur. sehingga mereka dapat menabung untuk biaya hidup sampai memperoleh pekerjaan selanjutnya.

6.2.2 Hubungan kerja tidak formal

Sektor jasa baik jasa perdagangan maupun jasa pelayanan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan industri di kota Bontang dan peningkatan jumlah penduduk. Kedatangan para migran ke Bontang yang pada umumnya bertujuan untuk mencari penghidupan tidak semata-mata hanya tertarik untuk bekerja pada sektor industri saja, tetapi ada juga ingin memanfaatkan kesempatan dengan mengembangkan sektor jasa. Beberapa informan memberikan keterangan bahwa kedatangan mereka ke Bontang khusus untuk berdagang atau mengembangkan usaha jasa. Selain itu para pendatang yang tidak terserap di sektor industri, mencoba untuk berusaha di sektor informal. Usaha sektor informal tumbuh baik usaha yang telah mempunyai tempat tertentu maupun yang masih tersebar disepanjang jalan raya. Data dari survei yang dilakukan menunjukkan bahwa sekitar 46 persen penduduk bekerja sebagai pedagang maupun usaha industri kecil maupun usaha pelayanan.

Pengamatan didesa Loktuan diperoleh gambaran bahwa usaha sektor informal masih di dominasi terutama oleh sektor perdagangan yang terpusat di sepanjang jalan utama Loktuan. Usaha tersebut pada umumnya masih dalam skala kecil. Mereka berusaha sendiri atau dibantu dengan anggota keluarga seperti isteri, anak dan keluarga dekat lainnya. Usaha jasa pelayanan yang terlihat di desa ini adalah usaha bengkel, penjahit, dan hotel yang jumlahnya masih terbatas. Usaha jasa pelayanan yang kelihatan banyak diminati pelanggan adalah usaha bengkel sepeda motor. Selain usaha jasa pelayanan, industri kecil juga mulai berkembang di desa ini antara lain industri tahu dan tempe.

Dari pengamatan yang dilakukan terlihat bahwa penduduk yang berusaha pada sektor informal datang dari berbagai daerah dengan berbagai keanekaragaman suku. Terdapat spesialisasi tertentu dari suku-suku tersebut dalam melakukan usahanya. Usaha dagang yang relatif besar seperti pedagang pakaian terutama dilakukan oleh pedagang dari suku Banjar dan Bugis. Sedang penjual makanan kaki lima dan warung makan mayoritas dilakukan oleh orang Jawa.

Hubungan kerja yang akan dilihat pada usaha informal ini hanya terbatas pada usaha perdagangan, usaha jasa, industri rumah tangga . Hubungan kerja pada usaha usaha tersebut bervariasi tergantung pada status pekerjaan mereka. Pada usaha perdagangan yang dilakukan sendiri, hubungan kerja hanya terbatas pada hubungan antara penjual dan pembeli dan kepada siapa pedagang tersebut memperoleh dagangannya. Sedang pada usaha yang dijalankan dengan menggunakan buruh, hubungan kerja lebih kompleks karena memerlukan perekrutan tenaga kerja.

Hubungan kerja di sektor perdagangan

Untuk mengetahui hubungan kerja usaha perdagangan informal ini wawancara yang dilakukan dengan seorang pedagang pakaian dan sepatu (Bapak AH) yang membuka usahanya di jalan utama di desa Loktuan dan telah lebih dari sepuluh tahun bermukim di Loktuan.. Pedagang ini berasal dari campuran ayah dari suku Kutai dan ibu dari suku Banjar, dan menyebut dirinya sebagai orang Kalimantan, namun demikian ia masih merasa orang pendatang.. Bapak AH menekankan bahwa hubungan dagang dengan para pembeli dilakukan atas landasan kejujuran artinya barang yang berkualitas baik dijual dengan harga yang tinggi demikian pula sebaliknya. Keuntungan yang didapat dari usaha dagang ini rata-rata 20% dari jumlah yang terjual. Bapak AH memasarkan dagangannya kepada siapa saja yang akan membeli, tidak melihat perbedaan suku maupun agama, semua akan dilayani dengan baik. Pelanggan disini kebanyakan orang-orang Jawa baik dari desa sekitar ini maupun dari perumahan BTN. Karena hubungan dengan berbagai suku, sehingga pedagang bisa berbahasa baik Jawa maupun Bugis meskipun tidak pandai. Keterikatan suku sudah tidak kelihatan dalam memasarkan dagangannya seperti yang diungkapkan oleh bapak AH bahwa 'saya pada umumnya memberikan harga yang lebih murah bukan kepada sesama suku tetapi lebih kepada pelanggan yang sering membeli.kesini.

Hubungan kerja antara para pedagang dengan pedagang besar dimana mendapatkan dagangan, bapak AH pergi belanja langsung Samarinda atau Balikpapan, hal ini dilakukan karena di Bontang belum ada pemasok yang datang. Pergi ke Balikpapan dilakukan satu bulan dua kali sedang ke Samarinda satu bulan sekali. Dalam memperoleh dagangan tidak terikat pada satu tempat saja, tetapi bisa dilakukan di beberapa tempat tanpa memandang suku dan agama. Meskipun Bapak AH berasal dari keturunan suku Banjar,

namun tidak selalu membeli dagangan kepada orang Banjar saja tetapi juga kepada orang Cina maupun orang Jawa. Dalam memperoleh dagangan lebih mengutamakan prinsip ekonomi, yaitu akan mengambil dagangan dari pegagang yang memberikan harga termurah.

Adapun hubungan antara pedagang dengan pedagang lainnya dalam satu lokasi kelihatan tidak terjadi persaingan. Pembeli bebas untuk masuk ke kios kios penjualan tanpa ada paksaan. Pedagang baik dari Jawa, Banjar maupun Bugis tampak akrab. Menurut Bapak AH keadaan ini ditunjang oleh harga barang antara penjual yang satu dan lainnya hampir sama dan masing masing sudah punya langganan sendiri-sendiri. Keakraban mereka tercermin dari sifat saling tolong menolong antar pedagang baik dalam kegiatan usaha maupun kegiatan sosial. Pada kegiatan usaha sifat tolong menolong terlihat ketika pedagang satu meninggalkan dagangannya karena keperluan tertentu maka pedagang lainnya akan membantu jika ada pembeli. Pada kegiatan sosial terlihat bahwa ketika salah satu pedagang dari Jawa mengadakan pesta pernikahan. Pedagang lainnya baik dari Bugis dan Banjar membantu perhelatan tersebut. Hampir semua toko di lokasi perhelatan tutup karena tempatnya digunakan untuk pesta perkawinan tersebut.

Hasil pengamatan pada penjual makanan kaki lima maupun warung makan hampir sama. Meskipun kebanyakan mereka ini orang Jawa namun pembeli datang dari bermacam-macam suku. Perbedaannya hanya kelihatan dari bahasa yang dipakai. Para pedagang dari suku Jawa akan menggunakan bahasa Jawa jika pembelinya berbahasa Jawa, sedangkan untuk melayani pembeli dari lain suku mereka menggunakan bahasa Indonesia. Namun ada kasus yang menarik, seorang pedagang dari Jawa melayani pembeli dengan bahasa yang berlainan. Ketika pembelinya adalah orang bugis, dilayani dengan berbahasa Bugis demikian pula jika pembelinya orang Jawa akan dilayani dengan bahasa Jawa. Dari hubungan kerja yang saling menghormati ini telah mereduksi konflik

Hubungan kerja pada usaha skala kecil

Usaha skala kecil yang dimaksudkan disini adalah usaha industri ataupun jasa yang menggunakan buruh kurang dari limabelas orang. Hubungan kerja informal pada usaha yang menggunakan buruh akan dilihat dari beberapa kasus antara lain bengkel sepeda, industri pengolahan tahu dan tempe dan industri pelayanan air bersih dan

hotel. Sedangkan topik yang akan diuraikan adalah cara perekrutan pekerja, upah maupun kontrak kerja.

Secara umum perekrutan tenaga kerja disektor ini dilakukan tidak secara resmi seperti dengan mengajukan surat lamaran. Pada awal pendiriannya perekrutan pekerja lebih bersifat kekerabatan artinya mereka yang diterima sebagai pekerja adalah merupakan kenalan dekat atau keluarga dan biasanya datang dari suku yang sama. Dalam mencari tenaga kerja tidak saja dilakukan di kota Bontang tetapi juga didatangkan langsung dari daerah asal. Kontrak kerja tidak terbatas tergantung pada kecocokan dan kepercayaan antara buruh dan pengusaha. Upah pekerja juga tidak berdasarkan atas undang-undang resmi tetapi lebih tergantung kepada kemampuan pengusaha untuk membayar. Bagaimana hubungan kerja pada sektor informal dapat dilihat dari kasus kasus ini.

Dari kasus bengkel sepeda motor milik Bapak Sm, bengkel ini dimulai dari usaha kecil berupa bengkel sepeda biasa yang dikerjakan sendiri dan dibantu oleh beberapa saudara yang sudah tinggal di Bontang. Ketika daerah Loktuan mulai berkembang jumlah sepeda motor yang ada di daerah ini juga mengalami peningkatan terutama setelah adanya tukang ojek. Dari sebuah bengkel sepeda bapak Sm mencoba untuk mengembangkan usaha menjadi bengkel sepeda motor serta membuka toko yang menyediakan perlengkapannya seperti menjual oli, ban dan sperpat yang dibutuhkan.

Perekrutan tenaga kerja dilakukan baik di Bontang maupun di daerah asal. Seperti dalam merekrut tenaga trampil untuk dipekerjakan sebagai montir sepeda motor Bapak SM langsung pergi ke Surabaya mencari kenalannya yang mempunyai ketrampilan memperbaiki sepeda motor untuk diajak berusaha ke Bontang. Alasan yang dikemukakan mengapa mengambil tenaga dari luar daerah karena mendapat kesulitan untuk mendapatkan tenaga yang mempunyai jenis ketrampilan tertentu di kota Bontang. Sedangkan mengapa mengambil tenaga kerja dari Surabaya tidak dari kota lain karena Bapak SM dibesarkan di Jawa Timur, banyak teman-teman sekolahnya yang sekarang ini tinggal di Surabaya. Karena terdapat banyak relasi di Surabaya sehingga lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang calon pekerja yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Untuk pekerja yang tidak memerlukan ketrampilan tertentu, Bapak SM menggunakan penduduk lokal baik dari suku Jawa maupun Bugis maupun suku asli. Perekrutan tenaga kerja lokal dilakukan melalui kenalan dan beberapa ada yang datang sendiri

untuk meminta pekerjaan baik mereka yang langsung datang dari daerah asalnya maupun yang telah bertempat tinggal di Bontang.

Hubungan antara majikan dan buruh-buruhnya sifatnya tidak formal tidak ada aturan yang resmi yang perlu diikuti. Para pekerja baru datang baik dari Jawa ataupun dari propinsi lain pada umumnya tinggal di rumah Bapak SM yang terletak berseberangan dengan lokasi bengkel. Setelah mereka bisa berdiri sendiri biasanya mereka akan mencari rumah sendiri. Sedangkan Gaji para pegawai diberikan setiap bulan sekali tetapi kalau ada keperluan mendadak Bapak SM akan membantunya. Adapun gaji berbeda satu sama lain tergantung pada ketrampilan dan keahlian masing-masing maupun jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan. Selain gaji Bapak SM juga bertindak sebagai pelindung dari pekerjanya bila pekerja mempunyai permasalahan diluar, Bapak SM akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada pekerjanya saja melainkan juga kepada keluarganya. Keadaan ini bisa dilakukan oleh bapak SM karena selain pengusaha Bapak SM juga menjadi tokoh masyarakat di Loktuan terutama tokoh masyarakat untuk suku Jawa. Sebaliknya para pekerja menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada Bapak SM.

Selain bengkel sepeda motor bapak SM juga mempunyai usaha Industri kecil tahu tempe. Industri ini merupakan industri tahu tempe yang pertama kali di Bontang. Industri ini dirintis karena melihat perkembangan kota Bontang banyak pendatang dari Jawa. Bapak ini mempunyai ide untuk membuat industri mengingat makanan orang Jawa tidak terlepas dari tempe tahu sehingga kemungkinan berdagang tahu dan tempe akan berhasil. Dalam memulai usahanya Bapak ini pulang ke Jawa Timur belajar bagaimana membuat tempe dan mengajak orang dari Jawa Timur untuk diajak bekerja merintis industri tahu tempetersebut. Industri ini cukup berkembang. Peminat tahu tempe tidak hanya terbatas kepada orang Jawa tetapi juga orang lokal.

Dalam perekrutan pekerja dilakukan hampir sama dengan usaha bengkelnya yaitu secara informal saja hanya berdasarkan saling percaya. Pada awalnya perekrutan tenaga kerja masih terikat pada kesamaan suku dan hubungan keluarga baik yang mempunyai ketrampilan maupun yang sifatnya hanya membantu. Untuk tenaga trampil bahkan dibawa langsung dari Jawa. Pada perkembangan selanjutnya dalam menerima pegawai tidak lagi melihat dari kesamaan suku tetapi hanya saling percaya. Namun demikian pekerja pada bagian pengolahan kebanyakan dari Jawa karena memerlukan skill, sedang pekerja yang sifatnya membantu direkrut dari orang lokal.

Bapak SM mengatakan 'saya membantu tidak hanya kepada orang Jawa saja tetapi orang dari suku lain yang membutuhkan bantuan saya terima' Karena permintaan tahu dan tempe semakin banyak, ada beberapa pekerja yang saya anjurkan untuk merintis usaha sendiri. Kerjasama antar suku pada industri tahu tempe ini telah menguntungkan pula karena tahu tempe sekarang tidak hanya diminati oleh orang Jawa saja tetapi orang luar Jawa juga sudah ikut makan makanan khas orang Jawa ini.

Perekrutan pekerja dari sektor informal yang terikat pada kesukuan biasanya hanya pada waktu permulaan usaha saja. Hal ini berkaitan dengan latar belakang dan sosial budaya yang sama dimana rasa saling percaya mudah tumbuh. Pada tahap selanjutnya rekrutmen pegawai tidak berdasarkan suku saja tetapi lebih pada dasar kepercayaan. Demikian pula yang dilakukan oleh Bapak Haji yang mempunyai berbagai usaha antara lain jasa air bersih, hotel dan tambak. Pada permulaan usaha dirintis dan belum berkembang Bapak Haji menggunakan tenaga kerja yang biasanya didatangkan dari daerah asal. Seperti yang terjadi pada usaha hotelnya. Mereka ini tinggal bersama keluarga Bapak Haji dan mendapatkan upah per bulan. Namun pada usaha yang telah berkembang, perekrutan pegawai lebih didasarkan atas kemampuan dan kepercayaan. Pada saat ini pekerja pada bapak Haji terdiri dari berbagai suku. Bapak AH pedagang pakaian dari suku Banjar juga bekerja pada Bapak Haji sebagai penarik rekening para pelanggan. Meskipun Bapak Haji dan bapak AH berlainan suku namun mereka saling percaya dalam pengelolaan uang. Hubungan kerja yang tidak mengenal suku ini akan dapat mengeratkan hubungan selain itu juga dapat dapat sebagai tempat transfer tehnologi antara suku satu dan lainnya yang masing-masing mempunyai spesialisasi kepandaian sendiri.

Selain itu hubungan kerja pada usaha skala kecil yang menggunakan buruh baik yang dilakukan oleh bapak SM maupun bapak haji ini terkesan adanya semacam hubungan patron dan klien seperti ciri-ciri yang diberikan oleh Gellner (1977) yang mendefinisikan Patron dan Klien sebagai hubungan yang tidak mempunyai kesetaraan. Ketidak setaraan antara keduanya dapat dilihat dari perbedaan pada kekayaan, status dan kekuasaan. Pada umumnya patron menempati posisi memberikan barang maupun jasa kepada client dan familinya untuk kehidupan dan kesejahteraannya. Sedang klient atas dasar hubungan timbal balik memberikan tenaga dan sumberdaya yang ada kepada patron. Scot (1977) juga memberikan beberapa kriteria lebih rinci mengenai hal ini, kriteria apa yang

menjadi kewajiban patron dan apa yang menjadi kewajiban klien. Dalam hal ini patron akan menanggung kebutuhan dasar baik bagi klient itu sendiri maupun kepada keluarganya. Patron juga berkewajiban menanggung kehidupan klien ketika terjadi krisis, selain itu patron akan memberikan perlindungan kepada klien yang berhubungan dengan hal-hal diluar hubungan kerja seperti berhadapan dengan aparat hukum. Sebaliknya pada umumnya klien akan mencurahkan tenaga maupun fikiran kepada patron. Klien memberikan loyalitas yang amat tinggi kepada patronnya. Adanya hubungan kerja yang bersifat patron dan klien ini akan memudahkan dalam meredam konflik karena para patron ini bisa mengendalikan kliennya supaya tidak berbuat sesuatu yang merugikan.

Hubungan kerja sektor pertanian

Lapangan usaha sektor pertanian yang dimaksud disini meliputi pekerjaan sebagai petani, nelayan maupun mereka yang bekerja memanfaatkan hasil hutan.. Sektor pertanian di Kota Bontang tidak berkembang. terutama disebabkan karena terbatasnya lahan. Sektor kehutanan juga sangat terbatas karena hutan di sekitar Bontang merupakan hutan lindung dan taman nasional. Adapun hubungan kerja pada sektor pertanian yang akan diuraikan disini tidak hanya terfokus pada penelitian di kota Bontang tetapi juga di daerah transmigrasi.

Penduduk yang bekerja sebagai petani dikota Bontang tidak terbatas dari suku tertentu, suku Bugis, Jawa, Toraja dan penduduk asli suku Kutai. Mereka pada umumnya hanya mempunyai lahan yang sangat terbatas hasil dari merintis kecuali penduduk dari suku Kutai yang mempunyai ladang relatif luas. Hubungan kerja antara suku-suku pendatang di sektor ini kelihatan tidak terjalin, karena lokasi tanah pertanian mereka berjauhan satu sama lainnya dan hasilnya pun belum memadai. Pada umumnya lahan mereka hanya ditanami pisang. Hubungan kerja terjalin antara suku pendatang dengan penduduk asli. Beberapa orang suku pendatang menjadi pengolah tanah suku asli. Keadaan ini dimungkinkan karena sebagian penduduk asli masih mempunyai tanah yang cukup luas dan tidak mampu mengerjakan sendiri. Bapak G dari Jawa telah mengolah tanah dari penduduk asli berjalan selama 4 tahun dengan cara bagi hasil. Semua bibit maupun pupuk dibeli oleh bapak G. Pembagian hasil masa panen diserahkan pada Bapak G, mereka tidak menuntut berapa hasil panen yang harus diberikan. Hubungan mereka selama ini sangat akrab, bahkan menganggap seperti saudara. Rumah yang ditempati oleh

Bapak G dan keluarganya semula adalah rumah penduduk asli yang dijual kepada Bapak G.

Hubungan kerja petani yang terjalin di lokasi transmigrasi agak berbeda dengan di Bontang karena transmigrasi merupakan proyek pemerintah, yang mempunyai tujuan tertentu dimana masing-masing transmigran telah mempunyai tanah garapan yang diberikan oleh pemerintah. Pada awal kedatangannya transmigran pada umumnya transmigran hanya berkonsentrasi pada pekerjaan pertanian yaitu mengolah tanah pertanian yang telah diberikan pemerintah kepada transmigran. Hubungan kerja dengan transmigran lain hanya terbatas pada bagaimana cara penanggulangan hama dan bersama-sama saat memasarkan. Dalam hal ini tidak ada hubungan kerja yang mengikat.

Namun demikian setelah beberapa tahun tinggal para transmigran tidak lagi hanya berkonsentrasi pada pengolahan lahan pemberian pemerintah namun juga berusaha diluar pertanian. Pekerjaan yang dilakukan oleh transmigran tanaman pangan selain mengerjakan tanahnya, pada dua tahun terakhir ini banyak warga transmigran yang bekerja sebagai penebang kayu di hutan. Keterlibatan mereka sebagai penebang kayu karena diajak oleh warga lokal. Pada mulanya mereka di datangi oleh seorang penduduk lokal yang tinggal di kota Sangatta yang menawarkan pekerjaan sebagai penebang kayu di hutan. Upah sebagai penebang kayu per hari Rp 40.000 sampai 80.000 sehari tergantung dari jumlah tebangan kayu yang dihasilkan. Karena tawaran yang menggiurkan tersebut akhirnya sebagian besar ikut terlibat dalam pekerjaan ini. Hubungan kerja antara para transmigran ini merupakan hubungan kerja majikan dan buruh. Penduduk lokal pada umumnya bertindak sebagai majikan dari orang transmigran. Menurut penduduk transmigran kegiatan ini merupakan kegiatan illegal namun yang melakukan orang banyak dan mereka dilindungi oleh orang lokal yang bertindak sebagai majikan. Selain itu ada petani transmigran yang menyewakan kerbaunya untuk menarik kayu-kayu yang telah ditebang.

Hubungan kerja yang masih berorientasi pada sukunya sendiri terlihat pada pekerjaan sebagai nelayan. Pada umumnya pekerjaan ini ditekuni oleh orang Bugis. Hal tersebut kemungkinan berkaitan dengan keahlian khusus yang dimiliki oleh orang Bugis. Selain sebagai nelayan yang langsung menangkap ikan dilaut sebagian orang Bugis terutama yang mempunyai modal telah membuka tambak udang. Dominasi suku Bugis pada sektor ini karena adanya saling keterikatan antar keluarga. Nelayan Bugis itu akan menampung saudara-saudaranya yang akan berusaha di Bontang dan untuk

sementara bekerja bersama-sama sebagai nelayan sebelum mereka dapat berdiri sendiri. Pada umumnya para nelayan ini tinggal di daerah tepi pantai dengan rumah-rumah panggungnya. Mereka juga saling membantu dalam mendirikan rumah maupun dalam mencarikan lokasinya.

6.2.3 Penataan hubungan kerja di sektor industri dalam menanggulangi kecemburuan

Kecemburuan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja di sektor industri telah mendapat perhatian dari kalangan masyarakat seperti LSM, anggota DPR kalangan industri dan pemerintah kota. Untuk mengatasi supaya kecemburuan tidak terus berlangsung telah diadakan kesepakatan antara kelompok masyarakat dan industri yang ditandatangani oleh 26 orang pada tanggal 23 Maret 2000. Isi kesepakatan tersebut meliputi:

1. Seluruh penerimaan tenaga kerja harus melalui Depnaker kota Bontang
2. Dalam proses penerimaan harus memprioritaskan tenaga kerja lokal
3. Dalam setiap proses penerimaan tenaga kerja ada tim seleksi dini (kerjasama antara pemerintah kota dan seluruh LSM)
4. Setiap perencanaan penerimaan tenaga kerja harus dilaporkan kepada Depnaker kota Bontang
5. Setiap ada penerimaan tenaga kerja akan dikordinasi dengan tim pemantau penerimaan tenaga kerja yang telah dibentuk melalui SK walikota Bontang.
6. Seluruh kontraktor, sub kontraktor diminta melaporkan semua kejadian kejadian yang prinsip mengenai rencana penerimaan tenaga kerja maupun tentang keberadaannya kepada walikota Bontang
7. Dalam penerimaan tenaga kerja tidak ada batasan usia
8. Kantor /perwakilan harus diluar site plan area perusahaan

Dengan adanya kesepakatan ini, perekrutan pegawai baik pemerintah maupun swasta pada saat ini dibawah kewenangan Kantor Depnaker dan pelaksanaannya diawasi oleh 'Tim Sebelas' yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Pada prinsipnya sistem ini akan melibatkan partisipasi masyarakat dari semua golongan dalam

menyelesaikan kecemburuan sosial kaitannya dengan hubungan kerja.

Semua lapisan masyarakat mempunyai akses informasi yang sama terhadap adanya kesempatan kerja. Selain itu juga mempunyai akses yang sama untuk mengikuti perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh Depnaker sepanjang kualifikasi yang disyaratkan bisa terpenuhi. Informasi tersebut juga ditempelkan di kantor desa agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat tidak perlu ke Depnaker untuk mencari informasi yang kemungkinan harus mengeluarkan biaya. Menurut informasi cara penerimaan tenaga kerja ini telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pertemuan resmi maupun perseorangan. Persyaratan rekrutmen pegawai yang dijalankan oleh Kantor Depnaker mengikuti kebijaksanaan yang disesuaikan dengan peraturan dari pemerintah.

BAB VII

MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mobilitas penduduk dan pembangunan daerah mempunyai hubungan 'sebab-akibat' yang sangat erat, dapat digambarkan dari hubungan timbal balik antara meningkatnya mobilitas penduduk dengan meningkatnya kegiatan pembangunan daerah. Meningkatnya kegiatan pembangunan di sektor kehutanan (*logging*), perindustrian terutama minyak dan gas alam serta pupuk Kaltim (PKT) dan pertambangan batu bara mempunyai implikasi yang sangat besar bagi pembangunan kota Bontang dan Sangatta khususnya dan Kaltim pada umumnya. Pembangunan di ketiga sektor ini telah memacu berkembangnya sektor-sektor pendukung lain seperti pekerjaan umum dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan, sektor perdagangan dan jasa. Kegiatan ini memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dan peluang inilah yang merupakan faktor menarik bagi pendatang untuk datang ke kota-kota ini.

Untuk mendapatkan pemahaman mengenai keterkaitan antara mobilitas penduduk dan pembangunan maka pada bagian ini akan dikemukakan analisa situasi peningkatan mobilitas penduduk (yang datang secara spontan) ke Kota Bontang dengan pembangunan kota tersebut, khususnya penyediaan fasilitas permukiman dan peningkatan mobilitas melalui program transmigrasi dengan pembangunan pertanian di Kaltim. Analisa dilanjutkan untuk mengetahui dampak mobilitas penduduk dan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan isu tanah, 'terdesaknya' penduduk 'asli' dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Bagian ini ditutup dengan diskusi peluang dan tantangan mobilitas penduduk di masa depan, terutama dalam era desentralisasi dan globalisasi.

7.1. Pengembangan Kota Bontang: Potret Permukiman Migran di Desa Loktuan dan Permukiman 'Elit' PKT

Perkembangan kota Bontang sangat dipengaruhi oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya dengan

minyak dan gas alam serta PKT sebagai 'motor penggerak' yang menarik minat pendatang di kota ini. Pesatnya perkembangan penduduk kota Bontang seharusnya disesuaikan dengan daya tampung dan perkembangan fasilitas kota, tetapi implementasinya sering melampaui daya tampung kota dan fasilitas yang disediakan jauh dari kebutuhan standar. Akibatnya permukiman-permukiman padat dan kumuh berkembang dengan cepat di kota ini, mengelilingi dua permukiman 'elit' yang dibangun di kawasan PKT dan LNG Badak. Pengembangan permukiman kota sangat diperlukan, tetapi mengingat wilayah Kota Bontang yang diapit oleh taman nasional dan hutan lindung serta laut maka pengembangan kota ini sangat terbatas. Pemerintah kota telah membuat perencanaan pengembangan kota ke arah selatan Kota Bontang, yaitu Desa Sekambang yang berbatasan dengan kawasan konservasi. Permasalahan keterbatasan wilayah Kota Bontang sudah disadari pemerintah daerah, karena itu pemerintah kota mengajukan proposal untuk pengembangan batas wilayah mengikuti batas alami yang sebelumnya sudah tercantum dalam dokumen Kantor Pertanahan di kota tersebut.

Bagian ini akan memberikan ilustrasi bagaimana penyediaan sarana dan fasilitas kota di Kota Bontang. Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh maka analisa akan dilakukan pada dua kawasan permukiman yang sangat kontras di Kota Bontang, satu permukiman yang sangat padat dengan fasilitas yang minim dan permukiman lainnya mempunyai fasilitas yang lengkap dan baik. Gambaran ini memberikan nuansa adanya ketimpangan penyediaan fasilitas antara kelompok migran dari kalangan masyarakat 'biasa' dan kelompok 'elit' di kota tersebut.

7.1.1. Permukiman Padat dan Kumuh

Desa Loktuan merupakan desa terpadat dari sembilan desa yang ada di Kota Bontang dan kepadatan ini telah melampaui daya dukung lingkungannya. Hal ini diindikasikan dari padatnya permukiman yang mengelompok di sembilan dusun yang sangat berdekatan hanya dibatasi jalan saja. Setiap permukiman terdapat rumah yang sangat padat, kebanyakan rumah berbentuk panjang yang di sekat-sekat menjadi beberapa rumah petak menyerupai 'barak'. Rumah-rumah petak ini umumnya berukuran kecil, kurang dari 45 meter persegi. Jarak antara 'barak' yang satu dengan lainnya sangat berdekatan, berupa gang yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua. Rumah-rumah tersebut umumnya adalah rumah panggung

setengah tiang yang terbuat dari kayu (sesuai dengan potensi di desa ini).

Disamping rumah 'barak', di desa Loktuan terdapat rumah-rumah tunggal yang mengelompok di atas laut dan pinggir jalan. Perkembangan rumah di atas laut berlangsung cukup pesat sejak mulai beroperasinya PKT. Pada waktu itu hanya terdapat beberapa rumah nelayan yang dibangun di pantai dekat jalan, tetapi pada waktu penelitian dilakukan pembangunan rumah tidak hanya dilakukan di sepanjang pantai (300 meter), tetapi juga sudah menjorok ke laut (sekitar 150 meter). Rumah-rumah di atas laut terbuat dari kayu dan dibangun bertiang dengan jarak antara rumah yang satu dengan lainnya sangat berdekatan, menghasilkan permukiman yang sangat padat. Setiap orang mempunyai akses untuk membangun rumah di atas laut atas izin ketua RT dan Kepala Desa. Permukiman di atas laut ini mempunyai fasilitas yang sangat minim, sarana yang ada hanya berupa jembatan kecil yang menghubungkan rumah yang satu dengan lainnya. Kondisi jembatan sangat memprihatinkan, banyak kayu yang sudah rusak sehingga jembatan menjadi bolong-bolong, bahkan di sebagian tempat jembatan hanya terdiri dari dua-tiga papan kayu yang disambung. Sedangkan rumah tunggal di pinggir jalan raya jumlahnya sangat terbatas, umumnya adalah rumah permanen yang terbuat dari bata.

Permukiman-permukiman di Desa Loktuan berkembang secara alami sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di desa ini. Permukiman berkembang pesat dengan pesatnya jumlah pendatang pada awal tahun 1980-an setelah beroperasinya PKT. Waktu itu kebutuhan utama pembuatan rumah adalah untuk menampung para pendatang yang kebanyakan para pencari kerja. Bentuk, luas dan keadaan bangunan juga disesuaikan dengan keperluan yang 'mendesak' saat itu, yaitu menampung banyak orang, karenanya kebanyakan berupa 'barak' - 'barak' panjang yang dibangun seadanya dengan fasilitas permukiman yang sangat minim. Mengingat penduduk terutama pendatang semakin banyak, maka semakin banyak juga 'barak' di bangun dan satu sama lain letaknya sangat berdekatan, utamanya untuk memberi kemudahan mereka ketempat kerja yang ada di sekitar permukiman tersebut. Permukiman-permukiman ini terus bertambah dan semakin padat dari waktu ke waktu tanpa adanya upaya untuk memperbaiki keadaan bangunan dan peningkatan fasilitas permukiman. Keadaan ini berkaitan dengan erat dengan 'konsep rumah darurat' bagi para pendatang yang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah, sehingga rumah hanya

dijadikan sebagai tempat tidur saja, bukan sebagai keperluan yang perlu mendapat prioritas. Jika mereka mempunyai uang, pendatang lebih suka membelanjakan uangnya untuk pulang dan/atau membeli rumah di kampungnya. Pemikiran seperti ini secara tidak langsung telah 'melestarikan' bangunan perumahan 'darurat' di Desa Loktuan.

Desa yang didominasi oleh pendatang ini mempunyai fasilitas yang sangat minim karena masih sangat terbatasnya 'imbas' pembangunan di Kota Bontang. Walaupun desa ini berbatasan dengan kawasan PKT, sarana dan fasilitas yang dibangun di kawasan industri tersebut belum dirasakan oleh penduduk Desa Loktuan, kecuali jalan yang mereka lalui untuk pergi ke pusat kota, tetapi jalan ini di bangun karena keperluan PKT, yang menghubungkan kompleks PKT dengan pusat Kota Bontang. PKT memberikan bantuan pada jalan raya di desa Loktuan, tetapi jalan tersebut sudah mulai rusak. Bantuan lain yang diberikan adalah peminjaman alat (traktor) untuk pembangunan jalan baru yang merupakan jalan tembus dari pasar Loktuan ke pos 7 yang merupakan persimpangan jalan raya yang menghubungkan kompleks PKT dan pusat Kota Bontang. Pembangunan jalan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD.

Sampai tahun 2000, sarana permukiman di Desa Loktuan masih sangat terbatas. Sarana pendidikan yang ada berupa tiga Sekolah Dasar (SD) dan tiga sekolah lanjutan pertama termasuk Yayasan Pendidikan Loktuan (YLP). Sekolah yang ada ini tentu saja tidak cukup untuk menampung jumlah murid yang banyak di desa ini (sekitar 50.000 murid dari SD sampai SMU). Sebagian murid SLTP dan semua murid SMU sekolah di pusat kota Bontang dengan biaya sekolah dan transportasi yang mahal. Baru pada bulan Juni 2000 ada bus sekolah yang dapat mengantar dan menjemput murid dengan biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan naik kendaraan umum.

Sarana kesehatan juga masih terbatas di Desa Loktuan. Rumah sakit terdekat terdapat di kompleks PKT, tetapi kebanyakan penduduk tidak mampu untuk memanfaatkan fasilitas perusahaan tersebut karena biayanya yang mahal. Karena itu, kebanyakan penduduk pergi berobat ke rumah sakit yang ada di Kota Bontang. Fasilitas kesehatan diberikan oleh beberapa dokter dan bidan yang praktek di desa ini, tetapi baik dokter maupun bidan atau perawat hanya menampung pasien yang berobat jalan, sedangkan pasien rawat inap 'terpaksa' di bawa ke rumah sakit di luar Kota Bontang seperti rumah sakit umum di Kota Samarinda yang ditempuh selama

tiga jam dengan menggunakan kendaraan mobil atau Balikpapan dengan jarak sekitar lima jam perjalanan dari Kota Bontang.

Meningkatnya jumlah penduduk di Desa Loktuan tidak diimbangi dengan peningkatan sarana permukiman yang layak, terutama penyediaan air bersih, MCK dan sanitasi yang merupakan kebutuhan primer untuk permukiman yang sehat.

Sarana Air Bersih

Penyediaan air bersih merupakan isu penting di Desa Loktuan, karena sebagai desa pantai, air tanah di desa ini sebagian besar merupakan 'air payau yang rasanya antah' dan karenanya tidak laik untuk di masak dan minum. Pada musim hujan, penduduk dapat menampung air hujan, tetapi keadaan akan menjadi buruk pada musim kemarau, terutama pada musim kemarau panjang.

Walaupun letak desa dekat dengan pusat Kota Bontang dan berbatasan dengan kompleks PKT, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) belum tersedia di Desa Loktuan. Sebetulnya PKT mempunyai sumber air bersih yang cukup bahkan berlebihan sehingga air seringkali melimpah karena bak penampung sudah penuh dan keran air mengalir setiap waktu. Keadaan ini cukup ironis karena di PKT, air berlebihan dan seringkali terbuang sepanjang hari, sedangkan sebagian besar penduduk desa kekurangan air bersih. Hanya beberapa penduduk yang berbatasan langsung dengan PKT yang mempunyai akses terhadap air bersih dari PKT dan beberapa penduduk lain yang bekerja di PKT atau anak perusahaannya boleh membawa air bersih (dalam tempat atau jerigen) dari sumber air PKT ke rumah-rumah mereka. Sampai penelitian ini dilakukan belum ada kesepakatan bahwa pihak PKT akan membantu air bersih kepada penduduk Desa Loktuan, walaupun kepala desa telah mengusulkan bantuan air bersih tersebut.

Satu-satunya sumber dan fasilitas air bersih di Desa Loktuan berasal dari sumur yang dikelola oleh pemilik hotel Abadi dan disalurkan ke rumah-rumah penduduk sejak tahun 1982. Sebagian besar penduduk, terutama musim kemarau, mendapatkan air bersih dari hotel Abadi. Sistem penyediaan dan distribusi air bersih mirip dengan PDAM, tetapi di Desa Loktuan dikelola oleh individual pemilik hotel. Sumber air berasal dari dua sumur yang sangat dalam (160 meter) dan dengan menggunakan pompa dengan kekuatan tinggi dapat menyedot air dan memenuhi kebutuhan air bersih sebagian besar warga desa ini. Hotel Abadi menyediakan pipa paralon dari

lokasi sumur ke pinggir jalan dan gang-gang permukiman, sedangkan penyaluran ke rumah-rumah menggunakan selang-selang yang disediakan sendiri oleh pemilik rumah.

Penduduk yang memerlukan air berlangganan pada hotel Abadi dan pembayaran dilakukan setiap bulan. Pemilik hotel mempekerjakan beberapa warga untuk menagih uang kepada para pelanggan. Penarik uang ini bekerja dengan sistim komisi, yaitu masing-masing pekerja mendapat komisi sebesar 20 persen dari jumlah tagihan konsumen. Jumlah tagihan sangat tergantung pada volume air yang dikonsumsi pelanggan dan bervariasi menurut musim. Pada musim hujan, jumlah tagihan hanya mencapai Rp 2 juta atau sekitar separuh (50 persen) dari tagihan pada musim kemarau (Rp 4 juta). Penagihan tidak dilakukan serentak, mengikuti tanggal gajian penduduk desa, karena itu pekerja tersebut kadang-kadang harus menalangi dulu pembayaran air konsumen kepada pemilik hotel.

Sarana MCK

Sarana MCK juga masih sangat terbatas, sebagian kecil penduduk (terutama yang mempunyai rumah atau ruko di pinggir jalan) mempunyai sarana MCK sendiri, tetapi sebagian besar tidak mempunyai sarana tersebut. Sebagian menggunakan MCK umum yang jumlahnya sangat terbatas hanya beberapa saja dan tersebar di beberapa kampung di desa ini. Penduduk desa yang rumahnya dekat pantai memanfaatkan pantai sebagai tempat membuang air besar, sedangkan penduduk yang tinggal di bagian dalam dari barak-barak rumah, mereka pergi ke semak-semak dekat hutan.

Sebagian penduduk lagi membuang kotoran dari rumah mereka (umumnya rumah di Loktuan bertangga setengah tiang) tanpa adanya sarana yang khusus. Misalnya, mereka membuat lubang pada bagian belakang kamar kontrakan dan di bagian bawahnya diletakkan drum sebagai bak penampung tinja. Menurut responden, drum penampung tersebut di beri air sebagian dan dimasukkan beberapa ikan lele agar ikan tersebut memakan tinja mereka. Keadaan seperti ini telah berlangsung lama sampai bertahun-tahun dan mereka belum pernah melakukan penyedotan tinja, mungkin tinjanya menyerap kedalam tanah atau melimpah dibawah rumah.

Sebagian besar penduduk, terutama yang tinggal di rumah petak di barak-barak, tidak mempunyai fasilitas yang layak untuk mandi dan cuci. Mereka menggunakan bagian belakang atau samping rumah, sebagian hanya menutupi tempat mandi dengan seng-seng

rongsokan atau triplek atau karton-karton bekas, sebagian lagi di dalam rumah petak mereka, sebagai tempat mandi dan cuci. Air buangan mengalir ke bawah rumah tanpa saluran yang memadai.

Sanitasi dan Kesehatan lingkungan

Gambaran di atas menunjukkan minimnya penyediaan sarana dan buruknya sanitasi lingkungan di Desa Loktuan. Padatnya penduduk di permukiman terasa semakin padat karena jarak antar gang dan kampung sangat sempit, akibatnya hampir tidak ada ruang kosong antar barak-barak rumah dan antar gang atau kampung yang dapat digunakan untuk pembuatan parit atau saluran drainasi, khususnya dari air buangan rumah tangga, karena itu sebagian penduduk menggali parit seadanya. Pada musim kemarau, air buangan dapat meresap ke dalam tanah, sehingga secara kasap mata tidak menjadi permasalahan penting bagi penduduk, tetapi pada musim hujan, air buangan di bawah rumah atau parit melimpah dan menyebabkan genangan air kotor di permukiman-permukiman tersebut.

Keadaan semakin buruk dengan kondisi rumah-rumah yang sebagian besar merupakan satu petak dari satu bangunan yang panjang. Ventilasi dan sirkulasi udara dalam rumah sangat terbatas, karena jendela dan pintu kebanyakan hanya ada di bagian depan rumah, padahal, dalam petakan rumah yang tertutup tersebut, mereka memasak, makan dan tidur. Polusi dalam rumah (*indoor pollution*) semakin 'parah' dengan asap rokok yang tidak mereka sadari akan berpengaruh terhadap kesehatan keluarga.

Arena bermain anak dan kenakalan remaja

Padatnya permukiman berimplikasi pada areal bermain anak di Desa Loktuan. Idealnya, anak-anak dapat bermain di rumah dan halaman rumah masing-masing, tetapi kenyataannya sebagian besar penduduk tidak mempunyai halaman rumah (karena keluar rumah langsung gang atau jalan) dan rumah mereka juga sempit. Tidak ada alternatif bagi anak-anak untuk main di jalan atau di areal yang relatif kosong yang letaknya agak jauh dari rumah-rumah mereka. Sebagai ilustrasi dari keluarga responden yang tinggal di petakan barak berukuran 4 x 5 meter dengan jumlah anggota 7 orang dan dua anak yang sudah remaja. Menurut istri responden, dia menyuruh anak-anaknya main keluar rumah setelah makan malam, karena kalau semua di rumah akan sangat padat dan hiruk – pikuk, karena

rumahnya hanya satu petak, termasuk kamar tidur, ruang makan, dapur dan kamar mandi/toilet (dibagian belakang yang disekat dengan papan). Anak-anaknya ada di rumah hanya untuk makan dan tidur dan selebihnya main di luar rumah atau pergi sekolah.

Situasi seperti ini berlangsung dari waktu ke waktu dan merupakan gambaran sebagian besar penduduk di Desa Loktuan. Keadaan ini mungkin berkaitan dengan kenakalan remaja dan keterlibatan sebagian dari mereka dengan narkoba. Walaupun kenakalan remaja masih dapat ditoleran, kadang-kadang mereka (yang berkelompok-kelompok) tawuran antar kelompok, terutama jika ada pesta di desa tersebut. Sebagian kecil remaja juga sudah terlibat narkoba, mulanya mereka hanya coba-coba diberi teman, tetapi kemudian menjadi ketagihan. Letak desa yang dekat dengan Kota Bontang juga merupakan salah satu faktor penyebaran narkoba di desa ini. Pada waktu penelitian, seorang pengedar narkoba sudah ditangkap polisi.

7.1.2. Permukiman 'Elit' di Kawasan PKT

Keadaan permukiman di Desa Loktuan sangat kontras dengan permukiman di kompleks PKT, diindikasikan dari ketimpangan fasilitas yang mencolok di kedua permukiman tersebut. PKT mempunyai fasilitas perumahan yang lengkap bagi karyawannya. Disamping rumah dinas, PKT juga menyediakan perumahan yang dapat dibeli secara kredit (BTN) yang letaknya masih dalam kawasan PKT. Semua kebutuhan hidup sehari-hari disediakan dalam kompleks, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, olah raga, ibadah, hiburan dan toko.

PKT memiliki sekolah dengan sarana dan prasarana (termasuk guru) yang baik, karena itu sekolah-sekolahnya mulai dari TK sampai SMU termasuk dalam kategori sekolah berkualitas, tidak hanya di Bontang tetapi juga di Propinsi Kaltim. Umumnya anak-anak karyawan PKT yang sekolah di sini, hampir tidak ada murid yang berasal dari luar kompleks, seperti desa Loktuan. Sebetulnya, sekolah-sekolah di PKT juga menerima murid dari luar kompleks, tetapi karena kualifikasinya tinggi (seperti testing dengan pertanyaan yang sulit dan sistim drop out jika nilai tidak memenuhi ketentuan) maka sulit bagi anak-anak dari luar untuk memanfaatkan fasilitas sekolah di PKT.

Fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk karyawan dan keluarganya tersedia di dalam kompleks PKT, lengkap dengan rumah sakit, apotik dan dokter-dokter ahlinya. Ketersediaan sarana dan prasana rumah sakit ini sangat mendukung pelayanan kesehatan,

termasuk kegiatan untuk mengoperasi pasien. Sayangnya keberadaan rumah sakit ini belum dapat sepenuhnya memberikan manfaat bagi penduduk di sekitarnya, termasuk Loktuan. Menurut responden di Loktuan, biaya pengobatan di rumah sakit ini sangat mahal dan sistim pembayaran awal (deposit) bagi pasien inap menjadi kendala utama penduduk sekitar untuk berobat disini.

Fasilitas olah raga, hiburan dan arena bermain tersedia dalam kompleks PKT, dan umumnya dimanfaatkan oleh karyawan PKT dan anggota keluarganya. Seperti sekolah dan rumah sakit, sarana dan fasilitas olah raga seperti golf, tenis dan renang dapat dimanfaatkan orang luar PKT tetapi biayanya cukup mahal, hanya orang-orang tertentu, mereka yang termasuk kelompok 'elit' dan pemilik modal, yang menjadi anggota klub olah raga. PKT juga menyediakan tempat-tempat bermain anak, berupa taman dan tempat-tempat bermain dengan pemandangan yang indah. Sedangkan penduduk sekitar, umumnya hanya mendengar adanya sarana tersebut, hanya sebagian kecil yang mempunyai akses untuk melihat fasilitas tersebut, karena tidak semua orang diizinkan masuk dalam kawasan PKT.

Sarana ibadah masjid merupakan fasilitas di PKT yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar. Disamping untuk beribadah, PKT mempunyai yayasan yang dikelola masjid untuk kegiatan sosial, seperti pemberian beasiswa dan peminjaman uang. Sampai saat ini terdapat 10 anak dari Desa Loktuan yang mendapatkan beasiswa. Yayasan masjid juga memberikan pinjaman pada masyarakat sekitar sebesar dua juta rupiah dengan sistim peminjaman bank Muamalat.

7.1.3. Ketimpangan antara Permukiman Padat di Loktuan dan Permukiman 'elit' PKT

Ketimpangan fasilitas yang sangat mencolok dari dua kawasan permukiman ini telah menimbulkan 'kecemburuan' khususnya bagi penduduk Desa Loktuan. Walaupun kecemburuan penduduk belum mencolok, tetapi hal ini perlu diantisipasi mengingat adanya kecendrungan ketidakpuasan penduduk, khususnya kaum muda dengan kesenjangan tersebut. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan kata-kata simbolis ini perlu segera dieliminir, untuk menghindari terjadinya 'bom waktu' di Kota Bontang. Keadaan ini dapat diindikasikan dari pernyataan-pernyataan simbolis mereka untuk mendobrak 'tembok Berlin' (yang dimaksudkan adalah pembatas antara kawasan PKT dan kawasan di luarnya, termasuk Desa

Loktuan). Tujuan utama adalah untuk mengurangi 'eksklusifitas' PKT agar dapat lebih 'dekat' dan 'ramah' terhadap masyarakat sekitarnya.

Istilah 'tembok Berlin' di Kota Bontang utamanya berkaitan dengan rendahnya akses masyarakat terhadap informasi dan fasilitas yang ada di PKT, khususnya yang berkaitan dengan peluang dan kesempatan kerja di PKT dan anak-anak perusahaannya. Selama ini informasi tentang lowongan pekerjaan hanya terbatas di dalam kompleks PKT, tidak sampai menyebar di masyarakat sekitarnya, dan walaupun informasi tersebut sampai keluar, pencari kerja yang berasal dari masyarakat sekitar tidak mempunyai akses bahkan untuk memasukkan lamaran kerja, karena mereka tidak mempunyai izin untuk masuk ke tempat pendaftaran yang terletak di dalam kompleks PKT.

Pengertian 'tembok Berlin' kemudian berkembang lebih luas termasuk 'eksklusifitas' untuk sarana dan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pernyataan yang timbul terhadap pelayanan kesehatan yayasan PKT sangat tajam: 'PKT (rumah sakit) tidak mempunyai prike-manusiaan'. Pernyataan ini muncul karena penduduk sekitar tidak mampu membayar biaya pengobatan, terutama biaya rawat inap karena selain mahal, pasien juga diharuskan membayar uang muka. Walaupun pembayaran uang deposit sudah umum berlaku, tetapi ketentuan ini belum dapat diterima oleh penduduk sekitar. Demikian juga dengan pendidikan yang diakui masyarakat sekitar sebagai 'sekolah yang berkualitas,' sarana dan pendidikan yang ada di PKT belum bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena biayanya mahal (hanya diperuntukkan bagi yang ekonominya mampu) dan seleksinya sangat ketat.

Kecemburuan juga muncul karena keinginan mereka untuk mendapatkan imbas dari fasilitas yang ada di PKT, demi perkembangan masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, PKT mempunyai fasilitas telekomunikasi yang sangat lengkap, tetapi Desa Loktuan tidak mendapatkan 'ceceran' dari fasilitas tersebut. Line telpon di desa ini diperoleh setelah kepala desa mendesak Telkom karena ada anak perusahaan PKT mendapat sambungan dari telkom dan salurannya melalui Desa Loktuan.

Sisi lain dari kesenjangan fasilitas permukiman antara BTN di PKT dan Loktuan adalah timbulnya perbedaan yang cukup besar antara orang BTN dan Loktuan. Kesan yang timbul dari penduduk Loktuan adalah orang PKT (BTN) mempunyai gaji yang besar, umumnya mempunyai mobil, walaupun masih bujangan, karena

mereka mendapat bonus yang sangat besar. Karena itu menjadi karyawan PKT merupakan idaman penduduk Loktuan. Dengan menjadi orang BTN, status sosial mereka akan tinggi. Jika mereka tidak dapat menjadi karyawan PKT, idaman para pemuda di desa ini adalah kawin dengan karyawan PKT, menjadi nyonya yang tinggal di BTN. Beberapa penduduk telah menjadi nyonya karyawan di PKT, sekarang mereka tinggal di BTN dan gaya hidup mereka sudah berubah seperti layaknya 'orang BTN', karena status sosialnya sudah meningkat.

7.2. Transmigrasi dan Pembangunan Pertanian

Transmigrasi mempunyai peran yang penting dalam pembangunan pertanian di Kalimantan Timur, terutama sebagai upaya mengembangkan pertanian tanaman pangan secara intensif untuk mencapai swasembada pangan dan sebagai upaya mengontrol dominasi sistem pertanian tradisional ladang berpindah yang masih dipraktekkan hampir di seluruh wilayah Kaltim. Program ini kemudian berkembang dengan memasukkan tanaman keras sebagai komoditi disamping tanaman pangan. Perubahan ini berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan komoditi ekspor dan sebagai respon terhadap kondisi alami Kaltim yang lebih cocok untuk tanaman keras.

Lahan pertanian di permukiman transmigrasi meningkat dua setengah kali lipat, dari 6.307 hektar pada akhir REPELITA II menjadi 15.346 hektar pada akhir REPELITA IV (Pelzer, 1978:35; Kanwil Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur, 1989:91-94). Luas lahan pertanian berkaitan erat dengan peningkatan jumlah transmigran ke Kaltim. Pada tahun 2000 transmigran di Kaltim berjumlah 72.487 KK, jika setiap KK mendapatkan 2 hektar lahan pertanian (sesuai dengan standar transmigrasi umum), maka pada dua dekade terakhir luas lahan pertanian transmigran mencapai 144.974 hektar. Dalam implementasinya perkiraan luas ini lebih besar karena dalam dua periode terakhir terdapat transmigrasi PIR yang mendapatkan lahan lebih luas dari transmigrasi umum (misalnya di lokasi transmigrasi Tanjung Santan IV, setiap KK memperoleh 3 ha lahan dengan perincian 2 hektar kebun karet, 3/4 hektar lahan pangan dan sisanya 1/4 hektar merupakan rumah dan pekarangan).

Perluasan lahan pertanian dapat mengindikasikan kontribusi program transmigrasi terhadap pengembangan pertanian, terutama tanaman padi. Sampai tahun 1989, transmigrasi menyumbang hanya 7 persen, atau 7.182 hektar dari jumlah lahan padi di Kaltim (102,026

hektar). Sebagian besar dari lahan tersebut adalah padi ladang. Kontribusi transmigrasi untuk produksi pertanian juga kecil, karena rata-rata produksi padi baik sawah maupun ladang lebih rendah jika dibandingkan dengan produksi rata-rata untuk tingkat propinsi. Rata-rata produksi padi di sawah transmigran sebesar 1,7 ton per hektar, dibandingkan dengan 2,2 ton per hektar in tingkat propinsi dan untuk padi ladang sebanyak 0,9 ton per hektar, dibandingkan dengan 1,7 ton per hektar untuk tingkat propinsi (Kanwil Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur, 1989:109; Kantor Statistik Kalimantan Timur, 1990:147). Produksi padi khususnya padi gunung varitas Mayas meningkat cukup tajam mencapai 3 ton kering panen pada tahun 2000.

Kecilnya kontribusi transmigran terhadap produksi pertanian ini mengindikasikan bahwa program transmigrasi, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi, belum sukses dalam meningkatkan produksi beras di propinsi Kaltim. Kondisi alami yang kurang cocok dan terbatasnya fasilitas merupakan faktor utama yang dapat menjelaskan keadaan ini. Banyak transmigran yang tidak mampu mengelola sawah karena kurangnya sarana irigasi. Di Lempake, misalnya, transmigran harus menunggu 14 tahun untuk mendapatkan pengairan irigasi, sementara itu mereka mengelola padi ladang dan sebagian juga mengikuti penduduk setempat berladang secara berpindah-pindah (Hidayati, 1994:67). Pada tahun 2000 eks-transmigran di Prangat Baru tidak dapat bertanam padi karena hama tikus dan babi, disamping belum adanya jaringan irigasi teknis.

Transmigran yang semula diharapkan sebagai pionir dan motivator dalam memperaktekkan sistim pertanian permanen, dibanyak tempat ikut bertani cara penduduk setempat dan menjadi peladang berpindah. Transmigran, baik sponsor maupun spontan, telah mengadopsi sistem tebang, bakar dan tanam, menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap lahan dan sistim pertanian tradisional (Kartawinata dan Vayda, 1984:114; Lahjie, 1989:11-15). System seperti ini dipraktekan di Lempake (Lahjie, 1989:14), Jonggon dan Sepaku Semoi (Hidayati, 1994:67). Baik Lempake dan Jonggon mempunyai akses yang cukup baik terutama komunikasi, transportasi dan pemasaran serta supervisi dari pemerintah. Keadaan ini masih berlangsung terus sampai tahun 2000, sebagian transmigran di lokasi transmigrasi Rantau Pulung juga telah mengikuti penduduk lokal berladang secara berpindah-pindah.

7.2.1. Transmigrasi PIR: Kasus Desa Prangat Baru

Sesuai dengan kebijakan transmigrasi, program transmigrasi PIR di Kaltim mulai direncanakan pada akhir Pelita III, tetapi realisasi penempatannya berlangsung pada Pelita IV yaitu pada tahun 1985 ketika ditempatkannya 155 KK (661 jiwa) transmigran di lokasi transmigrasi Tanjung Santan I (A) di Kabupaten Kutai. Penempatan transmigran PIR terus berlanjut dan semakin banyak hingga melampaui jumlah penempatan transmigrasi umum, terutama di Kabupaten Pasir yang didominasi oleh program PIR-SUS dan PIR-BUN.

Lokasi transmigrasi Tanjung Santan IV yang sekarang merupakan Desa Prangat Baru merupakan lokasi PIR-SUS karet dengan inti PTP 26. Pada waktu transmigran datang, karet belum di tanam, karena itu mereka membuka dan menanami pekarangannya dengan tanaman pangan seperti padi gunung, sayuran dan palawija. Baru setelah 6 bulan dilokasi, bibit karet ditanam oleh PTP 26, tetapi penanaman hanya dilakukan dipinggir jalan sampai sekitar 50 meter kedalam. Akibatnya, transmigran yang letak kebunnya di bagian dalam tidak mempunyai tanaman karet, padahal bagian dalam ini kayunya sudah ditebang, dirintis dan dibuat lubang-lubang siap untuk ditanami karet. Ketika karet berumur dua tahun terjadi kebakaran dan pihak PTP tidak mampu merehabilitasi tanaman karet yang terbakar secara menyeluruh. Akibatnya, pada tahun 1994 pihak PTP dan warga transmigran membuat perjanjian penyerahan kebun karet dengan status Tanaman Belum Panen (TBP) dan karena adanya kebakaran maka transmigran tidak diwajibkan membayar kredit. Pada waktu penelitian dilakukan, hanya ada tiga keluarga dari 146 kepala keluarga transmigran yang memiliki tanaman karet dengan luas yang ditentukan oleh PIR-SUS, sedangkan transmigran lainnya hanya memiliki lahan kosong karena karetnya terbakar atau karena memang tidak ada karet yang ditanam dilahannya.

Keadaan ini menyebabkan transmigran beralih ke pertanian tanaman pangan sebagai tanaman pokok. Pada tiga tahun pertama, transmigran menanam padi gunung dan hasilnya cukup baik, tetapi setelah itu panen selalu gagal karena hama, terutama babi dan tikus. Sebagian kecil transmigran juga membuat sawah tetapi hasilnya kurang baik juga dikarenakan banyaknya hama babi dan tikus. Karena itu, sekarang transmigran tidak menanam padi lagi dan beralih ke tanaman sayuran dan palawija, seperti kacang panjang, tomat, sawi dan jagung. Hasil sayuran dan palawija kebanyakan dijual kepada pedagang yang ada di desa atau pedagang pengumpul yang datang

ke desa dan membawa hasil produksi tersebut ke Bontang atau Sangatta. Menurut transmigran, sayuran dan palawija sebagian di jual disekitar perumahan PKT (Pupuk Kaltim), tetapi sayangnya, transmigran ini belum bisa mengisi keperluan Kaltim Prima Coal (KPC) di Sangatta karena mereka belum bisa menjamin kontinyuitas produksi.

Eks-transmigran Desa Prangat ini belum dapat mengembangkan pertanian tanaman pangan secara optimal. Disamping karena kendala hama, mereka juga menghadapi kesulitan saprodi (sarana produksi) karena minimnya modal yang mereka miliki. Walaupun di KPT terdapat kredit usaha dengan bunga yang sangat rendah (PUKK), transmigran di desa ini belum bisa memanfaatkan kredit lunak tersebut, karena desa mereka termasuk dalam kawasan PIR-SUS dibawah pembinaan PIR inti PTP 26. Menurut ketentuan, PTP 26 bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan kepada warga transmigran yang seharusnya mengelola kebun karet sebagai pekerjaan utamanya. Mengingat perhatian PTP sangat minim, maka warga berusaha membuat terobosan dengan mengajukan proposal mereka untuk mendapatkan kredit PUKK dan mereka sangat berharap agar PTP segera memindahkan semua aset dan stafnya ke Kabupaten Pasir agar mereka dapat terbebas dari semua ketentuan PIR-SUS dan PTP yang merugikan mereka.

7.2.2. Transmigrasi Umum: Rantau Pulung

Desa Mukti Jaya merupakan eks-lokasi transmigrasi UPT III Rantau Pulung yang telah dikukuhkan menjadi desa pada tahun 1995/96, lokasi ini pertama ditempat pada tahun 1991/92 oleh 390 KK transmigran umum yang terdiri dari transmigran asal Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan transmigran lokal (APPDT). Sebagai lokasi transmigrasi umum, kegiatan utama transmigran adalah mengembangkan pertanian tanaman pangan dengan tanaman yang utama adalah jagung disamping palawija dan sayuran seperti kacang panjang, tomat dan sawi. Hasil pertanian ini umumnya di jual ke Sangatta oleh pedagang pengumpul yang mengambilnya dari desa ini.

Seperti di Prangat Baru, hasil pertanian di lokasi transmigrasi ini belum dapat dijual ke KPC karena belum terjaminnya pasokan secara kontinyu. Untuk meningkatkan hasil pertanian di lokasi eks-transmigrasi ini, KPC memberikan bantuan kredit bibit jagung untuk 150 hektar lahan, tetapi bantuan ini mengalami kegagalan karena bibit yang diberikan kurang baik mutunya sehingga tidak menghasilkan.

Belajar dari pengalaman ini maka KPC merubah strateginya, bantuan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Untuk itu staff dari KPC sedang mengumpulkan informasi dari masyarakat, PPL dan perangkat desa untuk membuat rencana program pertanian di Desa Mukti Jaya pada tahun 2001.

Menurut responden kegiatan pertanian di Desa Mukti Jaya belum berhasil terutama dikarenakan hama babi dan tikus, akibatnya sebagian transmigran mencari usaha lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pekerjaan yang banyak ditekuni adalah dibidang perkayuan, sebagian transmigran bekerja sebagai penebang kayu secara ilegal dan sebagian lagi sebagai buruh mengangkut kayu dari tempat penebangan ke mobil. Kegiatan ini memerlukan banyak tenaga kerja karena setiap hari sekitar 50 truk mengangkut kayu dari sekitar lokasi transmigrasi Rantau Pulung. Umumnya transmigran menggunakan tenaga sapi untuk menarik kayu, rata-rata mereka mendapat upah sebesar Rp30.000 per hari. Disamping itu, sebagian transmigran ikut bertani cara penduduk asli Kutai berladang berpindah menanam padi gunung.

7.3. Dampak Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah

Kegiatan mobilitas penduduk dan pembangunan daerah memberikan dampak, baik pada penduduk maupun lingkungan disekitarnya. Dalam penelitian ini diidentifikasi tiga permasalahan yang cukup mencolok berkaitan dengan tanah, 'penduduk asli' dan degradasi sumber daya alam.

7.3.1. Permasalahan Tanah

Meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan jumlah penduduk serta mobilitas berkaitan erat dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan. Meningkatnya permintaan dan harga tanah seringkali merupakan pemicu terjadinya perselisihan mengenai tanah milik, baik antara pemerintah dan/atau pengembang dengan penduduk. Permasalahan semakin kompleks dengan keterlibatan para spekulan tanah yang memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan pribadi. Perselisihan cenderung meningkat jika ada rencana pembangunan atau proyek yang memerlukan lahan di tanah adat. Keadaan ini perlu mendapat perhatian, utamanya untuk meminimalkan terjadinya konflik kepentingan antara tatanan budaya lokal (dengan konsep tanah adat) dengan kepentingan pembangunan. Penanganan permasalahan ini perlu segera dilakukan untuk mendapatkan solusi

yang 'win-win' dimana pembangunan dapat terus berjalan tetapi hak-hak masyarakat tetap dihargai dan dihormati.

Tumpang Tindih Pemilikan Lahan

Tumpang tindih pemilikan lahan sering terjadi di Bontang. Permasalahan ini berkaitan erat dengan dua hal penting, yaitu pengakuan terhadap hak-hak masyarakat dan lemahnya registrasi pemilikan lahan. Masyarakat, khususnya masyarakat adat berdasarkan kebiasaan adatnya memiliki lahan yang telah dirintis dan diolah dengan batas-batas alami, misalnya sungai atau pohon tertentu atau pohon tumbang. Pemilikan ini diakui oleh semua anggota masyarakat adat, tetapi tidak diakui oleh pemerintah. Karena itu lahan masyarakat tersebut seringkali tidak 'hargai' dan diambil alih dengan ganti rugi yang murah oleh pemerintah atau pengusaha dengan dalih untuk kepentingan pembangunan.

Kebiasaan masyarakat adat ini juga diikuti oleh pendatang. Sebagian pendatang dari suku Bugis, Banjar dan Kutai yang tinggal di Desa Prangat Baru atau Loktuan, misalnya, merintis di hutan dalam kawasan Taman Nasional Kutai. Jika tidak ada yang melarang mereka mulai mengolahnya menjadi lahan pertanian dan karena telah mengetahui pentingnya surat tanah, mereka mulai mengurus surat-menyuratnya, padahal lahan tersebut sudah menjadi milik orang lain yang mungkin sudah pindah. Permasalahan ini semakin sulit karena pemilikan tanah tidak teregistrasi dengan baik dan petugas yang bertanggung jawab mengurus surat-surat tanah sering tidak melakukan tugasnya dengan baik (seperti mengecek apakah tanah tersebut sudah ada pemilik atau suratnya). Dengan kompensasi tertentu dari pengurus surat, petugas sering mengeluarkan sertifikat tanah yang sebetulnya sudah mempunyai surat pemilikan. Akibatnya, satu bidang tanah sering diakui oleh beberapa pemilik dengan surat tanah masing-masing.

Permasalahan tumpang tindih pemilikan tanah ini dapat diminimalkan dengan melakukan pengukuran dan registrasi tanah di desa pada saat pembuatan akta tanah. Pengukuran harus disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dan mengakui bahwa tanah yang diukur merupakan tanah yang dimiliki pengurus surat tersebut, karena itu pengukuran luas dan batas-batas tanah di desa sebaiknya dilakukan di lapangan. Jika pemilik tanah mau melakukan registrasi ulang, maka tanah tersebut sebaiknya diberi nomor registrasi baru

dengan memusnahkan nomor registrasi lama. Dengan demikian, tumpang tindih pemilikan dapat dihindari.

Spekulasi Lahan

Isu lain yang penting adalah spekulasi pemilikan tanah yang bertujuan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Ada dua cara yang biasa dilakukan. Pertama, spekulasi membuka hutan agar diberi ganti rugi, umumnya mereka merintis semak belukar disekitar hutan, seperti di sekitar TNK, yang diterlantarkan pemilikannya. Jika ada yang menegur, mereka minta maaf dan minta ganti rugi atas jerih payahnya merintis dan atas tanaman yang sudah ditanam.

Kedua dilakukan spekulasi jika mereka telah mengetahui bahwa akan ada kegiatan pembangunan di suatu daerah. Mereka mulai merintis atau membeli tanah dari masyarakat setempat dengan harga murah dan menjualnya ke pemerintah atau pengusaha dengan harga yang lebih mahal. Jika masyarakat mendengar daerahnya merupakan lokasi pembangunan, maka banyak anggota masyarakat yang mulai merintis dan menanami lahan tersebut dengan maksud minta ganti rugi dengan pemerintah atau perusahaan yang akan melakukan kegiatan di lahan tersebut.

7.3.2. Terdesaknya 'Penduduk Asli'

Kota Bontang merupakan kota pendatang dimana penduduk aslinya berasal dari Bontang Kuala, dan orang Kutai. Penduduk asli kota ini jumlahnya sangat sedikit dan umumnya mereka tinggal di pinggiran kota mendekati hutan tempat mereka berkebun. Mulanya, orang Kutai tinggal di pusat kota, tetapi karena perkembangan kota dan semakin meningkatnya jumlah pendatang, mereka menjual lahan kepada pengusaha dan pendatang dan kemudian mereka pindah ke pinggiran kota dan merintis lahan pertanian baru.

Tidak seperti pendatang yang ingin bekerja di PKT atau PT Badak, orang Kutai kurang berminat untuk bekerja formal menjadi karyawan tetap. Mereka lebih suka bebas dengan pekerjaan yang tidak mengikat dan tidak harus mengikuti aturan-aturan formal. Karena itu, orang kutai lebih memilih bekerja sendiri dengan lapangan pekerjaan yang menyatu dengan alam seperti menjadi petani atau peladang, pemburu atau nelayan.

Di Desa Loktuan, misalnya, mulanya desa ini dihuni oleh orang Kutai dan orang dari Barito Kuala. Mereka membuka hutan

disekitar desa yang dikelilingi oleh kegiatan *logging* dan berladang dengan cara berpindah-pindah, karena itu mereka mempunyai lahan yang luas. Pada waktu pendatang banyak yang tinggal di desa ini, orang Kutai mulai menjual sebagian lahannya, uang penjualan digunakan untuk membangun rumah-rumah panjang yang disekat-sekat menjadi beberapa petakan. Petakan rumah ini kemudian dikontrakkan atau disewakan kepada pendatang dan menjadi sumber uang tunai sebagian orang Kutai di Desa Loktuar. Sedangkan mereka sendiri pindah dan bertempat tinggal di pinggiran desa mendekati hutan dan membuka kebun di hutan.

7.3.3. Degradasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan

Meningkatnya mobilitas penduduk dan pembangunan berupa eksploitasi SDA di Kota Bontang, Sangatta dan sekitarnya telah berimplikasi negatif terhadap kelestarian sumber daya alam. Eksploitasi SDA (di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan) secara berlebihan telah menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam dan dibanyak tempat telah melampaui daya dukung lingkungan. Akibatnya, degradasi SDA dan kerusakan lingkungan (seperti deforestasi, kerusakan hutan, berkurangnya keaneka-ragaman hayati, pencemaran) terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini telah diidentifikasi isu degradasi SDA dan lingkungan yang utama adalah pembukaan ladang/kebun di kawasan konservasi dan hutan lindung, penebangan kayu secara ilegal dan pencemaran yang diakibatkan industri yang berkembang di daerah tersebut.

Deforestasi di Kota Bontang dan sekitarnya meningkat dengan cepat, utamanya untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi pengembangan kota dan pembangunan industri dan pertambangan di daerah tersebut. Untuk kawasan industri PKT dan LNG Badak diperlukan areal seluas 3.632 hektar, kawasan industri ini lebih luas dari kawasan perkotaan (2.390 hektar). Kawasan industri tersebar di dua kecamatan yang ada di Kota Bontang, industri PKT terletak di Kecamatan Bontang Utara dan LNG Badak di Kecamatan Bontang Selatan. Untuk kawasan perkotaan, proporsi terbesar peruntukan lahan adalah ruang terbuka dan jaringan jalan serta perumahan, sedangkan untuk perdagangan dan perkantoran proporsinya masih rendah.

Isu Pembukaan ladang/kebun di Taman Nasional Kutai dan Hutan Lindung

Penebangan liar di areal Taman Nasional Kutai (TNK) dan Hutan lindung di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur merupakan isu yang sangat krusial bagi kesinambungan TNK dan hutan lindung. TNK yang dikembangkan sejak zaman penjajahan tahun 1936 sudah mengalami deforestasi dan degradasi dari tahun ke tahun dan telah mencapai titik kritis untuk kesinambungan kawasan konservasi tersebut. Pada waktu dikukuhkan sebagai kawasan konservasi pada tahun 1981, luas areal TNK diperkirakan 197 ribu hektar, berkurang cukup besar dari luas semula 306 ribu hektar (Hidayati, 2000). Luas kawasan tersebut kemudian berkurang sangat cepat dan pada tahun 2000 luas TNK tinggal sepertiganya, yaitu sekitar 61 ribu hektar.

Deforestasi kawasan TNK berkaitan erat dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara legal dan kegiatan ekonomi yang ilegal. Pada mulanya konversi TNK terutama dilakukan untuk kegiatan *logging*, eksplorasi minyak dan pengembangan industri seperti minyak, gas alam dan Pupuk Kaltim (PKT), (Cleary dan Eaton, 1995; MacKinnon dan Sumardja, 1996:67-68). Konversi kawasan TNK juga berhubungan dengan pembangunan tambang batu bara di Sangatta dan pembangunan jalan antara Bontang, Sangatta dan Sangkulirang. Untuk jalan angkutan batu bara dan jalur hijau, Perusahaan Indominko Mandiri menggunakan kawasan TNK seluas 26.6245 hektar di areal hutan produksi dan 35.6229 hektar di hutan lindung. Pemanfaatan kawasan TNK ini mendapat izin resmi yang tertuang dalam perjanjian pinjam pakai kawasan hutan No.010/KW/PTGH-3/1995 antara Kanwil Dephut Kaltim dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam.

Keadaan semakin buruk karena dalam kawasan konservasi ini terdapat permukiman penduduk. Penebangan liar dilakukan oleh masyarakat, baik yang permukimannya termasuk dalam kawasan TNK maupun masyarakat sekitarnya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagian masyarakat membuka hutan di areal TNK dan mengolahnya menjadi lahan pertanian. Akibatnya, TNK telah berubah fungsi dari taman nasional menjadi kebun pisang yang dapat langsung dilihat disepanjang jalan antara Bontang dan Sangatta.

Penebangan liar di kawasan TNK meningkat sangat tajam setelah beroperasinya tambang batu bara tahun 1997. Masyarakat sekitar yang sebelumnya tidak diperbolehkan menggunakan kawasan lindung TNK sekarang tidak dapat menerima mengapa mereka tidak

boleh menebang dan mengolah lahan pertanian di kawasan tersebut, karena perusahaan batu bara diperbolehkan melakukan kegiatannya di kawasan tersebut. Keadaan ini sangat menyulitkan Tim Pengamanan Hutan Terpadu (TPHT) Kaltim di Bontang untuk bertindak, karena di satu pihak tim ini harus menjaga kesinambungan TNK tetapi di pihak lain pemerintah memberikan izin perusahaan untuk melakukan kegiatan di kawasan konservasi tersebut.

Gambaran di TNK ini menunjukkan adanya tumpang tindih dan kontradiksi kebijakan dan program dari pemerintah pusat, baik antar departemen maupun dalam satu departemen. Pada kasus ini areal tumpang tindih dengan kawasan konservasi dan dalam implementasinya, kepentingan ekonomi lebih diutamakan dengan mengorbankan kawasan konservasi yang seharusnya dipertahankan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Tetapi, karena kepentingan ekonomi, Departemen Kehutanan yang bertanggung jawab pada kesinambungan kawasan konservasi justru memberikan izin pada perusahaan minyak dan batu bara untuk beroperasi di kawasan TNK tersebut.

Penebangan Kayu secara ilegal

Meningkatnya mobilitas penduduk berkaitan erat dengan meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya hutan, terutama berupa penebangan hutan yang umumnya dilakukan secara ilegal. Penebangan liar tersebar di hampir seluruh wilayah Kaltim termasuk di kawasan hutan lindung dan konservasi atau taman-taman nasional di Kota Bontang, Sangatta dan sekitarnya. Penebangan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ilegal yang mempekerjakan penduduk di sekitar hutan atau dilakukan secara individual. Di lokasi transmigrasi Rantau Pulung, misalnya, sebagian transmigran bekerja sebagai penebang liar yang bekerja untuk pengusaha-pengusaha liar atau sebagai penarik kayu dengan menggunakan tenaga kerbau

Isu Pencemaran

Kegiatan industri dan pertambangan di Kota Bontang, Sangatta dan sekitarnya telah menimbulkan masalah pencemaran air, udara dan daratan dengan tingkatan yang bervariasi antar daerah tersebut. Kegiatan tambang batu bara Kaltim Prima Coal (KPC) tidak hanya menyebabkan penggundulan hutan menjadi areal terbuka yang menyebabkan meningkatnya erosi tanah dan lubang-lubang bekas galian, tetapi juga menimbulkan pencemaran sungai, terutama di

bagian hilir seperti kota Sangatta. Pencemaran di kota ini telah mengganggu penduduk karena mereka tidak dapat lagi mengkonsumsi air sungai sebagai sumber air minum. Oleh sebab itu penduduk Sangatta terpaksa membeli air minum, berarti meningkatkan biaya kebutuhan hidup sehari-hari.

Kegiatan Unocal di Rapak Lama, Marang Kayu tidak hanya berdampak pada pencemaran air, tetapi juga udara dan daratan. Pencemaran air limbah Unocal pada 11 Februari 2000 telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan (suspendid solid, amonia, merkuri, arsenik, besi terlarut, H₂S, COD, BOD, phenol dan minyak) dan telah mencemari areal persawahan dan permukiman. Disamping sungai, pencemaran juga terjadi di laut, terutama karena jarak pembuangan limbah Unocal yang hanya 100 meter dari tepi pantai Rapak Lama. Pencemaran ini telah merugikan masyarakat, nelayan kehilangan pekerjaan, karena ikan hasil tangkapan berbau minyak dan tak layak untuk dikonsumsi. Disamping pencemaran laut, juga terjadi pencemaran udara dengan bau minyak yang menyesakkan dan pencemaran daratan yang merubah warna pasir putih menjadi coklat. Masyarakat telah melakukan protes terhadap kejadian tersebut, tetapi belum ada realisasinya.

7.4. Mobilitas Penduduk dan Pembangunan: Tantangan Pelaksanaan Otonomi

Berlakunya UU otonomi No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk membangun dan mengelola sumber dayanya. Pemberian kewenangan ini memungkinkan daerah untuk mempercepat kegiatan pembangunan, utamanya dikarenakan daerah dapat menentukan sumber dan besar pendapatannya sendiri serta dapat mengalokasikan dana yang ada sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Pengalaman di Bontang dan sekitarnya menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan pembangunan sangat erat kaitannya dengan peningkatan mobilitas penduduk. Kecendrungan ini terutama dikarenakan (1) semakin lancarnya transportasi antar daerah, tidak hanya di pulau Kalimantan tetapi juga pulau-pulau lainnya seperti Jawa dan Sulawesi, (2) implementasi UU otonomi yang memberikan peluang besar bagi Bontang dan Kaltim untuk meningkatkan pembangunan dan (3) akan segera diberlakukannya era perdagangan

bebas dimana Bontang, Kaltim akan menjadi salah satu sumber 'gula' yang menarik minat para investor untuk melakukan usahanya.

Tetapi kecenderungan ini hanya akan bertahan pada jangka waktu tertentu saja sampai SDA di kota Bontang mencapai titik jenuh untuk dieksploitasi. Jika kegiatan pembangunan masih mengandalkan kekayaan SDA saja (yang tidak dapat diperbarui seperti minyak dan gas alam) maka pada masa yang akan datang Bontang dapat menjadi kota mati. Untuk menghindari keadaan tersebut, pemerintah daerah berupaya untuk menjadikan kota Bontang sebagai kota jasa, tetapi potret Kota Bontang saat ini mengindikasikan bahwa keinginan tersebut masih jauh dari harapan, karena itu masih diperlukan berbagai terobosan untuk mencapai visi ini. Beberapa upaya yang sedang dalam perencanaan adalah membuat pelabuhan laut di Kota Bontang yang direncanakan di Desa Loktuan, disamping mengusahakan pelabuhan udara (yang selama ini dimiliki perusahaan industri LNG dan PKT) untuk kepentingan umum. Upaya pembangunan pelabuhan ini diharapkan dapat memberikan jasa tidak hanya bagi penduduk di Kota Bontang saja, tetapi juga kabupaten sekitarnya, seperti Kabupaten Kutai Timur yang jaraknya hanya satu jam perjalanan darat dari Bontang.

Meningkatnya laju mobilitas penduduk di Bontang perlu diantisipasi, utamanya dalam kaitannya dengan kapasitas dan daya dukung Kota Bontang dalam menampung pendatang dan dampaknya terhadap pembangunan yang berkelanjutan di kota ini. Ada dua isu penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu: mobilitas tenaga kerja yang mulai 'meresahkan' tenaga kerja penduduk lokal dan mobilitas penduduk yang berkaitan dengan degradasi sumber daya alam.

Mobilitas penduduk di Kota Bontang, Sangatta dan sekitarnya berkaitan erat dengan upaya percepatan pembangunan di kota-kota tersebut sebagai respon dari kebijakan pemerintah pusat yang mengizinkan investor menanamkan investasinya di sektor kehutanan terutama untuk kegiatan *logging*, sektor pertambangan dan industri minyak, gas alam, batu bara dan PKT. Tingginya migran masuk juga didukung oleh keadaan di Bontang yang Sumber Daya Manusia (SDM)nya diakui masih terbatas, baik dari kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan SDM setempat secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi migran. Penduduk setempat seringkali tidak mendapat kesempatan karena kalah bersaing dan terbatasnya akses mereka terhadap peluang kerja. Akibatnya, migran mendominasi kesempatan kerja dari peluang yang tersedia. Ketimpangan antra

migran dan non migran ini cenderung meningkat dalam dua dekade terakhir.

Pengaturan mobilitas penduduk diperlukan, utamanya untuk mengurangi ketimpangan kesempatan kerja dan akses terhadap peluang kerja antara migran dan non migran. Dalam UU otonomi daerah tidak terdapat aturan yang khusus mengatur mobilitas penduduk, tetapi pengaturan ini dapat dilakukan melalui sektor-sektor yang terkait, terutama sektor-sektor yang dominan seperti kehutanan, pertambangan dan industri. Mengingat keterbatasan non migran, khususnya masyarakat adat, maka diperlukan 'proteksi', misalnya berupa 'kuota' yang dapat menjamin mereka (yang memenuhi 'standar') mendapat kesempatan untuk bekerja.

Isu lain yang penting dari meningkatnya kegiatan pembangunan dan mobilitas penduduk adalah meningkatnya kegiatan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) secara berlebihan sehingga berpengaruh negatif terhadap kelestarian SDA dan lingkungan. Kegiatan eksploitasi bahkan telah merambah di areal hutan lindung dan konservasi seperti di Taman Nasional Kutai (TNK). Pemerintah yang seharusnya berkewajiban untuk mengontrol dan melindungi TNK dari eksploitasi, bahkan memberikan izin kepada KPC untuk kegiatan tambang batubara di TNK termasuk di zona inti. Ketidakkonsistenan pemerintah ini telah memicu penduduk sekitarnya untuk melakukan hal yang serupa, mengeksploitasi TNK dan hutan lindung lainnya. Permasalahan ini perlu diatasi terutama karena SDA masih menjadi modal utama untuk kegiatan pembangunan Kota Bontang, Sangatta dan sekitarnya, terutama dalam mengimplementasikan undang-undang otonomi daerah.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kebijakan pemerintah melakukan eksploitasi kekayaan Kalimantan Timur dengan mengundang investor untuk menanamkan modalnya telah berpengaruh pada tingginya mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ke Kalimantan Timur datang baik secara spontan dengan harapan dapat meraih peluang kerja di Kalimantan Timur maupun migrasi yang dilakukan sebagai kebijakan pemerintah yang dirkenal dengan program transmigrasi. Migrasi penduduk ke Kalimantan Timur cenderung mengalami kenaikan pesat ketika eksploitasi sumber daya alam sedang terjadi secara gencar yaitu pada periode tahun 1970-1980 dan 1980-1990. Setelah tahun 1990 persentase kenaikan migrasi masuk mengalami penurunan yang kemungkinan disebabkan karena surutnya industri perkebunan. Namun demikian ada kemungkinan bahwa migrasi penduduk akan meningkat lagi seandainya pengembangan wilayah andalan telah terlaksana.

Migrasi masuk ke Kalimantan Timur yang tinggi telah mendorong perkembangan kota-kota di Kalimantan Timur. Salah satunya diantaranya adalah kota Bontang yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Pada mulanya kota Bontang ini dapat dikatakan sebagai daerah kosong karena penduduknya masih sedikit yaitu penduduk asli suku Kutai dan Bontang Kuala dan penduduk pendatang yang masih relatif rendah jumlahnya dan sebagian besar wilayahnya masih tertutup dengan hutan. Pembangunan industri perkebunan yang disusul dengan industri pupuk dan juga LNG telah berpengaruh perkembangan kota Bontang. Pembangunan industri yang menawarkan kesempatan kerja telah menarik migran dari berbagai daerah untuk datang ke kota Bontang. Pengaruh migrasi masuk ini ditandai oleh pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di kota Bontang.

Selain persentase yang cukup tinggi migran masuk ke Kalimantan Timur, migran juga datang dari berbagai daerah dengan berbagai macam etnik. Beragam suku bangsa yang mendiami Propinsi Kalimantan Timur merupakan asset daerah yang dapat digunakan sebagai sumber daya manusia bagi daerah setempat. Meskipun dalam segi jumlah penduduk asli terkalahkan dengan pendatang namun sampai saat ini keserasian sosial masih terjaga. Tidak ada satupun

kelompok etnis yang dominan yang mengakibatkan anggota etnis yang lain harus menyesuaikan diri dan tunduk pada aturan-aturan main yang ditetapkan oleh masyarakat setempat yang dominan.

Keserasian sosial yang muncul barangkali karena adanya pemahaman mengenai pentingnya nilai harmoni dalam masyarakat. Di samping itu nilai yang hidup dalam masyarakat yang menyatakan bahwa 'sida bawa barkah' di mana pendatang dianggap menguntungkan dan membawa rejeki bagi mereka nampaknya merupakan salah satu faktor penyumbang bagi keserasian sosial yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di daerah penelitian meskipun dihuni oleh berbagai ragam suku bangsa. Salah satu cermin dari tingginya toleransi antar etnis pada komunitas yang beragam adalah adanya kawin campur antar etnis yang merupakan bentuk akulturasi dari etnis yang berbeda. Dalam hal ini masing-masing anggota dari suatu etnis tidak melebur ke etnis yang lain meskipun mereka hidup dalam suatu perkawinan multi etnis. Pemakaian bahasa nasional merupakan salah satu upaya untuk tidak menonjolkan kesukuan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa kebersamaan untuk hidup dalam masyarakat yang beragam juga termasuk unik manakala masing-masing individu berusaha untuk mempraktekkan bahasa yang dipakai oleh lawan bicara yang kebetulan berasal dari etnis yang lain. Ketidakpemihakan dalam bekerja di kegiatan ekonomi juga merupakan suatu indikasi bahwa rasa toleransi antar etnis cukup tinggi.

Namun demikian, hidup rukun dan serasi tidak berarti tidak ada konflik. Hal ini dikarenakan konflik juga merupakan salah satu produk dari hasil hubungan antar kelompok. Meskipun derajat konflik yang ada belum pada taraf yang mengawatirkan namun hal ini perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan letupan yang lebih besar. Salah satu pemicu adanya konflik sosial adalah berangkat dari rasa kecemburuan di mana salah satu kelompok merasa tidak puas terhadap kelompok yang lain karena adanya ketimpangan baik dalam akses maupun kesempatan yang ada. Di samping itu, konflik juga akan timbul kalau batas-batas toleransi yang ada sudah terlampaui. Misalnya, perilaku dari sekelompok orang anggota etnis tertentu yang meminggirkan para anggota etnis setempat melalui dominasi dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya yang ada akan dapat menyulut letupan api konflik. Untuk mengantisipasi hal ini perlu adanya beberapa tindakan antara lain mempertahankan toleransi antar etnis dengan jalan meningkatkan komunikasi melalui lembaga-lembaga yang hidup di masyarakat seperti paguyupan, agama, lembaga pemerintah. Di samping itu perpecahan di kalangan masyarakat akan

dapat dicegah apabila dapat diciptakan suatu komunikasi dua arah yaitu dengan menciptakan dan/atau meningkatkan komunikasi antar kelompok masyarakat seperti orang 'kompleks' dan orang kampung melalui kegiatan sosial masyarakat seperti kegiatan olah raga, keagamaan. Mengingat cukup menyoloknya perbedaan antar kelompok yang tinggal di kompleks perusahaan dengan warga di luar kompleks sebaiknya perusahaan industri lebih proaktif dalam mensosialisasikan program-program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Pemberian kredit PUKK, pemberian bea siswa, pelatihan untuk pemuda, anak asuh, khitanan gratis dan lain-lain.

Kecemburuan pada umumnya terjadi tidak karena perbedaan etnis tetapi lebih disebabkan karena perbedaan status ekonomi. Kaum elite yang pada umumnya adalah karyawan perusahaan bertempat di kawasan eksklusif yang mempunyai fasilitas yang memadai. Sedangkan masyarakat kebanyakan tinggal diperkampungan kumuh dimana fasilitasnya hanya terbatas.

Pembangunan industri yang telah menyediakan peluang kerja dan juga berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan penduduk telah mempengaruhi tumbuhnya sektor jasa dan perdagangan yang dibutuhkan oleh adanya industri itu sendiri maupun untuk mencukupi kebutuhan penduduknya. Usaha-usaha informal sektor telah tumbuh subur seperti usaha warung makan baik kakilima maupun restoran, pedagang pakaian, usaha transportasi ojek dan usaha jasa lainnya.

Tumbuhnya berbagai macam lapangan pekerjaan ini, berbagai macam hubungan kerja telah terjadi baik hubungan yang sifatnya formal dan informal. Hubungan kerja yang sifatnya formal terutama terjadi pada usaha skala besar seperti perusahaan pupuk PKT dan anak perusahaannya dan juga LNG Badak dan usaha jasa seperti hotel berbintang lima. Sedangkan hubungan kerja yang bersifat informal umumnya terjadi pada usaha jasa skala kecil dan industri skala kecil. Usaha jasa skala kecil seperti usaha perdagangan dan bengkel, hotel dan industri kecil seperti industri tahu dan tempe.

Hubungan kerja yang sifatnya formal dimana perekrutan pegawai kurang terbuka telah menimbulkan ketidaksenangan sebagian warga terhadap perusahaan perusahaan yang ada dilingkungan PKT dan telah muncul isu seperti kolusi, dominasi etnis dan kecemburuan penduduk antara sebagian pendatang dan pendatang lainnya. Keadaan ini antara lain disebabkan karena hubungan kerja yang terbentuk di sektor formal ini hanya terjadi dari kalangan mereka sendiri mereka memasukkan kenalannya maupun

saudara-saudaranya yang berasal dari satu daerah. Sedangkan sebagian penduduk pendatang lain atau yang menyebut dirinya sebagai orang lokal kurang mendapat perhatian. Hubungan kerja yang masih mementingkan kerabatnya akan berpengaruh pada tingginya mobilitas penduduk secara berantai.

Pada hubungan kerja yang sifatnya informal seperti pada hubungan kerja sektor jasa baik jasa perdagangan maupun layanan dan industri berskala kecil hubungan kerja yang terbentuk lebih terbuka. Artinya hubungan kerja yang dilakukan tidak lagi memperhatikan hanya kepada sukunya sendiri tetapi telah melibatkan suku lain untuk berpartisipasi. Hubungan kerja yang terbentuk disini bahkan terdapat nuansa patron dan klien. Pengusaha bertindak seperti patron dan para pekerja seperti klien. Para pekerja pada umumnya tidak hanya mendapatkan gaji tetapi juga mendapatkan proteksi maupun bantuan ketika mengalami krisis. Sedangkan para pekerja tidak hanya memberikan tenaga kerjanya tetapi juga memberikan loyalitasnya. Hubungan kerja di sektor informal ini lebih mencerminkan kerjasama baik antara suku yang satu dengan yang lain maupun antara 'pendatang' dan penduduk lokal. Hubungan kerja ini juga menguntungkan jika dilihat dari sisi keamanan, karena jika terjadi konflik pengusaha dengan mudah bisa turut membantu meredakan karena loyalitas dari pekerja tersebut kepada patronnya.

Arus migrasi penduduk yang cepat ke Kalimantan Timur antara lain menuju daerah Bontang tidak saja berpengaruh pada hubungan sosial maupun hubungan kerja di antar kelompok masyarakat tetapi juga telah berpengaruh pada keadaan lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Pengaruh terhadap lingkungan yang jelas kelihatan antara lain tumbuhnya permukiman kumuh dan padat penduduk terutama di daerah sekitar kawasan industri. Keadaan ini dipengaruhi oleh meningkatnya migrasi penduduk yang menuju Bontang yang tidak diimbangi dengan prasarana perkotaan yang memadai seperti perumahan dan sanitasi air bersih maupun MCK.

Selain itu juga terjadi ketimpangan antara sarana dan prasarana perkotaan. Daerah kawasan industri dibangun secara eksklusif dimana dilengkapi dengan sarana maupun prasarana yang memadai seperti perumahan yang teratur, air bersih yang cukup, alat transportasi yang memadai dan jalan-jalan yang mulus. Selain itu fasilitas sosial juga tersedia seperti sekolah dan rumah sakit yang berkualitas tinggi. Namun demikian situasi diluar kompleks kelihatan amat kontras baik dilihat sarana dan prasarana maupun fasilitas yang tersedia.

Arus mobilitas masuk yang tinggi di Kalimantan Timur dan kepentingan berbagai lembaga terutama di Bontang juga telah berpengaruh pada peningkatan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sehingga menyebabkan degradasi sumber daya alam termasuk kerusakan lingkungan, deforestasi, kerusakan hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air laut dan udara. Penebangan liar hampir terjadi di seluruh Kalimantan Timur termasuk juga di kawasan hutan lindung. Penebangan liar di Bontang dan Kab. Kutai Timur terjadi di Taman Nasional Kutai (TNK). Hal tersebut karena terbatasnya lahan yang menyebabkan sebagian penduduk telah membuka hutan untuk permukiman dan yang digunakan sebagai lahan pertanian. Penebangan hutan telah menjadi bisnis kayu yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Sedangkan kegiatan pembangunan yang dilakukan di Bontang dan sekitarnya juga berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan antara lain pembangunan jalan Bontang Sangatta yang melewati TNK.

Migrasi penduduk ke Kalimantan Timur tidak saja terjadi secara spontan tetapi juga karena adanya kebijakan pemerintah dengan program transmigrasinya. Salah satu program transmigrasi adalah untuk mendorong perekonomian daerah terutama dalam mengembangkan sektor pertanian. Namun demikian program transmigrasi yang ada di sekitar wilayah Bontang baik transmigran PIR-SUS maupun tanaman pangan. Hal ini dikarenakan oleh berbagai sebab antara lain hama yang sulit ditanggulangi oleh petani seperti hama babi yang cepat memusnahkan tanaman terutama pada wilayah transmigrasi tanaman pangan.

Dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan mobilitas penduduk dan pembangunan daerah terutama dalam menapak ke era desentralisasi dan globalisasi ada beberapa asupan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk membuat kebijakan daerah. Antara lain yang berkaitan dengan interaksi sosial, hubungan kerja maupun hubungan mobilitas dengan perkembangan wilayah.

Asupan kebijaksanaan yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk isu yang berkaitan dengan hubungan kerja antara lain adalah:

- Untuk mengurangi dominasi etnik tertentu pada perusahaan besar terutama PKT dan kecemburuan masyarakat lokal kepada pendatang pada saat ini telah terjadi komitmen antara LSM, industri, anggota DPR dan pemerintah yang antara lain berisi semua perusahaan harus melaporkan adanya peluang kerja kepada Depnaker setempat dan perekrutan tenaga kerja

dilakukan oleh Depnaker yang dipantau oleh tim 11. Selain itu juga memberi prioritas kepada penduduk lokal untuk dapat bekerja pada perusahaan yang ada di Bontang. Pada saat sekarang ini yang perlu dilakukan adalah agar semua pihak mematuhi komitmen tersebut.

- Selain dari komitmen tersebut, hendaknya informasi peluang kerja ini dapat diketahui masyarakat secepat mungkin sehingga masyarakat dapat mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk pendaftaran. Informasi di sebarluaskan kepada masyarakat baik melalui pengumuman di Depnaker maupun dikirim ke setiap desa sehingga masyarakat mempunyai akses informasi yang sama
- Perlu dilakukan pembenahan sistem registasi penduduk untuk mencegah/mengurangi penyalah gunakan KTP untuk keperluan lamaran kerja (orang yang baru datang dapat segera mempunyai KTP Bontang untuk mendapatkan pekerjaan). Hal ini untuk mengurangi adanya isu tenaga kerja pendatang saja yang dapat diterima bekerja
- Kontribusi perusahaan besar kepada penduduk lokal perlu ditingkatkan dengan jalan kebutuhan pegawai di perusahaan tersebut dapat disuplai oleh perusahaan orang lokal sehingga mendorong pertumbuhan usaha di daerah ini. Selain itu perusahaan mengumumkan kontribusinya kepada masyarakat luas terutama kontribusi yang telah dilakukan perusahaan dalam konteks pembangunan kota Bontang.
- Dalam rangka mengatasi tingginya tingkat pengangguran karena ketidaksinambungan dalam bekerja perlu ditumbuhkan kreatifitas pada masyarakat untuk berusaha sendiri dengan memanfaatkan hasil yang telah diperoleh selama berusaha. Untuk itu .kontribusi dari perusahaan besar, masyarakat yang telah sukses dalam berusaha, LSM dan pemerintah untuk bekerjasama dalam meningkatkan ketrampilan berusaha dan untuk menumbuhkan peluang kerja baru. Seperti yang sering diutarakan oleh beberapa pengusaha maupun aparat pemerintah bahwa peluang usaha untuk dikembangkan di daerah Bontang masih cukup luas, cukup banyak layanan jasa yang belum terdapat di kota Bontang yang dapat diisi oleh penduduk lokal dan penduduk asal Kutai dan Bontang Kuala.

Selanjutnya rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk membuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan mobilitas penduduk dan pembangunan daerah antara lain adalah:

- Untuk mengatasi ketimpangan penyediaan sarana kota, khususnya fasilitas pemukiman, dan kecemburuan yang diakibatkan adanya kesenjangan tersebut diperlukan: (1) peningkatan penyediaan sarana, terutama yang menyangkut kebutuhan primer dan sanitasi lingkungan di pemukiman-pemukiman padat dan kumuh, (2) melakukan gerakan kampung *improvement* yang dilakukan secara partisipatif melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dan industri serta perusahaan-perusahaan yang ada disekitarnya dan (3) memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat sekitar agar mereka dapat turut serta 'menikmati' fasilitas yang ada di kawasan industri dengan jalan, misalnya memberi 'kuota' bagi warga masyarakat yang mempunyai prestasi untuk belajar di sekolah-sekolah yang dikelola yayasan PKT dan memberi 'keringanan' biaya bagi pasien yang tidak mampu dengan cara subsidi silang dengan pasien dari kalangan yang mampu di kota Bontang.

- Pertimbangan untuk mengatasi degradasi SDA dan lingkungan antara lain

Sosialisasi peraturan pengelolaan SDA dan lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat (termasuk aparat pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat madani lainnya) akan pentingnya keselstarian SDA dan lingkungan.

Penegakan hukum bagi pelanggar peraturan (seperti pencurian kayu, perambah hutan di TNK dan hutan lindung).

Melakukan gerakan penanaman kembali hutan, terutama TNK dan hutan lindung yang telah dirambah dan penanaman kembali hutan bakau disepanjang pantai yang telah dieksploitasi. Gerakan ini harus dilakukan secara partisipatif melibatkan pemda, pengusaha termasuk PKT, PT Badak dan anak-anak perusahaannya, PT Indominko, KPC dan masyarakat disekitar kawasan konservasi dan hutan lindung serta hutan pantai.

- Khusus untuk TNK dan hutan lindung

Pemetaan kembali batas-batas TNK dan hutan lindung yang dilakukan secara partisipatif melibatkan pemerintah daerah, pengusaha (KPC, PKT), LSM, penebang liar dan peladang.

Kampanye penyadaran masyarakat (termasuk penebang liar, peladang, pengusaha, aparat pemerintah daerah) akan pentingnya kelestarian TNK dan hutan lindung.

Pemberian alternatif pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya peladang.

Penegakan hukum bagi pelanggar peraturan di TNK dan hutan lindung.

Pengelolaan TNK dan hutan lindung berbasis masyarakat yang berkolaborasi dengan *stakeholder* yang instrumental (PHPA, Pemda, LSM, akademisi, pengusaha).

- Adapun pertimbangan untuk kebijaksanaan yang berkaitan dengan kontribusi transmigran untuk daerah adalah: Pengembangan perkebunan tanaman keras, seperti karet, perlu mendapat dukungan karena sesuai dengan potensi alami di propinsi Kaltim. Penanaman kembali tanaman karet di kebun transmigran PIR di Prangat Baru merupakan salah satu upaya penting untuk mempertahankan kesinambungan program PIR-SUS di eks-lokasi transmigrasi tersebut. Upaya ini dapat dilakukan oleh transmigran dengan memanfaatkan fasilitas pemberian kredit PUKK yang sponsori dan dikelola PKT. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan kepada transmigran agar dapat memperoleh kredit PUKK, karena sebagai peserta PIR-SUS mereka masih dibawah wewenang dan bimbingan PIR intinya, yaitu PTP 26 dan oleh sebab itu, walaupun PTP 26 dalam kenyataannya sudah tidak memperhatikan para transmigran, transmigran belum bisa mendapatkan fasilitas kredit yang ada.
- Disamping tanaman perkebunan, pengembangan tanaman pangan, khususnya palawija dan sayuran, perlu ditingkatkan, terutama dengan jalan mengatasi kendala utama yang dihadapi transmigran, yaitu hama tikus dan babi dan penggunaan input-input pertanian, terutama pupuk dan pestisida, sesuai dengan dosis yang cocok untuk Kaltim. Teknologi tepat guna untuk memberantas hama babi dan tikus merupakan prioritas utama yang perlu segera diupayakan. Penyediaan pupuk dan pestisida yang tepat ukuran dan waktu sangat penting dalam meningkatkan produksi tanaman. Upaya penyediaan dapat dilakukan secara berkelompok, sedangkan dana dapat diperoleh dengan memajukan peminjaman kredit PUKK yang disediakan PKT dan memanfaatkan bantuan yang diberikan KPC.

DAFTAR BACAAN

- Amiruddin, A. 1994. Peluang dan Tantangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia . *Makalah dipresentasikan pada Seminar Sehari Pengembangan Kawasan Timur Indonesia: Kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk ke Kawasan Timur*, Jakarta.
- Aswatini, Suko bandiyono dan Mujiyani, 2000. *Mobilitas Penduduk di Kawasan Kerjasama regional*, Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (PPT-LIPI), Jakarta
- Biro Pusat Statistik, 1972, *Penduduk Kalimantan Timur*, Hasil Sensus Penduduk 1971, Jakarta
- _____, 1982, *Penduduk kalimantan Timur*, Hasil Sensus Penduduk 1980, Biro Pusat Statistik, Jakarta
- _____, 1992, *Penduduk kalimantan Timur*. Hasil Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik, Jakarta
- _____, 1996, *Penduduk Kalimantan Timur*, Hasil Survei Antar Sensus 1995, Biro Pusat statistik, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 1999, *Kalimantan Timur Dalam Angka*, Samarinda.
- Cleary, M., and Eaton, P. 1995. *Borneo: Change and Development*. Oxford University Press, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Elisabeth, A. 1998. Penanaman Modal asing dan agenda Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Dalam Tyas, H., Salamm, A., Afadlal dan elisabeth, A (Eds.), *Strategi Pengembangan Penannaman Modal Asing di kawasan Timur Indonesia*. Jakarta:PPW-LIPI
- Gellner, E., 1977. Patrons and Clients in Ernest Gellner and John Waterbury (Eds) *Patrons and Clients in Mediterranean Societies*, Duckworth, USA, pp.1-7
- Hidayati, D. 2000. Towards Participatory Forest Conservation in Indonesia. *Paper presented at the IGES-LIPI Workshop on Forest Conservation Strategy*, Jakarta.

- _____. 1994. *Striving to Reach "Heaven's Gate": Javanese Adaptations to Swamp and Upland Environments in Kalimantan*. Canberra: Unpublish PhD Disertation.
- Kanwil Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur. 1989: *Buku data (Book of data)*. Samarinda: Kanwil Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur 1989 Report.
- Kartawinata, K. and Vayda, A.P. 1984: Forest conversion in East Kalimantan, Indonesia: the activities and impact of timber companies, shifting cultivators, migrant pepper-farmers, and others. In Baker, C.F. and Hadley, F.W.A.Z., editors, *Ecology in practice part I: ecosystem management*. Paris: UNESCO, 98-126.
- Kelompok Kerja SDM dan Tehnologi Dewan Pengembangan Kawasan timur Indonesia 1998/1999, kajian Peningkatan Sumber Daya Manusia di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sasamba Kalimantan Timur. Jakarta: Kelompok Kerja SDM dan Tehnologi Dewan Pengembangan Kawasan timur Indonesia bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Biro Perencanaan.
- Lahjie, A.M. 1989: *Karakteristik and teknik pendayagunaan lahan kering oleh petani di Kalimantan Timur (Characteristics of and farmers techniques in dryland East Kalimantan)*. Unpublished paper.
- MacKinnon, K., and Sumardja, E. 1996. Forests for the Future: Conservation in Kalimantan. In *Borneo in Transition: People, Forests, Conservation, and Development* (Padoch, C., and Peluso, N. L., eds., pp. 59-75). Oxford University Press, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Pelzer, K.M. 1978: *Agriculture*. Jakarta: East Kalimantan Transmigration Area Development Project Report No.2.
- Pemerintah Kota Bontang dan Lembaga Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Unmul. 2000. *Studi Sistim Jaringan Transportasi Wilayah Bontang*. Samarinda: Pemkot Bontang – LP3W Unmul.
- Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim. 1989: *Ikhtisar statistik Kalimantan Timur 1987 (Summary on 1987 East Kalimantan Statistict)*. Samarinda: Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Suparlan, Parsudi. 1999 'Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan', makalah disampaikan pada Jubileum ke 30 Jurnal Antropologi Indonesia, Depok 6 - 9 Mei 1999.

Tyas, H., Salamm, A., Afadlal dan Elisabeth A. (Eds.). 1998. *Strategi Pengembangan Penanaman Modal Asing di Kawasan Timur Indonesia*. Jakarta:PPW-LIPI

_____, Salamm, A dan Afadlal. 1998. Strategy Pengembangan Pembangunan Modal Asing di Propinsi Kalimantan Timur, dalam Tyas, H., salamm,A., Afadlal dan elisabeth, A (Eds)., *Strategy Pengembangan Penanaman Modal Asing di Kawasan Timur Indonesia*. Jakarta: PPW-LIPI.

Scot, James., Patronage or Exploitation , Ernest Gellner and John Waterbury (Eds) *Patrons and Clients in Mediterranean Societies*, Duckworth, USA, pp. 21-40

